

**SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 - 1949)
DAERAH JAWA TENGAH**

**Direktorat
Kebudayaan**

26

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
SISTEM INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945 - 1949) DAERAH JAWA TENGAH

Penyusun :
Drs. Wiyono, MA.
Drs. Suwardi
Drs. Hugiono
Drs. Asmito
Drs. Hartono Kasmadi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonèsia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, September 1991
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949) di Daerah Jawa Tengah adalah salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1980 sebagai cetakan pertama.

Buku ini di samping memuat uraian peristiwa-peristiwa penting dalam masa perjuangan kemerdekaan yang menggambarkan semangat heroisme dan patriotisme para pejuang, juga memuat uraian yang mencerminkan rasa kesetiakawanan sosial seluruh eksponen pejuang, yakni tentara dan rakyat, dalam usaha mempertahankan kemerdekaan khususnya di Daerah Jawa Tengah.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama kalangan masyarakat "butuh baca" sangat menaruh minat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara insidental.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan pada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional untuk

melakukan penyempurnaan, perbanyakkan, dan penyebaran buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ke-sejarahan dan memberikan informasi memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, September 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional



Dra. Sri Butjatiningsih
NIP. 130 422 397

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN . . .	iii
PENGANTAR CETAKAN KEDUA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENELITIAN	1
B. M A S A L A H	1
C. RUANG LINGKUP	3
D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH DAN PROSEDUR PENELITIAN	3
E. SEJARAH PEMBENTUKAN PROPINSI JAWA TENGAH	5
BAB II KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)	16
A. BIDANG PEMERINTAHAN	16
B. BIDANG SOSIAL BUDAYA	17
C. KEHIDUPAN EKONOMI	22
D. PENGARUH POLITIK PENDUDUKAN MILITER JEPANG	25
E. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK DAN SOSIAL	27
BAB III KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PRO- KLAMASI KEMERDEKAAN	44
A. KEGIATAN MASYARAKAT DI DAE-	

	RAH PADA AWAL REVOLUSI KEMERDEKAAN	44
	B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH	49
	C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN DI DAERAH	65
	D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI DAERAH ...	84
BAB IV	PERJUANGAN DI DAERAH	93
	A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I	93
	B. MASA AKSI MILITER BELANDA I ...	98
	C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA ...	103
	D. INTERKASI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL	109
	E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN DAN KEHIDUPAN	115
BAB V	KEADAAN DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN	119
	A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB	119
	B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA	135
	C. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH	141
	D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN	148
BAB VI	PENUTUP	157
	DAFTAR SUMBER	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengumpulkan, mencatat, meneliti dan mengolah sumber-sumber sejarah yang terdapat di daerah Jawa Tengah guna disusun menjadi suatu naskah Sejarah Tematis Daerah Jawa Tengah Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945–1949. Penyusunan Sejarah Daerah Jawa Tengah tersebut dimaksudkan sebagai pelengkap bagi Sejarah Nasional, khususnya pada masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).

Penyusunan Sejarah Daerah Jawa Tengah Masa Revolusi Kemerdekaan ini, mendasarkan pada berbagai peristiwa sejarah yang telah terjadi di daerah Jawa Tengah, melalui proses penelitian terhadap sumber sejarahnya, baik yang primer maupun sekunder, sesuai dengan tujuan penulisannya.

B. MASALAH

Masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945–1949 merupakan bagian dan puncak dari Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai dan menegakkan kemerdekaan. Masa Revolusi Kemerdekaan yang dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, didahului oleh masa pendudukan bala

tentara Jepang yang singkat (1942–1945), dan merupakan lanjutan dari perjuangan bangsa Indonesia selama masa sebelumnya, terutama masa Pergerakan Nasional (1908–1942). Karena itu, masa Revolusi Kemerdekaan merupakan masa yang sangat penting di dalam sejarah bangsa Indonesia dan mempunyai nilai kesejarahan dan perjuangan yang sangat tinggi. Pada masa tersebut terjadi penggalangan kembali kehidupan bangsa dan negara yang merdeka, termasuk penyusunan negara dan penataan nilai-nilai perjuangan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah lepas dari semua ikatan penjajahan.

Masa Revolusi Kemerdekaan merupakan ujud yang senyatanya dari jiwa, semangat dan nilai 45 yang menjadi motor penggerak dan sekaligus tujuan perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia selama Masa Revolusi Kemerdekaan terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Daerah Jawa Tengah dengan berbagai corak dan ragamnya.

Karena itu, perlu diadakan penelitian, pencatatan dan penulisan Sejarah Daerah Jawa Tengah selama masa Revolusi Kemerdekaan dengan lebih luas, mendalam, dan terperinci, agar diperoleh pengertian yang mendalam mengenai perjuangan bangsa Indonesia di daerah Propinsi Jawa Tengah selama masa Revolusi Kemerdekaan.

Perjuangan di Daerah Jawa Tengah untuk menegakkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dicatat dan ditulis guna diwariskan kepada generasi berikutnya dengan demikian akan terjadi kesinambungan perjuangan antara generasi bangsa dewasa ini dengan generasi pendahulunya dalam mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dari penulisan sedapat mungkin menjangkau seluruh wilayah administrasi Propinsi Jawa Tengah. Menurut keadaannya pada tahun 1950, Propinsi Jawa Tengah meliputi Karesidenan-Karesidenan Pekalongan, Semarang, Pati, Banyumas, Kedu, dan Surakarta. Pada tahun 1979 Propinsi Jawa Tengah meliputi 35 Kabupaten/Kotamadya.

Sesuai dengan pengertian bahwa sejarah ialah aktivitas atau kegiatan manusia di masa lampau yang meliputi semua segi kehidupan masyarakat, maka penulisan Sejarah Daerah Jawa Tengah Masa Revolusi Kemerdekaan 1945–1949 akan mencakup berbagai segi kehidupan, seperti tata pemerintahan dan kenegaraan, politik, militer, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama dan kepercayaan, kepemudaan, kewanitaan, dan pers.

Di dalam pembahasan dan penulisan sedapat mungkin bersifat daerah (regiosentris), sehingga sejauh mungkin dapat tercermin peranan dan kegiatan masyarakat daerah Jawa Tengah di dalam masa Revolusi Kemerdekaan.

Meskipun demikian, karena berbagai keterbatasan, tidak mungkin untuk meneliti seluruh wilayah administrasi Propinsi Jawa Tengah, sehingga dirasa cukup untuk memilih wilayah yang dapat dianggap mewakili atau memegang peranan penting selama periode yang bersangkutan.

D. PERTANGGUNG-JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

Metoda penelitian yang digunakan oleh tim penulis, seperti lazimnya pada kegiatan penelitian Ilmu Sejarah, ialah melakukan langkah kegiatan sebagai berikut :

Pencarian dan pengumpulan sumber bahan (*heuristic*) primer dan sekunder. Kegiatan ini berupa pencarian dan penelitian sumber lisan dan tertulis, serta melakukan studi perpustakaan (*library research*).

Di dalam penelitian sumber insani, tiap anggota tim yang bertanggungjawab pada penulisan masing-masing bab, melakukan wawancara dengan manusia sumber untuk bab yang berkaitan. Selain itu, beberapa responden telah dihubungi secara bersama. Tetapi karena kesibukannya, beberapa responden tidak dapat memenuhi permintaan tim untuk melakukan wawancara secara bersama. Meskipun demikian, sebagian tokoh telah memberikan informasi bahan sejarah secara tertulis.

Tim penulis juga menerima beberapa buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan dari daerah-daerah yang bersangkutan, khususnya untuk periode Revolusi Kemerdekaan. Buku Peringatan atau Sejarah Perjuangan Kemerdekaan dari daerah ini biasanya diterbitkan oleh Panitia Peringatan 17 Agustus di daerah yang bersangkutan atau oleh Pemerintah Daerah setempat. Buku serupa dapat dianggap sebagai sumber primer, karena di dalamnya terdapat informasi data tentang kejadian-kejadian di daerah pada masa pendudukan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan beserta tokoh-tokohnya yang memegang peranan.

Juga beberapa skripsi sarjana dan sarjana muda pada Jurusan Sejarah FKIS – IKIP Semarang yang menggarap sejarah perjuangan kemerdekaan di daerah-daerah dari masa Revolusi Kemerdekaan, telah dipergunakan sebagai bahan. Juga ikut dimanfaatkan himpunan data yang telah dikumpulkan oleh Institut (Jurusan Sejarah FKIS – IKIP Semarang) dalam rangka sesuatu penelitian, khususnya yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan di Propinsi Jawa Tengah selama Masa Revolusi Kemerdekaan. Anggota anggota tim penulis, sesuai dengan bab yang menjadi tanggung jawabnya, telah melakukan studi perpustakaan.

Analisis dan pengolahan data (kritik sumber), dilakukan oleh anggota anggota tim penulis dengan membanding-bandingkan dan mengkaji data yang diperoleh dari wawancara, informasi tertulis dari responden, sumber tertulis primer, dan sumber sekunder. Tim juga bertemu dan berdiskusi untuk memperoleh kepastian dan kebenaran tentang sesuatu data.

Penulisan naskah (*sinthese*). Tahap ini dilakukan oleh masing-masing penulis naskah sesuai dengan masa atau bab yang menjadi bagian penulisannya, dengan sejauh mungkin berpedoman pada *terms of Reference*

E. SEJARAH PEMBENTUKAN PROPINSI JAWA TENGAH

Sebagai suatu propinsi, Jawa Tengah telah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Guna memperoleh pengertian tentang terbentuknya Propinsi Jawa Tengah sampai pada tahun 1950, akan diuraikan sedikit sejarah pembentukannya dan latar belakang perkembangan administrasi pemerintahannya.

1. Zaman Penjajahan Belanda

Sampai diadakannya Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903, satuan kenegaraan Hindia Belanda (*Nederlands Indie*) dibagi dalam wilayah wilayah (*gewest*) yang hanya merupakan daerah administratif di dalam suatu pemerintahan yang sentralistis, Daerah-daerah administratif tersebut yang paling besar ialah *gewest* (wilayah, yang kemudian dapat disamakan dengan karesidenan), *afdeling*, dan *onderafdeling*, yang semuanya berada di bawah kekuasaan seorang pegawai pangreh praja bangsa Belanda (*Europese Bestuursambtenaren*) ialah *resident*, *assistent resident* dan *controlour*. Di Jawa dan Madura lingkungan daerah *afdeling* bersamaan dengan lingkungan daerah *regentschap* (kabupaten), yang terbagi lagi atas daerah *district* (kawedanan) dan *onderdistrict* (kecamatan). Daerah kabupaten ke bawah berada di bawah kekuasaan seorang pangreh praja bangsa Indonesia (*inlandse Bestuursambtenaren*), ialah *regent* (bupati), *wedana* dan *asisten wedana*, yang kesemuanya memerintah di bawah pengawasan pegawai pegawai pangreh praja bangsa Belanda. (*assistent resident* mengawasi *regent* atau bupati, dan *controleur* mengawasi *wedana* dan *asisten wedana*). Sampai pada akhir pemerintahan Hindia Belanda sifat dualistis tersebut masih selalu terdapat, meskipun ada usaha

untuk mengubah pemerintahan sentralistis pada akhir abad ke-19 menjadi pemerintahan desentralistis pada tahun 1903 dan mengurangi kekuasaan pegawai bangsa Eropa dengan *ontvoogdingordonnantie* pada tahun 1918.

Untuk daerah Jawa Tengah pembagian ke dalam wilayah wilayah (*gawest*) sampai diadakannya Undang Undang Desentralisasi tahun 1903, adalah sebagai berikut :

- a. *Semarang Gewest*, meliputi *Regentschap* (Kabupaten) Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara dan Grobogan.
- b. *Kedu Gewest*, meliputi *Regentschap* (Kabupaten) Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, dan Karanganyar.
- c. *Rembang Gewest*, meliputi *Regentschap* (Kabupaten) Rembang, Blora, Tuban, dan Bojonegoro.
- d. *Banyumas Gewest*, meliputi *Regentschap* (Kabupaten) Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga.
- e. *Pekalongan Gewest*, meliputi *Regentschap* (Kabupaten) Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. (40. h. 199).

Setelah dikeluarkannya Undang Undang Desentralisasi tahun 1903 (*Decentralisatie Wet 1903*), diberikan hak otonomi dan pembentukan dewan daerah kepada setiap *gewest* (karesidenan) dan kota besar (*gemeente*). Sejak itu terbentuk Daerah Otonom Karesidenan (*Gewestelijke Ressorten*) dan Daerah Otonom kota besar (*gemeente*). serta Badan Badan Perwakilan Karesidenan dan kota besar (*Gewestelijke dan Gemeente Locale Raden*) Untuk pelaksanaannya di Indonesia pada tahun 1905 diterima *Decentralisatie Besluit* atau keputusan Desentralisasi sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 1905 No. 137. Adapun pembentukan Daerah daerah Otonom Karesidenan (*Gewestelijke Ressorten*) di Jawa Tengah baru dilaksanakan pada tahun 1907 dengan urutan pembentukan sebagai berikut :

- a. Karesidenan Banyumas, termuat dalam Stbl 1907 No. 136.

- b. Karesidenan Pekafongan, termuat dalam Stbl. 1908 No. 174.
- c. Karesidenan Kedu, termuat dalam Stbl. 1908 No. 177.
- d. Karesidenan Semarang, termuat dalam Stbl. 1908 No. 175.
- e. Karesidenan Rembang, termuat dalam Stbl. 1907 No. 134.

Di samping menetapkan Daerah Karesidenan Otonom (*Gewest*), undang-undang tersebut juga menetapkan kota-kota tertentu di dalam *Gewest* (Karesidenan) sebagai kota-kota Otonom yang di dalam pembentukannya, ternyata terjadi lebih dahulu dari pada penunjukan Karesidenan sebagai Daerah Otonom. Sudah pada tahun 1905 tiga kota besar di Jawa, Batavia ialah (Betawi), Meester Cornelis (Jatinegara), dan Buitenzorg (Bogor) ditunjuk sebagai Daerah Kota Otonom (*Gemeente*). Setelah tiga kota tersebut, maka dalam tahun 1906 beberapa kota di Jawa Tengah ditunjuk juga sebagai Daerah Kota Otonom, yaitu :

Kota Semarang, dalam Stbl. 1906 No. 120.

Kota Tegal, dalam Stbl. 1906 No. 123.

Kota Pekalongan, dalam Stbl. 1906 No. 124.

Kota Magelang, dalam Stbl. 1906 No. 125. (49, h. 13—16).

Tetapi perlu dicatat, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai Daerah Kota Otonom ialah kota besar yang mempunyai sifat kebaratan (*western*), yaitu yang mempunyai penduduk bangsa Eropa cukup banyak dan di sekitar kota terdapat *onderneming* (perkebunan swasta) gula, kopi atau lainnya, sehingga otonomi yang diberikan hanya diperuntukkan dan dinikmati golongan masyarakat Eropa, jadi bukan otonomi yang sebenarnya.

Di dalam perkembangannya, *Gemeente* (Daerah Otonom Kota) menunjukkan kehidupan yang lebih baik daripada Daerah Otonom Karesidenan (*Gewest*). Hal ini disebabkan, karena Ketua *Gemeenteraad* (Dewan Daerah Kota) bukan seorang pegawai negeri seperti Residen, tetapi seorang *Burgemeester* (Wali-kota) yang bukan pegawai pemerintah. Tambahan lagi Daerah Otonom Kota mempunyai wilayah yang terbatas jika dibanding-

kan dengan wilayah Karesidenan. Perlu diperhatikan anggota Dewan Kota kebanyakan terdiri dari bangsa Eropa (Belanda). Keadaan ini menyebabkan pada tahun 1922 Daerah Otonom Kota diperbolehkan membentuk badan pengurus harian yang disebut *College van Burgemuster en Wethouders* (Dewan Pengurus Harian terdiri dari Walikota dan Penyelenggara Undang Undang) untuk mendampingi Walikota dalam pekerjaannya sehari-hari. Disamping itu keanggotaan Dewan Daerah Kota yang dipilih meskipun hanya dari golongan atas telah menyebabkan Daerah Otonom Kota mempunyai perkembangan yang lebih berhasil sebagai suatu daerah Otonom.

Di dalam perkembangan selanjutnya, otonomi dan desentralisasi dijalankan lebih lanjut dalam bentuk penyerahan kekuasaan yang lebih luas, yang semula dipegang oleh pegawai pangreh praja bangsa Belanda kepada pegawai pangreh praja bangsa Indonesia. Kehendak Politik ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Ontvoogding*, artinya pendewasaan, dan dilaksanakan pada tahun 1918 dengan *Ontvoogding Ordonnantie* (*Staatsblad* No. 674).

Ontvoogding Ordonnantie ini sebetulnya mengandung maksud untuk mengurangi jumlah *Assistent Resident* dan menghapus jabatan jabatan *Controleur*. Di Jawa Tengah, kabupaten yang telah dikenakan ordonansi pendewasaan, adalah :

- a. Kabupaten Banyumas (Stbl. 1919 No. 668)
 - b. Kabupaten Blora (Stbl. 1919 No. 804)
 - c. Kabupaten Batang (Stbl. 1920 No. 45)
 - d. Kabupaten Jepara (Stbl. 1920 No. 480)
 - e. Kabupaten Kebumen (Stbl. 1920 No. 608)
- (R.A. Sosrokusumo, 1951, hal. 20 – 22).

Sehubungan dengan pergolakan politik yang terjadi di Hindia Belanda dan di negeri Belanda, maka setelah Perang Dunia I, perundang-undangan Desentralisasi tahun 1903 dirasa tidak memuaskan lagi. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan Undang-Undang Reorganisasi Pemerintahan tahun 1922 dengan

nama *Bestuurhervormingswet 1922* atau Undang-undang Perubahan Pemerintahan (*Staatsblad* 1922 No. 216) pasal 119, 120, 121, 122 *Indische Staatsregeling* 1925. Undang Undang tahun 1922 ini memungkinkan pembentukan daerah otonom yang lebih besar dari *gewest* (Undang undang tahun 1903) dengan nama *Provincie*, sedangkan bagian dari Propinsi dapat pula dibentuk sebagai daerah otonom berdasarkan Undang Undang tahun 1922. Berdasarkan *Bestuurhervormingswet* tahun 1922 tersebut, kemudian dibentuk :

- a. *Provincie Ordonnantie*, yang memuat ketentuan lanjut tentang daerah otonom Propinsi (Stbl. 1924—78; perubahan terakhir 1940 – 266,251).
- b. *Regentschapsordonnantie*, yang memuat ketentuan tentang daerah otonom *Regentschap* (Kabupaten) (Stbl. 1924 – 79; perubahan terakhir Stbl. 1940 – 226).
- c. *Stadsgemeenterodonnantie*, yang memuat ketentuan tentang *Standsgemeenten* (Daerah Kota Otonom) di Jawa dan Madura (Stbl. 1926 – 365; perubahan terakhir Stbl. 1940 – 226 dan Stbl. 1948 – 145). (23, h. 14).

Berdasarkan ketiga ordonansi itu, di Jawa – Madura dibentuk tiga propinsi, kabupaten, dan beberapa kota besar otonom (*gemeenten*) sedang daerah otonom Karesidenan (*gewestelijke ressorten*) berdasarkan *Decentralisatie Wet* 1903 dihapuskan.

Tidak termasuk ke dalam wilayah Propinsi ialah Kasunanan Surakarta dan daerah Mangkunegaran dalam Karesidenan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman, yang termasuk Karesidenan Yogyakarta. Atas dasar *Provincie Ordonnantie* tahun 1924, dikeluarkan Undang undang (*Ordonnantie*) yang membentuk Jawa Tengah sebagai propinsi ialah *Ordonnantie* tahun 1929 *Staatsblad* 1929 No. 227 (*Instellings Ordonnantie van de Provincie Midden Java*) atau Ordonansi Penetapan Propinsi Jawa Tengah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1930.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-un-

dangan Propinsi Jawa Tengah terbentuk sejak tanggal 1 Januari 1930, merupakan suatu Daerah otonom dengan hak otonomi tertentu serta mempunyai Dewan Propinsi (*Provinciale Raad*). Batas wilayah Propinsi Jawa Tengah pada saat itu dapat dilihat pada pembagian administratif yang tersebut dalam *Staatsblad* tahun 1933 No. 251 dan 335, yang kemudian diubah dengan *Staatsblad* tahun 1934 No. 682. Propinsi Jawa Tengah dibagi dalam beberapa Karesidenan (*Residentie*); masing-masing Karesidenan meliputi beberapa Kabupaten (*Regentschap*), yang dibagi lagi ke dalam beberapa kawedanan (*Districten*).

Adapun karesidenan dan kabupaten yang termasuk dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1934 adalah :

- a. *Residentie Pekalongan*, meliputi Kabupaten (*Regentschap*) Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, dan *Stadsgemeente* Pekalongan dan Tegal.
- b. *Residentie Jepara – Rembang*, meliputi Kabupaten (*Regentschap*) Jepara, Rembang, Pati, Blora, dan Kudus.
- c. *Residentie Semarang*, meliputi Kabupaten (*Regentschap*) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, dan *Stadsgemeente* Semarang dan Salatiga.
- d. *Residentie Banyumas*, meliputi Kabupaten (*Regentschap*) Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Karanganyar, dan Banjarnegara.
- e. *Residentie Kedu*, meliputi Kabupaten (*Regentschap*) Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen, dan *Stadsgemeente* Magelang.

Pada tahun 1934 diadakan penggabungan beberapa kabupaten, yaitu :

- a. Kabupaten Batang, digabungkan dengan Kabupaten Pekalongan.
- b. Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto.

- c. Kabupaten Kutoarjo, digabungkan dengan Kabupaten Purworejo.
- d. Kabupaten Karanganyar, digabungkan dengan Kabupaten Kebumen. (40, h. 200–201).

2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, Jawa – Madura diperintah oleh Tentara ke-16 yang berkedudukan di Jakarta. Susunan Pemerintahan militer Jepang terdiri atas *Gunsyeireikan* (Panglima Tentara, kemudian disebut *Saiko Syikikan*) sebagai pucuk pimpinan pemerintahan. Tetapi yang menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari ialah Kepala Staf Tentara Ke-16 yang disebut *Gunseikan*, sebagai Kepala Pemerintahan Militer, sedang pemerintahannya disebut *Gunseikanbu* (Staf Pemerintahan Militer Pusat). *Gunseikanbu* mempunyai tujuh macam *bu* (departemen), ialah : *Somubu* (Dalam negeri) *Zainobu* (Keuangan), *Sangyobu* (Ekonomi), *Kotsubu* (Lalulintas), *Syihobu* (Kehakiman), *Somubu* (Urusan Umum), dan *Sendenbu* (Propaganda).

Koordinator Pemerintahan Militer disebut *gunseibu*, yang dibentuk di Jawa Barat dengan pusat di Bandung, Jawa Tengah dengan pusat di Semarang, dan Jawa Timur di Surabaya; selain itu dibentuk juga dua daerah istimewa (*koci*) ialah Surakarta dan Yogyakarta *Koci*.

Masa pemerintahan sementara diakhiri dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 27 (tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah) dan Undang Undang No. 28 (Tentang Aturan Pemerintahan Syi dan Tokubetsusyi). (*Syi*, artinya kota; *Tokubetsusyi* artinya Kota Khusus). Menurut Undang Undang No. 27 tahun 2602 (1942) tersebut, seluruh Jawa – Madura, kecuali Daerah Istimewa (*Koci*) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas daerah-daerah :

- a. *Syuu* (Karesidenan), nama pejabatnya *Syucokan* (Residen).
- b. *Si* (Kotapraja), nama pejabatnya *Syico* (Walikota).
- c. *Ken* (Kabupaten), nama pejabatnya *Kenco* (Bupati).

- d. *Gun* (Distrik / Kawedanan), nama pejabatnya *Gunco* (Wedana).
- e. *Son* (Onder distrik/Kecamatan), nama pejabatnya *Sonco* (Camat).
- f. *Ku* (Kelurahan/Desa), nama pejabatnya *Kuco* (Kepala Desa).

Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan daerah yang tertinggi ialah *Syuu* (Karesidenan), sedang Propinsi-Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang ada pada masa Hindia Belanda dahulu, dihapuskan. *Syucokan* sebagai Kepala Pemerintahan *Syuu* (Karesidenan) kedudukannya sama dengan Gubernur pada masa Hindia Belanda, meskipun daerah kekuasaannya hanya seluas daerah Residensi (*Syuu*). Seorang *Syucokan* (Residen) mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif sehingga pemerintahannya bersifat otoritis di bawah pemerintahan militer Jepang.

Dalam tugasnya, *Syucokan* dibantu oleh *Cokan Kambo* (Majelis Permusyawaratan Cokan) yang mempunyai tiga *bu* (bagian), ialah :

- a. *Naseibu* (bagian pemerintahan umum);
- b. *Keizaibu* (bagian ekonomi);
- c. *Keisatsubu* (bagian kepolisian).

Di Pulau Jawa terdapat 17 *Syuu* (karesidenan), sedang *Syuu* yang terdapat di daerah Jawa Tengah, ialah : Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, dan Kedu. Pada masa pendudukan Jepang, Karesidenan Jepara – Rembang diganti namanya menjadi *Pati Syuu*. (13, ha. 156 – 157; 40. h. 201).

Dengan demikian dapat dikatakan, pemerintahan pendudukan militer Jepang melanjutkan sebagian besar struktur pemerintahan daerah menurut susunan pemerintahan Hindia Belanda, namun tanpa asas asas pemerintahan otonomi dan desentralisasi. Dewan daerah boleh dikatakan tidak ada sama sekali, dan semua kekuasaan berada di tangan *Syucokan* (residen), *Kenco* (Bupati), dan *Syico* (Walikota). Pemerintah militer Jepang ha-

nya melaksanakan dekonsentrasi kekuasaan, bukan desentralisasi.

Ketika diperlukan kerjasama dengan bangsa Indonesia di dalam bidang pemerintahan, berhubung dengan keadaan peperangannya, maka pada bulan September 1943 dibentuk Dewan Kepulauan Jawa atau Dewan pertimbangan Pusat (*Chuo Sangiin*) dengan *Osamu Seirei* No. 36 tahun 2603 (1943), dan Dewan Karesidenan atau Dewan Pertimbangan Karesidenan (*Syuu Sangikai*) dan Dewan Kotapraja (*Tokubetsu Si Sangikai*) dengan *Osamu Kanrei* No. 8 tahun 2603 (1943). Anggota-anggota dari ketiga Dewan tersebut didudukkan melalui pengangkatan atau pemilihan secara bertingkat, dalam mana pemilih-pemilihnya ditunjuk pula. Dewan Pertimbangan Daerah pada hakekatnya hanya merupakan badan penasehat belaka, sehingga tidak mempengaruhi secara luas kekuasaan *Syucokan*. (23, h. 19–20).

3. Zaman Kemerdekaan 1945 – 1950

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menentukan pembagian Negara Indonesia atas Daerah Besar dan kecil yang bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Dalam penjelasan pasal 18, disebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi, dan daerah Propinsi akan dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah 1945 No. 2, sebagai kelanjutan dari Aturan Peralihan UUD pasal II, ditetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih tetap berlaku.

Menurut ketetapan panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (badan yang sah menurut Undang-Undang Dasar pasal I Aturan Peralihan) dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bahwa untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 Propinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Propinsi tersebut ialah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan

Sunda Kecil. Ditetapkan pula bahwa Daerah Propinsi dibagi dalam Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen; dan bahwa Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah, kedudukan Kota (*Gemeente*) diteruskan?.

Penetapan lebih lanjut ialah Undang-Undang No. 1 tanggal 23 Nopember 1945 mengenai pembentukan Komite Nasional di Daerah dan bahwa Komite Nasional Daerah tersebut menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya.

Atas dasar ketetapan itu, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Daerah Jawa Tengah merupakan satu propinsi di dalam Negara Kesatuan R.I. yang dikepalai oleh Gubernur dan dibantu oleh KNI Daerah. Sementara itu, berhubung dengan perkembangan politik pada saat itu, pada tahun 1946 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 16/SD yang membekukan Daerah Swapraja (*Vorstenlanden*, Koci pada zaman Jepang) Kasunanan dan Mangkunegara, dan kedua bekas swapraja tersebut menjadi Karesidenan Surakarta.

Pada tahun 1948 dikeluarkan Undang-undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah (U.U. No. 22 tahun 1948). Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tersebut, Daerah Negara RI tersusun dalam tiga tingkatan daerah otonom, ialah: 1. Propinsi; 2. Kabupaten (Kota Besar); 3. Desa (Kota Kecil), yang pembentukannya harus dilaksanakan dengan Undang-Undang. Dengan U.U. No. 22 tahun 1948 ini maka daerah otonomi Propinsi dihidupkan kembali. Kemudian atas dasar U.U. No. 22 tahun 1948 tersebut, dikeluarkan Undang-Undang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, ialah Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 (oleh Pemerintah R.I. beberapa saat sebelum RIS dilebur menjadi Negara Kesatuan R.I.), yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 1950. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1950 ini wilayah Propinsi Jawa

Tengah meliputi enam karesidenan, ialah lima Karesidenan lama (Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu, dan Banyumas), ditambah dengan Karesidenan Surakarta yang meliputi daerah bekas Kasunanan dan Mangkunegaran. (23, h. 26 – 29; 34, 40, h. 201 – 202.)

BAB II

KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

Pasukan Jepang mendarat di Jawa Tengah dengan kekuatan satu divisi di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian pasukan Jepang bergerak ke daerah Cepu untuk menguasai sumur minyak, dan seterusnya sebagian menuju daerah Purwodadi. Dari tempat ini tentara Jepang bergerak ke dua arah, yaitu ke Surakarta dan Boyolali, lalu bertemu di kota Klaten. Selanjutnya tentara Jepang meneruskan perjalanannya menuju Yogyakarta, Magelang dan Semarang.

Setelah kota-kota penting dapat diduduki maka wilayah Jawa Tengah jatuh ke tangan tentara Jepang. Gerakan operasi tentara Jepang berlangsung amat cepat dan hanya menjumpai perlawanan tentara KNIL Belanda yang tidak berarti, apalagi ditambah sikap rakyat Jawa Tengah yang enggan membantunya.

Sesudah diadakan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1943 antara pemerintah Hindia Belanda dengan Jepang yang berintikan penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada pemerintah Jepang, maka Indonesia secara formal diperintah oleh Jepang dengan luas wilayah meliputi seluruh bekas Hindia

Belanda. Pada saat itu pula Jawa Tengah mulai diperintah oleh penjajah baru dan diperlakukan sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Susunan dan luas wilayah kekuasaan pemerintah Jepang di Jawa Tengah dapat dikatakan sama dengan wilayah pemerintah Belanda yang mendahuluinya. Perbedaannya hanya pada nama-nama pejabat pemerintahan dan sebutan wilayahnya, yaitu karesidenan menjadi *Syu* di kepalai *Syucokan* kabupaten menjadi *Ken* di bawah *kenco* (bupati), kawedanan menjadi *Gun* dibawah *Gunco* (wedana), kecamatan menjadi *Son* dibawah *Sonco* (camat) dan kelurahan menjadi *Ku* dikepalai *Kunco* (lurah), sedangkan walikota atau *Syico* memimpin wilayah kota atau *Syi*.

Pada zaman Jepang mulai diperkenalkan sistem *tonarigumi* di seluruh desa dan kampung dengan sistem *tonarigumi* mekanisme pemerintahan baik yang horisontal maupun vertikal menjadi lebih cepat, sebenarnya *tonarigumi* pada zaman Jepang didasari pada kepentingan perang bagi pemerintah pendudukan. Sistem *tonarigumi* meliputi menyampaikan informasi dan instruksi pengerahan tenaga (*romusa, hirohosi*) dan bahan (beras, padi, ternak, ubi, perhiasan, besitua dan lain-lain), pengawasan masyarakat, yang dibebankan kepada ketua *tonarigumi* di tiap desa dan lingkungan huniannya. Di samping itu *tonarigumi* juga menjalankan kegiatan sosial lainnya, seperti pembagian jatah bahan makanan dan lain-lain disesuaikan dengan keadaan zaman peperangan. Dengan sistem tersebut masyarakat Jawa Tengah dapat diawasi langsung dan segala perintah dari pemerintah Jepang kepada rakyat dapat disampaikan dengan mudah dan cepat. Berdasarkan orientasi di atas dapat disimpulkan, bahwa pemerintahan yang ditangani oleh pamongpraja bukan hanya terlibat pada urusan pemerintahan sipil, tetapi juga didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang.

B. BIDANG SOSIAL BUDAYA.

Kehidupan sosial budaya sewaktu Jepang menduduki daerah Jawa Tengah, dapat diketahui, misalnya melalui bidang pen-

didikan. Pemerintah Jepang mendaya-gunakan bidang pendidikan untuk menanamkan pengaruhnya yang dilaksanakan sejak tingkat sekolah dasar hingga di perguruan tinggi. Anak-anak yang pada tahap pertama memasuki sekolah dan baru berusia enam sampai 12 tahun masih belum dapat memikirkan dan memahami kehidupan bernegara. Pada anak-anak itu dengan mudah dapat dimasuki paham atau pengaruh kebudayaan Jepang, misalnya melalui nyanyian, tarian dan bahasa Jepang. Tetapi usahanya dalam bidang pendidikan ini tidak menghasilkan harapan yang diinginkan, sebab masa penjajahan Jepang di Indonesia hanya berlangsung selama 3½ tahun dan masyarakat tidak bersimpati pada cara dan gaya pemerintah pendudukan yang keras.

Selama masa penjajahan yang singkat itu, pemerintah Jepang belum berhasil menanamkan pengaruhnya yang mendalam pada pelbagai sektor kehidupan di Jawa Tengah, meskipun sudah cukup untuk membuat bidang pendidikan menjadi mundur.

Pada setiap pagi lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, harus dinyanyikan di saat menjelang masuk sekolah dan setelah itu disusul dengan upacara mengheningkan cipta dan melakukan seikerci menghadap ke Tokyo ke arah timur untuk menghormati *Tenno Heika*. Maksudnya untuk menghormati bangsa dan negara Jepang yang di saat itu didengung-deungkan sebagai saudara tua bagi seluruh bangsa Indonesia dan pemimpin seluruh Asia yang sedang berperang melawan sekutu. Dalam kegiatan sekolah, bahasa dan huruf Jepang juga diwajibkan dipelajari. Bahkan huruf Jepang itu diajarkan pada masyarakat Jawa Tengah, lebih-lebih pada para pemudanya, baik yang tinggal di kota maupun di desa, yang biasanya dipimpin oleh para pemimpin tonarigumi atau pegawai pamongpraja.

Bidang pendidikan lain yang perlu diketengahkan ialah latihan kemiliteran, yang ditangani oleh para guru sekolah dan pejabat pamongpraja. Di antara pejabat pamongpraja yang perlu

disebut ialah Mochtar yang dikemudian hari menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Semula pejabat tersebut adalah seorang asisten wedana atau Camat di Pulosari, kabupaten Pemalang. Mochtar menganjurkan kepada masyarakat untuk membentuk lumbung hidup di kecamatan Pulosari guna mengurangi penderitaan masyarakat yang sudah tidak dapat makan secara cukup. Di samping itu ia mencoba mendidik para wanita untuk meninggalkan kebiasaan mencari kutu (*pepetan*) pada waktu lowong dan mengalihkannya kepada pekerjaan yang produktif, seperti membuat alat kerajinan rumah tangga.

Mochtar juga mengajarkan latihan baris berbaris dan gerak badan serta memberantas buta huruf di kalangan para pemuda di kecamatannya. Kegiatan mendidik rakyat yang lebih menonjol adalah mengajarkan nyanyian, bahasa dan huruf Jepang, walaupun masih pada tingkat dasar. Aktifitasnya itu dilakukan di sekitar tahun 1942 – 1943. Setelah diketahui oleh Syucokan di Pekalongan, ia diberi tugas sebagai *Shidookan* bagi latihan *Seinendoozo* di Tegal. Mochtar menjalankan kegiatannya dua minggu di Tegal dan dua minggu di Pekalongan dalam sebulan.

Pada bulan Mei 1944 pemerintah Jepang melepas Mochtar sebagai camat Pulosari dan diangkat sebagai *Shidookan* penuh pada latihan *Seinendoozo*. Kemudian nama dan sifatnya di ganti menjadi *Latihan Pemuda Tani* atau *Noomindoozo* di Tegal.

Semua kecamatan di wilayah Pekalongan diharuskan mengirimkan seorang pemuda untuk mengikuti latihan selama tiga minggu di Tegal. Setelah selesai mengikuti latihan, mereka mendapat tugas sebagai pemimpin di bidang pertanian di daerahnya masing-masing. Di samping tugas pokoknya, mereka juga harus melatih baris berbaris, gerak badan dan nyanyian Jepang di desanya.

Nampak betapa besar peranan Mochtar dalam bidang pendidikan bagi para pemuda di *Pekalongan* Syu pada masa peme-

rintahan Jepang. Tugas tersebut dilaksanakan dengan tujuan yang dalam, agar para pemuda sudah siap siaga bilamana waktunya sudah datang untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Para pemuda itulah yang didambakan dapat merebut kemerdekaan dari tangan pemerintah Jepang. Para pemuda di daerah lain di Jawa Tengah pada umumnya juga melakukan kegiatan seperti di Pekalongan dan Tegal.

Kehidupan sosial budaya pada zaman pendudukan Jepang mengalami perubahan besar. Semua warisan kebudayaan dari zaman Hindia Belanda dicoba untuk dihilangkan. Sekolah-sekolah dasar pada zaman Hindia Belanda, terdiri dari *Europese Lagere School (ELS)*, *Hollands Inlandse School (HIS)* dan *Sekolah Ongko Loro* dihapus dan dibentuk *Sekolah Rakyat* enam tahun.

Proses penyebaran kebudayaan Jepang sejak semula sudah dilaksanakan. Di kota Semarang segera dibuka kursus bahasa Jepang bagi para pejabat dan guru yang dilakukan dengan intensif. Pada sore hari dibuka pula kursus bahasa Jepang bagi umum yang banyak diikuti para pelajar. Guru-gurunya (*sensei*) adalah para prajurit dan perwira Jepang yang sudah disiapkan.

Di sekolah pelajaran bahasa Jepang dilakukan dengan intensif, sehingga sembilan jam pelajaran dalam satu minggu. Murid Sekolah Menengah Pertama sudah dapat membaca dan menulis huruf *katakana*, *Hiragana* dan beberapa ratus huruf Honji (*kanji*), mampu berkencan atau berkomunikasi dan berpidato dalam bahasa Jepang. Beberapa nyanyian Jepang sudah dikuasainya. Namun, karena guru-guru yang dapat berbahasa Jepang itu bagaimanapun relatif sangat sedikit, maka cita-cita pemerintah Jepang untuk menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Jepang dan menjalankan pendidikan dalam bahasa Jepang, tentu saja tidak mungkin terlaksana. Lagi pula semangat kebangsaan tidak pernah padam. Justru pada zaman Jepang itu bahasa Indonesia berkembang dengan amat pesat.

Kehidupan kesenian juga berkembang pada zaman Jepang,

terutama di kalangan pelajar dan pemuda. Sebagai contoh, pemerintah memberi alat musik piano (tidak baru) pada Sekolah Rakyat, misalnya di Sekolah Rakyat Sempurna di Pendrikan. Maksudnya untuk meningkatkan seni musik, tetapi karena tiadanya guru pengajar, maka cita-cita itu pun belum terlaksana.

Pada zaman Jepang, sering diadakan perlombaan menyanyi yang diselenggarakan pada siang hari, karena selama zaman pendudukan Jepang diadakan pembatasan penerangan lampu listrik. Semua lampu harus ditutupi atau dibungkus dengan kain atau kertas berwarna gelap supaya jangan dapat dilihat oleh pesawat terbang musuh.

Tarian Jepang (*Odori*) juga dipelajari, tetapi terbatas pada keperluan perayaan sekolah. Pada bidang olahraga terjadi kegiatan pesat. Setiap pagi diadakan senam pagi yang disiarkan oleh radio (*Radio Taiso*). Di sekolah sebelum pelajaran dimulai diadakan senam pagi. Karena waktu itu adalah zaman perang, maka olahraga juga bertemakan olahraga semi-militer, misalnya perlombaan lari dengan berkelompok sejauh lima, sepuluh sampai dua puluh kilometer. Kelompok harus tiba di garis finis secara utuh. Anggota kelompok yang tidak lagi tahan (kecapean, sakit) harus dibawa dengan cara digendong dan dipapah. Perlombaan lari semacam itu dinamakan *koogun*, dan amat menarik dan menantang bagi para pelajar Sekolah Menengah. Contoh lain, adalah perlombaan meruntuhkan dan mempertahankan tiang bendera yang terkuat dari balok kayu. Pertandingan antar sekolah olahraga sering diadakan di stadion Semarang.

Jenis olahraga Jepang yang dipelajari, misalnya adu gulat (*sumo*) dan main pedang (pedang kayu), *kehdo*). Tetapi sungguh mengherankan, permainan bela diri yang sekarang terkenal seperti *judo*, dan *karate* belum memasyarakat dan hanya dipelajari di kalangan keprajuritan (*Heiho*, *Peta*).

Pendidikan keprajuritan (semi-militer) berkembang pesat. Pada zaman pendudukan Jepang, semua organisasi kepanduan

dibubarkan. Para pemuda pelajar dan umum dan umur 13 tahun dilatih dalam barisan *Seinendan dan Seinentai*, tiap sore (kecuali Sabtu dan Minggu) sejak jam 15.00 hingga petang. Mereka berkepala gundul semua dan diberi sepatu karet serta topi model tentara Jepang. Bagi barisan istimewa diberi uniform berwarna coklat tua (*Seinendan Semarang*). Mereka berlatih baris berbaris dengan senjata bedil dan metralyur dan kayu. Taraf latihan kemiliteran ini cukup tinggi terbukti sebagian besar pemuda *Seinendan* dengan mudah mengganti bedil kayu dengan bedil betulan pada jaman Revolusi Kemerdekaan dan Perang Kemerdekaan. Sungguh disayangkan, barisan *Seinendan* hanya diikuti pemuda laki-laki.

Khusus bagi pemuda pelajar sekolah menengah kemudian diadakan latihan *Gakuto-tai* dalam lingkungan sekolah. Mereka secara bergiliran menjaga sekolah dengan berdiri tegak di pintu masuk sekolah dengan membawa bedil kayu (*ju*).

Para pemuda desa dilatih dalam barisan *Keibodan* (pembantu polisi). Begitu pula kaum wanita *Fujinkai* dan ulama dilatih berbagai kegiatan..

C. KEHIDUPAN EKONOMI.

Sudah sejak permulaan pemerintahan Jepang di Jawa Tengah keadaan ekonomi rakyat menjadi tidak baik, karena banyaknya kewajiban dan setoran yang dikenakan kepada rakyat sehingga penghasilan rakyat menjadi berkurang, apalagi rakyat yang kebetulan tinggal di daerah-daerah yang tanahnya tidak subur atau irigasinya tidak baik, banyak yang mengalami kekurangan makan atau mengalami busung lapar.

Pada masa Jepang memerintah daerah Jawa Tengah para petani Jawa Tengah juga terkena tanam-wajib, yaitu tanaman yang harus ditanam seperti rami atau rosela dan jarak. Kedua jenis tumbuhan itu ditanam secara masal di seluruh Jawa Tengah. Akibatnya tanaman padi dan polowijo menjadi berkurang sehingga hasilnya menjadi sedikit atau tidak cukup untuk makan sehari-hari.

Pada tanaman padi, para petani harus menyerahkan separo hasil tanaman ini kepada Jepang dengan harga yang sudah ditetapkan dengan amat murah. Jadi petani harus dapat hidup dengan separo hasil tanaman padinya. Bila petani menghendaki untuk menjual padinya, daerah penjualannya tidak boleh melewati wilayah Kabupaten atau bahkan kadang kadang tidak boleh melewati kota kecamatan setempat.

Pada suatu saat, memang ada daerah yang menghasilkan padi lebih banyak, tetapi hasil lebih itu tidak boleh dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Harga bahan makanan juga tidak terjangkau oleh rakyat pada umumnya, yang rata-rata penghasilannya amat berkurang. Di samping itu persediaan bahan makanan dan barang memang amat sedikit. Maksud pemerintah Jepang melarang menjual bahan makanan keluar daerah karena tiap wilayah diharuskan mencukupi kebutuhannya sendiri. Pendirian seperti itu tidak logis, karena keadaan tiap wilayah tidak sama. Penduduk juga dipaksa menanam rami, ubi, iles-iles dan jarak untuk keperluan perang. Mereka harus mengusahakan perawatannya, pemeliharannya dan proses memetik produksinya, yang semuanya dibebankan kepada rakyat. Instruksi penanaman tumbuhan tertentu dilaksanakan melalui pejabat-pejabat setempat, yaitu lurah yang menerima perintah dari camat, sedangkan camat menerima tugas dari pejabat vertikal di atasnya.

Pada zaman pendudukan Jepang, jenis tanaman pokok yang diperlukan rakyat malahan terdesak oleh tanaman wajib, yang hasil tanaman ini dipakai untuk cadangan atau perbekalan di masa perang. Bagi rakyat saat itu tanaman tersebut tak ada gunanya, kecuali justru mendatangkan penderitaan, sehingga rakyat saat itu menderita kelaparan. Di saat saat yang demikian pemerintah Jepang menganjurkan mengumpulkan jenis tanaman iles-iles. Bukan aneh lagi kalau rakyat makan bekicot dan memakai pakaian goni karena memang tidak ada lagi yang dapat dimakan dan dipakai penutup tubuh.

Pengumpulan barang-barang dan bahan makanan oleh rakyat itu dilakukan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan tonari-gumi karena adanya desakan yang keras dari pemerintah pendudukan tentara Jepang.

Di daerah Jawa Tengah yang menghasilkan hasil hutan, hasilnya didaya-gunakan semata mata untuk pertahanan atau kepentingan perang Jepang. Penebangan hutan di wilayah Pati, Blora dan Kendal dilakukan dengan memakai tenaga *romusha*. Pertanian Jawa Tengah diperas oleh pasukan Jepang untuk kepentingan perangnya di kawasan Asia. Jalur kehidupan ekonomi di daerah Jawa Tengah amat terganggu karena pemerasan pemerintah Jepang. Di Jawa Tengah pemerintah Jepang mempergunakan pelbagai prasarana jalan di darat, terutama jalur kereta api lintas utara dan selatan untuk mengangkut komoditi yang diperlukan dalam peperangan.

Ditinjau dari sudut industri kehidupan ekonomi pada zaman Jepang berarti mundur beberapa abad. Hal ini juga akibat politik pemerintah Belanda yang boleh dikatakan tidak membangun industri di Indonesia. Di Jawa Tengah waktu itu hanya ada pabrik gula, pabrik minyak kelapa, pabrik rokok dan bengkel yang tidak memadai. Sebagian besar keperluan barang industri yang sederhana pun, seperti lampu pijar (booglamp), tekstil, paku, kawat, pembalut, batu batere, pensil dan lain-lain, diimpor dari luar negeri. Karena itu sesudah persediaan barang industri habis, kehidupan rakyat menderita.

Pada zaman pendudukan Jepang, tidak mudah mendapatkan lampu pijar, bahan pakaian, obat, ban sepeda, sepatu, sabun, pasta gigi, tinta, kertas dan lain-lain. Terpaksa masyarakat menggunakan barang surogat (pengganti) yang berkadar rendah, misalnya, pembalut luka dibuat dari kulit batang pisang, ban sepeda diganti ban mati dari karet mentah, kancing terbuat dari batok kelapa, pasta gigi berbentuk tepung, sabun diganti buah kelerak, pil kina berukuran sebesar kelereng, korek api diganti batu api dicetuskan dengan kawul dasi disambung-sambung menjadi rok bawah, kerta merang menggantikan kertas H.V.S.

dan sebagainya. Kehidupan ekonomi di Jawa Tengah yang sangat merosot pada zaman pendudukan Jepang untuk sebagian besar akibat dari berkecamuknya perang, dimana produksi menurun dan perdagangan impor-expor terhenti sama sekali.

D. PENGARUH POLITIK PENDUDUKAN MILITER JEPANG

Pemerintah pendudukan Jepang di daerah Jawa Tengah melarang segala bentuk kegiatan politik. Sementara pemimpin, pemuda, dan rakyat di Jawa Tengah ada yang bergerak atau melakukan aktifitas politik secara ilegal, sedangkan bagian besar menghentikan kegiatan politik untuk sementara karena khawatir akan kekejaman aparat pemerintah Jepang, terutama polisi rahasianya yang dinamakan *Kenpeitai*. Di antara pemimpin rakyat dan pemuda Jawa Tengah juga banyak yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang, meski tujuan yang pokok tetap untuk kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Dalam keadaan kehidupan politik semacam itu, pemerintah militer Jepang di Jawa Tengah selalu berusaha memeralat para pejabat. Hal itu nampak pada kegiatan, seperti pengerahan tenaga pamongpraja untuk mengumpulkan barang-barang yang diperlukan seperti bahan makanan, hasil perkebunan dan perhiasan, serta pengerahan tenaga manusia untuk mengerjakan pembuatan jalan, dan pelbagai proyek militer, seperti kubu pertahanan di wilayah Jawa Tengah, dan lapangan terbang di Gunung Tidar, Magelang. Penduduk keturunan terutama Cina dan rakyat di sekitarnya juga ikut dipekerjakan di proyek di Gunung Tidar dan perbentengan di Ngluwar yang terletak di Kecamatan Salam—Muntilan. Penduduk keturunan Cina di Muntilan sangat dibenci oleh Jepang sebab dianggap sebagai kaki tangan Belanda pada masa itu.

Di wilayah Purworejo, tenaga rakyat dikerahkan membuat jalan Purworejo — Magelang dan Purworejo — Wonosobo. Bupati Purworejo saat itu ialah Hasan Danuningrat. Di daerah Semarang, kerjapaksa yang amat terkenal pada masa Jepang ialah perluasan lapangan terbang Kalibenteng (Ahmad Yani) de-

ngan cara menggempur sebuah bukit yang terletak di sekitarnya. Kerja paksa di daerah ini amat berat dan banyak memakan korban manusia.

Peristiwa kemelaratan dan penyiksaan pasukan Jepang di Jawa Tengah pada saat itu merupakan hal yang sudah biasa, tetapi informasi diperalatnya pejabat Indonesia di Ampel Gading, Kecamatan Pulosari, Pemalang perlu disampaikan tersendiri. Pada bulan Maret 1945 rakyat di Kecamatan Ampel Gading berontak, karena tindakan pejabat pamongpraja (Camat) yang sedang melakukan operasi mencari tumpukan padi rakyat dianggap terlalu keras. Pejabat pamongpraja itu dipukul beramai-ramai oleh orang desa setempat, bahkan lalu dibunuh dengan tusukan bambu runcing sehingga meninggal. Dengan kejadian ini sebagian besar pelaku pemberontakan Ampel Gading ditangkap dan dipenjara.

Karena peristiwa huru-hara itu, maka camat pulosari dipindahkan menjadi camat Ampel Gading. Mutasi itu dilakukan atas perintah Jepang dan berdasarkan atas kesepakatan rapat para walikota dan Bupati pada saat itu. Pemberontakan Ampel Gading itu menunjukkan, bahwa di satu pihak kesengsaraan rakyat yang disebabkan praktek pemerintahan Militer Jepang telah sampai pada taraf yang tak dapat ditahan oleh rakyat; sedang di lain pihak pemerintah sudah merasa amat khawatir akan meluasnya pengaruh huru-hara Ampel Gading ke daerah-daerah lain, seperti yang terjadi akibat pemberontakan Blitar dan Indramayu pada tahun 1945 terhadap daerah-daerah lain di Jawa. Jadi dapat disimpulkan, bahwa paksaan, penderitaan dan ketidak-puasan di kalangan masyarakat Jawa Tengah telah mencapai titik batas kesabaran.

Pada zaman Jepang semua organisasi yang bergerak di bidang politik dilarang. Beberapa tokoh masyarakat di Jawa Tengah banyak yang bersedia bekerja sama dengan Jepang, tetapi kerjasama itu hanyalah taktik belaka untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang mengambil strategi demikian untuk daerah Magelang, an-

tara lain adalah Raden Panji Suroso, RAA Sosrodiprodjo, dan R. Gondomertosuprodjo. Sedang bagi daerah Purworejo adalah Hasan Danuningrat. Perlu dikemukakan bahwa banyak kegiatan yang dilakukan pada masa pemerintahan Jepang di daerah Jawa Tengah, lebih-lebih dalam kaitannya dengan kegiatan masyarakat atau organisasi pemuda setempat.

E. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK DAN SOSIAL.

Pendudukan Jepang di Jawa Tengah membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat terutama dalam bentuk perlengkapan. Untuk mendapatkan bantuan itu pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1942 membentuk organisasi bernama *Gerakan 3A*, yaitu Nipon Pelindung Asia, Nipon Pemimpin Asia dan Nipon Cahaya Asia. Karena Gerakan 3 A tidak efektif, pemerintah Jepang lalu mendirikan organisasi bernama *Pusat Tenaga Rakyat atau Putera*. Kemudian, pada bulan Desember 1943 untuk menggantikan Putera didirikan organisasi bernama *Jawa Hokokai*. Kecuali itu masih dikenal beberapa organisasi lainnya, yaitu *Barisan Pelopor*, *Barisan Pemuda*, dan *Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi*. Organisasi tersebut bersifat semi militer. Mereka mendapat latihan kemiliteran, meskipun berbeda dengan organisasi kemiliteran sepenuhnya, seperti *Heiho dan Peta*, yang memang disiapkan menjadi tentara untuk tugas tempur dimedan perang.

Pasukan *Heiho* di Jawa Tengah segera diadakan sejak awal berdirinya pemerintah pendudukan Jepang dan adalah lembaga pembantu prajurit Jepang. *Heiho* merupakan hasil penyaringan dari para pemuda di Jawa Tengah. Kebanyakan di antara mereka ditugaskan di luar daerah Jawa Tengah, bahkan di luar Indonesia, sampai di Myanmar, Thailand dan Papua Nugini. Secara pasti jumlah pasukan *Heiho* di Jawa Tengah ini tidak diketahui.

Pasukan *Pembela Tanah Air atau Peta* yang didirikan pada

tanggal 3 September 1943. Pasukan Peta anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan disiapkan guna membela Indonesia dari serangan pasukan Sekutu. Mereka kebanyakan berasal dari putera-putera daerah Jawa Tengah yang menyadari dan terpanggil jiwanya untuk membela tanah airnya. Banyak juga para pejabat pemerintah, Guru Sekolah, dan alim ulama memasuki barisan Peta. Organisasi Pembela Tanah Air itu pusat latihannya di kota Bogor.

Banyak pemuda Jawa Tengah memasuki barisan Pembela Tanah Air, di antaranya dari Magelang, misalnya Raden Muhammad Susman yang semula menjabat patih atau sekretaris daerah Kabupaten Magelang; dan Suryo Sumpeno, yang di kemudian hari di sekitar tahun 1965/1966 menjabat Panglima Kodam VII Diponegoro. Raden Muhammad Susman oleh pemerintah militer Jepang di Jawa Tengah dicalonkan menjadi Komandan Bataliyon, sedangkan Suryo Sumpeno dicalonkan menjabat Komandan Peleton.

Dalam pendidikan Peta di Bogor diberikan pula mata pelajaran dasar-dasar kebangsaan dan kemiliteran. Pada pusat latihan di Bogor juga diadakan klasifikasi bagi para peserta, yaitu klas pertama diarahkan sebagai calon Komandan Batalyon (*Daidanco*), klas ke dua untuk calon Komandan Kompi (*Cudanco*) dan kelas tiga diarahkan bagi calon Komandan Peleton (*Syodanco*).

Pendidikan Peta di Bogor itu dilaksanakan angkatan demi angkatan, artinya pendidikan angkatan pertama selesai barulah disusul dengan angkatan berikutnya. Para pemuda dari daerah Kedu yang pernah mengikuti pendidikan Pasukan Pembela Tanah Air di Bogor antara lain Maryadi, Abdul Kadir, Karyadi, Slamet Suherman, Bambang Sugeng, Sarbini dan Ahmad Yani. Kedua tokoh yang terakhir itu pada tahun-tahun sekitar 1964/1965 memegang peranan penting di tingkat Propinsi Jawa Tengah dan di teras Pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia. Di wilayah Jawa Tengah bagian utara, tokoh Peta dapat disebutkan antara lain Mirza Sidarta yang di tahun tahun 1947/

1948 berdomisili di kota Semarang. Pada zaman pendudukan Jepang di Jawa Tengah Mirza Sidarta aktif di bidang kemiliteran dan dalam pertempuran Lima Hari di Semarang (Oktober 1945) memegang peranan di sektor Semarang – Mranggen. Dari Sidarta banyak diketahui kegiatan pemuda Semarang yang ambil bagian dalam pertempuran lima hari tersebut, terutama dari buku kenangannya yang berjudul *'Mengenang Pertempuran Lima Hari di Semarang'*. Dari daerah Purworejo, pasukan Peta itu sebagian besar dipilih dari tentara *Heiho*, dan juga dari para pemuda serta pejabat pemerintahan. Mereka yang terakhir agakaknya disiapkan untuk menjadi pimpinan. Para calon pasukan Peta dari pelbagai daerah itu, sebelumnya disaring dan diuji sebelum dikirim ke Bogor.

Sesudah pemerintah Jepang di Indonesia mengumumkan pembukaan latihan Pasukan Pembela Tanah Air, maka banyak pemuda mendaftarkan diri dari seluruh Kecamatan. Bagi lingkungan wilayah Kabupaten Purworejo, pemuda-pemuda dikumpulkan di Tangsi Pok- sanga Purworejo, yang juga dijadikan asrama. Kemudian diadakan pemeriksaan badan di Pendopo Kabupaten Purworejo. Sementara itu mereka diijinkan pulang untuk menunggu panggilan bagi yang diterima.

Selanjutnya calon prajurit Pembela Tanah Air yang diterima dipanggil. Proses selanjutnya, pertama-tama kepala mereka digunduli dan dikumpulkan di kelurahan mereka masing-masing. Sebagian besar tidak perlu lagi digunduli, karena pada zaman Jepang hampir semua pemuda sudah gundul. Dari kelurahan merek dikirim ke Kecamatan, seterusnya dikirim dan dikumpulkan di Kawedanan. Kemudian mereka diberangkatkan dari pendopo Kabupaten Purworejo menuju ke tempat pendidikan di tangsi Tuguran, Magelang.

Pada umumnya proses perekrutan calon anggota Peta berlangsung sama di seluruh Jawa Tengah seperti di Kabupaten Purworejo dan Magelang itu.

Dengan melalui pendidikan seperti tersebut di atas para

pemuda mempunyai dasar pengertian disiplin, sifat pemberani, memiliki strategi atau taktik militer, dan kecakapan menggunakan senjata untuk berperang bila saatnya memerlukan. Pada masa awalnya, perekrutan *Seinendan dan Keibodan* di desa desa sering terjadi bersama dengan *Romusha* atau prajurit pekerja untuk bekerja membangun berbagai macam bangunan militer dan lain-lain, seperti membuat jalan, benteng pertahanan, jembatan, lapangan terbang dan lain-lain. Mereka juga ditugasi menyiapkan perbekalan perang, seperti nampak pada kegiatan Kompi IV yang waktu itu dipimpin *Cudanco* Bambang Sugeng.

Cudanco Bambang Sugeng mendapat tugas di daerah Ketawang, Kecamatan Grabag. Lokasi kerjanya berada di bekas gedung Kawedanan, dan bekas Sekolah Ketawang. Pada tempat itu prajurit Peta bersama organisasi lain dan massa rakyat dipaksa membuat benteng pertahanan di sepanjang pantai Ketawang. Tugas tersebut diselesaikan lebih kurang lima bulan lamanya. Kemudian dipindahkan ke daerah Mirit, dalam wilayah Kabupaten Kebumen, sedang Staf Batalyonnya (*Dai Ni Dai Dan*) berlokasi di bekas pabrik Gula Prembun. Kompi-kompinya atau *Cu Dan* tersebar di wilayah untuk membuat kubu-kubu pertahanan. Sesudah proyek pertahanan di daerah Mirit diselesaikan, Bambang Sugeng dipindahkan lagi ke daerah Prembun dan berlokasi digedung Sekolah Dasar Muden, untuk membuat kubu pertahanan di sepanjang jalan ke jurusan Wonosobo.

Menjelang tahun 1945 Kompi yang beroperasi di daerah. Sehari kemudian, diadakan pembukaan atau peresmian penerimaan prajurit tentara Peta angkatan pertama di Magelang. Pada saat itu baru dapat terbentuk dua Batalyon atau *Daidan*.

Dai Ici Daidan berkedudukan di Gombang dan *Dai Ni Daidan* berkedudukan di Magelang dengan nama lengkapnya *Kedu Dai Ni Daidan* atau Batalyon II Kedu, dan sebagai *Daidanco* adalah Muhammad Susman.

Adapun pimpinan pasukan Peta untuk wilayah *Kedu Dai Ni Daidan* adalah sebagai berikut:

Daidanco : Muhammad Susman.
Dai Ici Cudanco: Maryadi
Dai Ni Cudanco: Slamet Suherman.
Dai San Daidanco: Suryo Sumpeno.
Dai Yon Cudanco : Bambang Sugeng.

Pasukan Pembela Tanah Air tersebut adalah yang berada di wilayah Kedu. Kurang lebih setengah tahun kemudian, terbentuk lagi dua batalyon angkatan kedua, sehingga seluruh wilayah Karesidenan Kedu mempunyai empat *Daidan* atau Batalyon.

Dengan melalui proses seperti tersebut diatas di seluruh wilayah Jawa Tengah segera terbentuk Pasukan Pembela Tanah Air, lengkap dengan pemimpin-pemimpinnya. Selanjutnya untuk tingkat desa juga dibentuk organisasi khusus yang sering disebut Keibodan atau pembantu polisi.

Para pemuda di desa pada tiap sore juga dilatih baris berbaris, olah raga dan cara berperang oleh para prajurit Peta atau pun oleh para guru ditarik. *Kedu Dai Ni Daidan* diperintahkan kembali ke Induk Staf Batalyon Prembun, karena Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Tetapi karena berbagai alasan teknis dan usaha penghambatan dari pihak Jepang, maka masyarakat di Jawa Tengah belum mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk prajurit Peta. Pada saat itu anggota-anggota prajurit Peta melihat dan merasakan suatu keganjilan, karena senjata dan perlengkapan yang biasanya mereka panggul, diperintahkan untuk dibersihkan dan dikumpulkan pada Staf Batalyon, sehingga untuk beberapa hari mereka tidak bersenjata lagi. Suasana menggelisahkan para anggota Peta, apalagi setelah terdengar kabar bahwa Daidan atau batalyon dibubarkan. Pada malam hari yang nampak dan terdengar hanya konvoi truk yang kian ke mari membawa senjata dari Prembun ke tangsi lama di Purworejo, tempat pasukan Jepang bermarkas.

Pada bulan Agustus 1945 situasi Batalyon Peta Kedu IV keadaannya menjadi sunyi dan posisinya justru dikepung oleh

pasukan Jepang sendiri yang mengenakan senjata lengkap sambil mengawasi pengangkutan senjata.

Satu-satunya asrama Peta di wilayah Kebumen adalah di Gombang dengan Komandan Batalyon Abdulkadir, dan Komandan Kompi Bambang Sutrisno. Di saat Abdulkadir dipindah ke daerah Banyumas untuk menggantikan Sudirman (kemudian Panglima Besar Sudirman) sebagai *Daidanco* Banyumas, maka *Daidanco* Kebumen dijabat oleh Bambang Sugeng. Sedangkan jabatan Komandan Kompi digantikan oleh Sarbini. Di saat daerah-daerah lain membentuk organisasi kepemudaan, maka organisasi pemuda *Seainendan* di daerah Kebumen di masa penjajahan Jepang dipimpin oleh Wasilan dan Sridarmaji dengan anggota-anggotanya, antara lain Gularso dan Sumarsono. Sedangkan *Keibodan* Kebumen, organisasi yang anggotanya lebih tua dan berusia 26 tahun ke atas, dipimpin oleh Haji Umar Nasir dengan stafnya, Kyai Affandi, Harjo Suparto, Sosrobudono, dan Suroto.

Pada awal bulan Agustus 1945, situasi di Purworejo dan Kebumen nampak agak ganjil. Semua pasukan Peta di Kedu dikumpulkan di halaman asrama *Kedu Dai Ni Daidan* untuk menerima pengumuman dari pimpinan yang isinya, bahwa mulai saat itu seluruh pasukan Peta dibubarkan sebab negara Jepang telah kalah perangnya melawan negara-negara sekutu dan Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh anggota pasukan Peta hendaknya kembali ke daerahnya masing-masing sambil menanti perintah selanjutnya.

Di depan telah diuraikan, bahwa tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Jepang secara formal menggantikan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian untuk dapat menguasai Indonesia dan menarik simpati bangsa Indonesia, maka aturan atau Undang-Undang yang melarang berserikat dan berkumpul seperti tersebut pada Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret 1942 dicabut dan diganti dengan undang-undang nomor 23

yang dikeluarkan tanggal 22 Juli 1942. Adapun yang dilarang hanya perkumpulan yang bersifat politik.

Dalam rangka menarik hati bangsa Indonesia pemerintah Jepang pada bulan Nopember 1942 mendirikan *Panitia Pemeriksa Adat dan Tata Negara*.

Bangsa Indonesia yang berada di Jawa Tengah, juga giat dalam berbagai organisasi, seperti Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, *Jawa Hokokai*, dan *Dewan Pertimbangan Daerah* yang dikenal dengan nama *Cuo Sangi Kai*.

Dilihat dari segi waktunya, pembentukan *Dewan Pertimbangan Daerah* itu sudah tepat, karena para tokoh pemimpin di Jawa Tengah, sudah siap dan bersemangat tinggi untuk perjuangan kemerdekaan.

Para tokoh masyarakat di Jawa Tengah telah mempersiapkan diri untuk duduk dalam pemerintahan. Beberapa tokoh masyarakat Jawa Tengah kemudian aktif dalam lembaga *Cuo Sangikai* dan lembaga pemerintahan lainnya.

Di daerah Kedu Raden Panji Suroso diangkat sebagai *Syucokan* atau Residen Magelang, R.A.A. Sosrodiprojo diangkat sebagai Bupati atau *Kenco*, dan Raden Gondomertosupro-djo diangkat menjadi Walikota Magelang atau *Syico*.

Empat bulan setelah didirikan *Cuo Sangikai*, pemerintah Jepang mendirikan organisasi *Jawa Hokokai* atau *Kebaktian Jawa*, tepatnya pada bulan Desember 1943. *Jawa Hokokai* agaknya meliputi berbagai organisasi semi Militer dan bukan militer. Adapun yang berstatus semi Militer adalah *Seinendan* atau Barisan Pemuda, dan *Keibodan* yang anggotanya telah berusia 26 tahun ke atas dan merupakan barisan pembantu polisi. Kecuali itu masih dikenal *Barisan Pelopor*., *Barisan Pelajar* atau *Gakutotai*.

Kesemua organisasi tersebut dimaksudkan untuk membantu usaha peperangan yang dilakukan Jepang melawan Sekutu. Kecuali itu organisasi-organisasi tersebut dapat dipakai untuk

menjaga dan menjamin keamanan di dalam masyarakat dan jawatan pemerintahan.

Pada saat pasukan Jepang terdesak dari medan perang oleh pasukan sekutu di seluruh lini medan perangnya, pasukan *Heiho* yang tugas pokoknya semula adalah hanya membantu pasukan Jepang, terutama menjaga keamanan, kini juga ditugasi membantu pasukan Jepang di garis depan dan bertempur di medan perang. Tenaga *Romusha* dan rakyat di wilayah Jawa Tengah juga dikerahkan untuk membuat jalan, jembatan rintangan, bangunan, lapangan terbang dan kubu pertahanan di pelbagai daerah Jawa Tengah. Pada akhir tahun 1943 pemerintah Jepang membentuk Pasukan Pembela Tanah Air (Peta) untuk daerah Jawa Tengah yang dipusatkan di Magelang, Purworejo, Kebumen, Purwokerto, Cilacap, Semarang dan kota-kota lain.

Sementara itu dibentuk pula organisasi pemuda yang dikenal dengan nama *Barisan Pelopor atau Shusintai*.

Anggota Barisan Pelopor terdiri dari kader-kader yang tangguh, kuat lahir dan batin, mempunyai disiplin tinggi dan landasan pikiran untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Anggota anggota Barisan Pelopor di wilayah Jawa Tengah bukan saja berasal dari pelbagai aliran politik, tetapi juga berasal dari pelbagai lingkungan agama. Juga di Jawa Tengah kepada anggota Barisan Pelopor ditanamkan paham kebangsaan yang dalam dan jiwa atau semangat berperang, sehingga kalau perlu mereka berani berkorban demi perjuangan kemerdekaan.

Pembentukan organisasi Barisan Pelopor juga terjadi di Magelang. Di daerah ini, pada tanggal 13 Oktober 1944 dibentuk Barisan Pelopor dengan tokoh-tokohnya: Dr. Marjaban, Tartib Prawirodihardjo, Sumadi, Somowarsito, dan lain-lain. Dr. Marjaban pernah mendapat latihan di Sukabumi dan Jakarta dan menerima wejangan dan gembelangan dari pelbagai tokoh bangsa Indonesia, seperti Otto Iskandardinata,

Sukardjo Wiryopranoto, dan lain-lain.

Aktifitas Barisan Pelopor di Magelang ini agak menonjol dan selalu ada hubungan dengan pusat di Jakarta. Barisan Pelopor tersebar ke seluruh daerah Jawa Tengah, hingga ke kelurahan-kelurahan. Ketua Barisan Pelopor tingkat Kabupaten dan Kotamadya disebut *Kentaico*, tingkat Kawedanan disebut *Guntaico*, tingkat Kecamatan disebut *Shotaico*, dan tingkat Kelurahan disebut *Buntaico*. Bagi daerah Kedu, Ketua Barisan Pelopor tingkat Karesidenan adalah Dr. Marjaban, sedang di tingkat Kabupaten Magelang adalah Sumadi, khusus untuk Kotamadya Magelang diketuai oleh Somowarsito. Tokoh-tokoh dan anggota Barisan Pelopor memegang peranan penting pada masa awal Revolusi Kemerdekaan di wilayah Kedu. Mereka merupakan pelaku penting dalam mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Jepang. Peranannya juga besar dalam merebut senjata dari tangan pemerintahan militer Jepang.

Kegiatan yang serupa juga terjadi di wilayah Jawa Tengah yang lain, seperti di Kaliwungu, Kendal, dan Weleri. Pusat kegiatan Barisan Pelopor pada saat itu ada di Weleri, terutama menjelang tahun 1945. Kegiatan itu terpusat di pabrik besi dan gula di Gumuh dan Cepiring. Di daerah kecamatan Gumuh, terdapat gerakan yang militan sifatnya, yang menamakan dirinya *Gerakan Minarai Tinggi*. Gerakan ini terdiri dari pekerja pabrik dan giat membina serta membentuk kelompok pemuda di sekitar kedua pabrik itu. Kelompok pemuda ini sering disebut *Seinendan Istimewa*, yang berlatih keras perihal kemiliteran, berdisiplin tinggi, dan ditempa semangat kebangsaan.

Menjelang datangnya tahun kemerdekaan Gerakan Minarai Tinggi dan Seinendan Istimewa mendapat mitra yang kuat dari gerakan Pasukan Hisbullah di wilayah Kaliwungu –Kendal. Kelompok ulama daerah Kaliwungu – Kendal dipimpin Kyai Haji Masthur turut mengambil bagian dalam menghadapi pemerintahan militer Jepang. Khai Haji Masthur pernah mengikuti latihan Peta di Bogor.

Salah satu di antara tokoh pemuda di daerah Kaliwungu – Kendal ialah Sudiarto, seorang pemuda dari Kaliwungu yang berani menentang pemerintah Jepang. Pada masa Revolusi Kemerdekaan dia gugur, dan namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Semarang.

Menjelang akhir pemerintahan Jepang di Jawa Tengah, kekejaman dan penderitaan bukan hanya dapat dirasakan oleh para pemimpin rakyat, tetapi juga bagi rakyat di desa. Hal itu dapat dilihat pada peristiwa di kecamatan Ampel Gading. Rakyat di daerah Ampel Gading tiba-tiba pada bulan Maret 1945 berontak terhadap camat setempat, karena camat itu dipandang bersikap terlalu keras dalam melakukan tugas pemeriksaan tumpukan padi.

Peristiwa semacam itu juga terjadi di daerah *Cilacap*, yang dilakukan oleh sekelompok prajurit Peta. Pemberontakan mereka memperoleh simpati dari masyarakat agama Islam di Karesidenan Banyumas dengan para ulamanya, diantaranya Kyai Bugel di Lubeng,, Kyai Yukdi di Rawolo, dan Kyai Haji Muhammad Sidik di Banjarnegara. Mereka memberikan nasehat dan wejangan kepada kelompok pejuang Peta di Gumilir Cilacap.

Pasukan Peta di Gumilir terdiri dari Daidan Cilacap yang dipimpin oleh Sutirto, sedang Budanco nya atau pimpinan regu adalah Kusaeri, Hadi, Mardiono, Suryono, B. Wiryosukarto, Taswan, dan Sujud. Pada tanggal 5 April 1945 mereka memutuskan melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Cilacap.

Keputusan itu disertai suatu rencana operasional, bahwa pemberontakannya akan dimulai pada tanggal 21 April 1945, jam 23.00. Tepat seperti yang direncanakan, mereka menyergap dan mengikat tangan para penjaga gudang senjata. Dengan segera gudang senjata dapat dikuasai, dibuka dan dirampas seluruh isinya. Kini pasukan Peta yang memberontak dan berjumlah 15 orang memiliki senjata lengkap dengan segala amunisinya. Kemudian mereka bergerak meninggalkan asrama

Peta di Gumilir dan menuju basis gerakannya di Gunung Srandil Sutirto selaku Daidanco kemudian memanggil mereka yang berontak agar kembali ke kesatuannya, tetapi barisan pemberontak tidak menghiraukan lagi.

Sementara itu pemerintah militer Jepang di Jakarta berpendapat, bahwa pemberontakan itu dipimpin dan digerakkan oleh Sudirman, Daidanco Pembela Tanah Air Kroya. Seorang opsir Jepang dari Jakarta yang diberi tugas mengatasi pemberontakan, guna memadamkannya. Pada saat itu terjadi perdebatan dan ketegangan, sebab opsir Jepang menekan Daidanco Sudirman. Pada akhirnya Daidanco Sudirman bersedia membantu dengan beberapa syarat,

1. Seluruh pasukan Peta yang menyerah tidak boleh disiksa;
2. Seluruh kampung atau desa yang menjadi tempat persembunyian Kusairi dan anak buahnya tidak boleh ditembaki.

Kedua tuntutan dan syarat itu dapat diterima oleh opsir Jepang. Bersama Daidanco Sudirman opsir Jepang itu segera menuju ke daerah yang sedang bergolak.

Di medan persembunyian, Kusairi (pemimpin pemberontak) dan anak buahnya dapat mendengar dan mengerti dengan saksama suara panggilan dan penjelasan Daidanco Sudirman, sehingga akhirnya keluar dari daerah kantong gerilyanya. Mereka mau keluar dari tempat persembunyiannya, semata-mata untuk Sudirman, yang dikemudian hari menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.

Akhirnya pemberontakan ini dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, karena mereka yang berontak itu percaya bahwa mereka tidak akan dihadapkan pada Pengadilan Militer Jepang yang terkenal bengis dan kejam. Ternyata janji fihak tentara Jepang itu tidak ditepati. Peristiwa pemberontakan di Gumilir Cilacap ini dilimpahkan tanggung-jawabnya kepada Daidanco Pembela Tanah Air di Cilacap. Perlu diketahui, bahwa otak dan tokoh pemberontakan Peta Gumilir adalah figur yang tegas dan tangguh. Pada tanggal 25 April 1945, jadi tepat lima hari

lamanya memberontak, ia akhirnya ditangkap oleh pasukan Jepang di desa Adipala. Kusaeri dibawa dengan kendaraan roda empat ke Cilacap dalam posisi ditelungkupkan dan diikat tangannya serta diduduki punggungnya oleh dua orang Jepang. Di Cilacap, Kusaeri diinterogasi secara intensif, disertai penyiksaan yang kejam oleh tentara Jepang selama dua minggu. Dua minggu kemudian, tepatnya tanggal 10 Mei 1945, Kusaeri bersama 18 orang rekannya termasuk Kyai Bugel, dibawa dan diadili oleh Jepang di Jakarta dengan keputusan Kusaeri dijatuhi hukuman mati, sedang yang lain dihukum antara semumur hidup sampai 15 tahun. Selama dalam tahanan, mereka yang berontak disiksa dengan kejam, sehingga ada yang menderita lumpuh.

Pada bulan Mei 1945 kedudukan Jepang di Indonesia sudah benar-benar lemah. Situasi semacam itu menyebabkan keputusan yang telah dijatuhkan kepada Kusaeri dan kawan-kawannya tidak dapat dilaksanakan, sehingga Kusaeri berkat kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa masih sempat dan dapat merasakan hidup di Indonesia yang telah merdeka.

Situasi pada bulan-bulan mendekati jatuhnya penjajahan Jepang, penuh dengan ketegangan, terutama di kota yang strategis, seperti Magelang dan Semarang.

Di Magelang, para pemimpin mulai mengalihkan kegiatannya. Dari kegiatan bekerja sama dengan pemerintah Jepang atau paling sedikit kurang memusuhi pihak Jepang, sekarang beralih pada gerakan rahasia atau ilegal untuk menentang kekuasaan Jepang.

Gerakan di Magelang bukan lagi sekedar memberontak, melainkan telah menyerah untuk mewujudkan kemerdekaan. Kegiatan-giatan ini tidak menggunakan nama tertentu agar tidak diketahui penguasa Jepang, lebih-lebih oleh polisi militer Jepang atau *Kempeitai*.

Beberapa tokoh gerakan di bawah tanah di Magelang dapat dikemukakan, antara lain: Suprodjo, Tartib, Ir. Saksono,

Somowarsito, Sulito, Nirwonoyudo, dan sebagainya. Pada umumnya mereka menyusup ke dalam tubuh pemerintahan, misalnya menjadi pegawai jawatan pemerintah dan perusahaan, dengan maksud untuk memudahkan Bergeraknya.

Di antaranya pejuang itu ada yang mengambil cara mendirikan kedai makan yang sering digunakan untuk menyelenggarakan rapat dan pertemuan rahasia melawan pemerintah pendudukan Jepang. Para pemimpin gerakan mengadakan hubungan dengan pemuda-pemuda yang menjadi prajurit Peta, seperti Muhammad Susman dan anak buahnya.

Di kota Semarang, menjelang akhir pendudukan Jepang keadaannya hampir sama, yaitu pemerintah Jepang berusaha untuk menggerakkan pemuda agar ikut aktif menyelenggarakan persiapan kemerdekaan Indonesia menurut konsepsi Jepang. Rupanya pihak Jepang telah melihat tanda-tanda akan adanya reaksi di kalangan pemuda. Jepang menghendaki agar pemuda-pemuda di Semarang dapat menerima rencananya, ialah janji akan kemerdekaan di hari yang akan datang setelah Jepang mengalahkan Sekutu. Konsepsi kemerdekaan Jepang itu mengharapkan agar pemuda Semarang lebih aktif lagi membantu tentara Jepang dalam melawan Sekutu.

Ketika itu di Semarang sering diadakan pendekatan di antara Jepang dengan para pemuda, atau pertemuan orientasi antara pemerintah Jepang dengan para pemuda, yang diselenggarakan oleh pemerintah pendudukan. Sebaliknya para pemuda di Semarang menghendaki agar kemerdekaan segera berada di tangan bangsa Indonesia dan kemudian akan membantu tentara Jepang melawan pasukan Sekutu. Dengan keterangan ini tampak betapa besar jurang pemisah antara para pemuda dengan pihak Jepang di Semarang, karena intinya bukan hanya ada perbedaan pendapat, tetapi terdapat bertentangan prinsip antara keduanya.

Pada saat timbul pertentangan yang sukar dicari pemecahannya itu, pemerintah Jepang lalu mencari jalan keluar dengan

mengadakan *Kongres Angkatan Muda* di kota Bandung. Hal itu dilakukan, karena situasi seperti yang terjadi di kota Semarang juga terjadi di kota-kota lainnya di seluruh Jawa. Melalui Kongres Angkatan Muda di Bandung, pemerintah Jepang mengharapkan keaktifan kelompok ini untuk membantu Jepang melawan Pasukan Sekutu dengan melontarkan janji kemerdekaan di kemudian hari. Di dalam kongres di Bandung itu, utusan pemuda dari kota Semarang, juga seperti tusan dari daerah-daerah lain, menghendaki kemerdekaan segera di tangan bangsa Indonesia, setelah itu baru Angkatan Muda akan membantu melawan Sekutu. Nampak, bahwa kelompok Angkatan Muda Semarang mempunyai persamaan semangat dengan rekan angkatannya di kota lain, yaitu memperoleh kemerdekaan dahulu.

Bagi Angkatan Muda pertemuan di Bandung itu justru menunjukkan, bahwa kedudukan pasukan Jepang di medan perang dan di Indonesia sendiri sudah melemah. Kini kedudukan pasukan Jepang di Jawa, juga di Semarang, bukan menjadi bertambah kuat, malahan menjadi makin lemah. Para utusan pemuda Semarang dan dari daerah-daerah lain di Jawa, dengan tepat sekali mempergunakan pertemuan di Bandung itu sebagai wahana untuk mempersiapkan diri di daerah masing-masing untuk tugas menyongsong kemerdekaan. Gerakan tersebut berasaskan mencapai kemerdekaan dengan usaha dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Kongres Angkatan Muda di Bandung yang dimaksudkan Jepang untuk memperkuat kedudukannya dengan cara mendekati dan meminta para pemuda agar membantunya malahan berubah menjadi forum bagi para pemuda Indonesia untuk mempersiapkan perjuangan kemerdekaan.

Kongres di Bandung mempunyai arti dan nilai yang besar bagi pergerakan pemuda pada masa itu. Sekembali dari Kongres, mereka mendapatkan semangat baru guna menghadapi masalah berat di daerahnya masing-masing. Pokok persoalan-

nya ialah bagaimana melaksanakan persiapan kemerdekaan di saat bala tentara Jepang masih berkuasa. Di waktu semacam ini, para pemuda bukan hanya dituntut bersikap hati-hati melainkan juga harus bertindak secara illegal dalam menyusun taktik perjuangan. Seperti halnya yang terjadi di kota Semarang, pemuda-pemuda menyusun taktik perjuangan secara illegal.

Dalam keadaan seperti itu, di mana para pemuda Semarang bergerak menentang pemerintah pendudukan Jepang secara illegal dan di pihak lain pemerintah Jepang berupaya menggunakan tenaga para pemuda untuk melawan Sekutu, terbetik berita, bahwa pada tanggal 14 Agustus 1945 Kerajaan Jepang di Tokio telah menyerah kepada Sekutu. Balatentara Jepang di Jawa Tengah mula-mula berusaha merahasiakan berita kekalahan negerinya itu. Dan memang hanya sebagian kecil masyarakat bahkan hanya perorangan yang amat terbatas yang mengetahuinya. Namun berita kemenangan Sekutu tersebut segera disebarkan oleh sementara tokoh pergerakan kemerdekaan ke pelbagai wilayah dengan sangat rahasia. Secara pasti berita besar itu diterima dengan senang oleh para pemuda yang bergerak di bawah tanah. Sekarang perjuangan di daerah Semarang dan sekitarnya menjadi lebih hebat dan nampak sekali adanya langkah-langkah mengkonsolidasi kekuatan. Di saat itu Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan penjajahan, sebab Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan Sekutu sendiri belum datang di Indonesia. Para pemuda Semarang segera mengumpulkan rekan-rekan seperjuangan guna menganalisis situasi yang rawan itu. Para pemuda saat itu dapat mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti ideologi, sehingga pikiran dan tenaga tetap utuh dan bersatu dalam rangka persiapan merebut kekuasaan dari pemerintah Jepang di Semarang.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari, datang utusan dari Pergerakan Pemuda Jakarta untuk menyampaikan gambaran situasi umum di kawasan Asia, khususnya mengenai berita kemenangan Sekutu atas Jepang. Hal lain yang disampaikan

ialah informasi kegiatan pemuda di Jakarta yang telah mempersiapkan perjuangannya menyongsong kemerdekaan. Di samping itu informasi juga disampaikan kepada para pemuda Semarang akan kehendak agar Bung Karno memutuskan hubungan dengan pihak Jepang, terutama mengenai janji memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada intinya utusan pemuda dari Jakarta mengajak para pejuang kemerdekaan di Semarang, khususnya para pemuda, untuk mempersiapkan aktivitas dalam bentuk perjuangan selaras dengan kegiatan dan bentuk perjuangan para pemuda di Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 di salah satu ruangan Rumah Sakit Dr. Kariadi yang masa itu dikenal dengan nama P U R U S A R A (Pusat Rumah Sakit Rakyat) atau C B Z (Central Burgerlijke Ziekenhuis), diselenggarakan pertemuan antara para pemuda dengan tokoh-tokoh pejuang terkemuka untuk mengamati dan membahas situasi pada waktu itu dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk kepentingan kemerdekaan nusa dan bangsa.

Pada pertemuan itu, *Angkatan Muda Semarang* yang diwakili oleh Ibnu Parna dan S. Karna sebagai juru bicara, mengemukakan akan pentingnya segera dinyatakan kemerdekaan di Semarang yang berstatus sebagai ibu kota daerah Jawa Tengah. Jadi pernyataan kemerdekaan itu dimaksudkan untuk menggantikan kekuasaan Jepang di Jawa Tengah dengan kekuasaan bangsa Indonesia. Dalam pertemuan itu kelompok orang tua agak khawatir tentang kekuatan tentara Jepang yang masih lengkap persenjataannya, lagi pula risikonya akan besar sekali. Sebaliknya kelompok pemuda, terutama dari *Angkatan Mudanya*, dimana semangat kemerdekaannya amat tebal memenuhi ruangan pertemuan tersebut. Boleh dikatakan semangat para pemuda untuk menggantikan kekuasaan Jepang di Semarang tidak dapat dihalangi lagi.

Akhirnya pada hari itu pula, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, dibentuk *Angkatan Muda Semarang*, kemudian menjadi

Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI),. Pembentukan angkatan tersebut terjadi di Gendong No. 124 milik S. Karna. Di tempat ini pula dilakukan persiapan guna merebut kekuasaan Jepang untuk mewujudkan kemerdekaan di Semarang. Para pemuda lalu dipersiapkan untuk mengatur strategi dan melaksanakan rencana programnya, meskipun pada saat itu markasnya masih dirahasiakan karena khawatir disergap oleh polisi rahasia Jepang.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Proklamasi Kemerdekaan diumumkan, di Semarang lalu diadakan peresmian pembukaan Markas Angkatan Muda Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Karangtempel, di rumah Taman Siswa, milik Hadisunarto. Dengan demikian pindahlah markas Angkatan Muda Republik Indonesia yang dahulu di rumah S. Karna ke rumah Jl. Karangtempel. Di markas yang baru ini kesibukan Angkatan Muda menjadi bertambah karena pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka akan mengadakan gerakan massal untuk menerangkan dan menginsafkan rakyat Semarang akan apa yang telah terjadi di Jakarta dan apa yang akan dilaksanakan oleh mereka sehubungan dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta selaku wakil bangsa Indonesia.

Rapat-rapat umum diadakan di gedung bioskop Grand, beberapa kali di Jl. Karangturi dan pernah digrebeg oleh pasukan Jepang. Masyarakat Semarang segera menyambut kemerdekaan dengan meluap-luap. Bendera Sang Merah Putih dikibarkan siang dan malam di tiap rumah penduduk. Tiap orang mengenakan lencana merah putih dan pekik perjuangan "Merdeka" bergema di mana-mana.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEGIATAN MASYARAKAT DI DAERAH PADA AWAL REVOLUSI KEMERDEKAAN.

Kehidupan masyarakat di masa pendudukan Jepang semakin hari semakin terasa sulit, terutama di bidang perekonomian. Bahan sandang pangan sukar diperoleh. Sekalipun ada tidak mungkin terbeli oleh sebagian besar rakyat. Banyak rakyat yang menderita kelaparan dan tidak sedikit yang mati kelaparan. Sebagian produksi bahan pangan para petani diwajibkan untuk disetor ke pemerintah Jepang dan tidak jarang pula Jepang menggunakan cara paksa merampas harta benda, perhiasan dengan dalih untuk membiayai perang.

Di daerah-daerah terutama, di daerah-daerah minus banyak penduduk yang menderita busung lapar (*hongerodeem*). Di mana-mana sering dijumpai pemandangan yang memilukan, banyak penderita busung lapar dan banyak pula yang menggunakan pakaian terbuat dari karung goni atau karet (*sheet*) yang menyebabkan penyakit kulit.

Penindasan Jepang semakin lama semakin terasa, menyebabkan bertambah bergelornya semangat rakyat untuk menentang penindasan Jepang. Perlawanan rakyat secara kecil-kecilan mu-

lai muncul di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak senang lagi terhadap pemerintah Jepang.

Sementara itu keadaan Perang Pasifik yang semakin hari semakin melemahkan pertahanan Jepang, memaksa pemerintah Jepang mengubah sikapnya terhadap rakyat Indonesia. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat setempat untuk menahan kemungkinan datangnya serangan tentara Sekutu, di mana seluruh tenaga dan bahan-bahan yang ada dikerahkan untuk kepentingan perang. Namun Jepang tidak mampu lagi menahan serangan-serangan Sekutu. Kota-kota Ambon, Makasar, Manado dan Surabaya terancam oleh serangan Sekutu, bahkan tentara Sekutu telah mendarat di Balikpapan.

Pesawat-pesawat tempur Sekutu terbang melayang layang di atas pantai utara Jawa Tengah, bahkan sempat menjatuhkan bom-bom poket di kota-kota pelabuhan. Kapal-kapal perang Sekutu sudah berada di pantai Jawa Tengah. Pesawat B. 29 Sekutu terbang di atas pelabuhan Semarang melakukan serangan udara. Kota Semarang sudah dijatuhi bom dan instalasi di pelabuhan terbakar, di antaranya tangki-tangki bahan bakar di dekat setasiun Tawang. Pada keesokan harinya masyarakat disuruh *kinrohosi* (kerja bakti) termasuk pelajar Sekolah Menengah di bekas reruntuhan. Gudang milik *Djawa Unko Kaisha* (Jawatan Pelayaran Jepang) yang penuh bahan pokok juga hancur terkena bom. Dari kapal-kapal kayu di pelabuhan memang terdengar tembakan penangkis pesawat terbang, tetapi pasukan Jepang praktis tidak berbuat apa-apa. Sesudah itu penarikan pasukan Jepang ke markas induk tampak sibuk sekali. Ternyata Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu tanggal 14 Agustus 1945.

Sementara itu Peta dibubarkan (15 Agustus 1945). Sekalipun demikian mereka masih merupakan kelompok yang siap menghimpun diri dan siap mengkonsolidasi diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan mendatang.

Tanggal 17 - 8 - 1945 proklamasi kemerdekaan R.I.

Berita proklamasi baru diterima di daerah-daerah melalui radio-radio.

1. Berita Proklamasi Kemerdekaan di Daerah Semarang.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jum'at legi jam 10.00 (tepat). Berita Proklamasi mula-mula dikumandangkan melalui Kantor Berita Domei Jakarta.

Berita ini langsung diterima oleh seorang markonis Sugiarin Kantor Berita Domei di Semarang, kemudian dibawa dan diserahkan oleh Syarif Sulaiman dan M.S. Mintardjo ke Gedung *Jawa Hokokai*. Saat itu di Gedung *Jawa Hokokai* sedang diadakan rapat Komite Persiapan Indonesia Merdeka di bawah pimpinan Mr. Wongsonegoro selaku *Fuku Syucokan* (Asisten Residen) di Semarang.

Mr. Wongsonegoro menerima pers-copy berita Proklamasi itu, kemudian membacakannya sampai dua kali di hadapan sidang. Para hadirin yang mendengarkannya bertepuk tangan penuh kegembiraan. Kemudian sidang berhenti sebentar lalu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menyebarkan "Hidup Bung Karno, Hidup Bung Hatta" dan Hidup Bangsa Indonesia. "Kemudian sidang dibubarkan.

Sementara itu berita proklamasi kemerdekaan pada siang hari itu juga disiarkan lewat *Semarang Hosokyo* (siaran radio) dengan tidak melalui ijin dari Kepala Studio Semarang. Pembacaan berita proklamasi melalui siaran radio ini mendahului acara siaran sembahyang Jum'at, sehingga didengar oleh orang banyak. Demikian pula para jemaah yang bersembahyang di mesjid segera mengetahui berita Proklamasi Kemerdekaan itu. Siaran ini didengar juga oleh pejabat Jepang yang menjadi kepala Studio Semarang, yang segera memerintahkan agar acara siaran sembahyang Jum'at dihentikan dan pegawai pegawainya dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Acara siaran khotbah selesai dibacakan, tetapi siaran sembahyang yang tengah berlangsung itu segera diputuskan. Hal ini

menimbulkan tanda tanya di kalangan pendengar, namun berita itu sempat didengar oleh masyarakat. Melalui pers berita Proklamasi Kemerdekaan disiarkan oleh surat kabar "Sinar Baru" dan surat-surat edaran atau buletin khusus. (39, h. 17 – 27).

Sudah tentu keberanian para pemuda yang bekerja di Kantor Berita Domei ini tidak menyenangkan penguasa Bala Tentara Jepang. Badan sensor militer Jepang telah melarang berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan.

Bagi kebanyakan pegawai Harian "Sinar Baru" masa itu penuh kesibukan. Sehubungan dengan langkah pemindahan kekuasaan di kota Semarang, sedianya akan diadakan rapat raksasa pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan pembicara utama Mr. Wongsonegoro, tetapi penguasa Jepang tidak mengizinkan sehingga rapat terpaksa diundur pada tanggal 19 Agustus 1945 jam 16.00.

Ternyata hari itu telah berkumandang Maklumat I lewat corong radio yang berisi pernyataan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke tangan rakyat Indonesia, dengan pernyataan yang berbunyi sebagai berikut: "Berdasarkan atas pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang.

- a. Mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 1 siang pemerintahan Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku.
- b. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia akan diambil tindakan keras.
- c. Semua senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya, harus diserahkan polisi.
- d. Hanya Bendera Indonesia Sang Merah Putih boleh berkibar.
- e. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras.
- f. Selanjutnya semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti biasa.

(Semarang, 19 Agustus 1945, Kepala Pemerintahan R.I. Daerah Semarang, Wongsonegoro (11, h.22).

Pada tanggal 19 Agustus 1945 sore hari diadakan rapat Raksasa untuk menguatkan kembali pengumuman pemindahan kekuasaan ke tangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Mr. Wongsonegoro. Barisan rakyat menghadiri rapat dengan membawa bendera Sang Merah Putih, suasana gembira dan penuh semangat tampak pada wajah mereka seraya meneriakkan pekik perjuangan "Hidup bangsa Indonesia dan " Merdeka". Barisan itu kemudian berjalan mengadakan pawai melewati Jln. Pandamaran, Karangteri, Purwodinatan, Daerah sekitar Pasar Johar, Alun-alun, Jl. Bojong dan ingin terus ke gedung Kempetai. Tetapi di perapatan Jln. Duwet – Gendingan sudah diblokir pasukan Jepang, sehingga dibelokkan ke Jln. Duwet.

Semua penduduk mengibarkan bendera Merah Putih. Pada tiap wilayah *Tonarigumi* (R.T) dibentuk barisan pemuda, yang berasal dari anggota *Keibodan*, *Seinendan*, pelajar dan pemuda lainnya. Barikade dipasang di beberapa penjuru untuk memudahkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai dan terutama mereka yang dianggap musuh. Perasaan curiga dan kekhawatiran terhadap mereka yang ingin mengembalikan kekuasaan penjajah, baik dari Jepang ataupun Belanda membuat orang Indonesia berhati-hati dan menganggap mereka sebagai musuh negara. Lebih-lebih setelah terdengar, bahwa semua orang Belanda termasuk golongan Indo. (peranakan) yang ditawan Jepang di Bandung telah dibebaskan. Mereka yang kembali ke Semarang terpaksa ditawan kembali oleh pemuda. Semua pemuda di daerah sudah siap dan waspada terhadap kemungkinan serangan ataupun sabotase musuh.

Kebutuhan akan informasi amat besar, karena pada tahun 1945 tidak banyak orang memiliki pesawat radio. Televisi belum dikenal. Lagi pula persuratkabaran dan siaran radio masih harus berjuang untuk membebaskan diri dari pengawasan pihak Jepang. Karena itu, para pemuda giat memberi penerangan dengan cara menempelkan surat selebaran dan guntingan surat

kabar dari luar kota yang ditempelkan di papan pengumuman. Ucapan reaksioner dari sementara mantan penguasa Belanda yang sudah keluar dan tawanan seperti ex Residen Surabaya, Tacoma mendapat sanggahan keras dari para pemuda. Berita bersemangat kemerdekaan memenuhi papan pengumuman yang dipelihara dan dijalankan oleh pemuda pelajar dilingkungan.

Tiap malam diadakan penjagaan siskamling dan dapur umum yang menyediakan minuman dan makanan ala kadarnya bermunculan di mana-mana. Jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 mengejowantah dalam bentuk solidaritas dan kesatuan di antara penduduk lingkungan.

Pada bulan-bulan awal sesudah Proklamasi Kemerdekaan suasana penuh gejolak. Sebentar-sebentar terdengar aba-aba "Siaap" untuk berjaga-jaga terhadap lawan-lawan kemerdekaan Indonesia yang berusaha menghancurkan Republik Indonesia. Sementara itu barisan pemuda makin terkonsolidasi. Angkatan Muda Republik Indonesia di Semarang Barat misalnya, sudah makin kuat. Pemuda-pemuda pelajar mendapat latihan dasar kemiliteran secara kilat dipimpin oleh pemuda-pemuda yang pernah mendapat latihan kemiliteran, dan juga dari para anggota Kepolisian.

Pemuda-pemuda menempati gedung bekas kediaman perwira Jepang sebagai markasnya, misalnya di jalan Karangtengah dan Pendrikan (Jln. Imam Bonjol) dengan induknya di Gedong Jero. Peralatan dan persenjataan makin diperkuat sehingga merupakan barisan pemuda yang tangguh.

Para pemuda juga melakukan aksi corat-coret pada tembok tembok bangunan di kota dengan slogan-slogan berjiwa semangat kemerdekaan.

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia cepat tersiar ke daerah-daerah. Semua lapisan menyambutnya dengan

penuh gembira dan semangat perjuangan.

Mulai hari Sabtu tanggal 19 Agustus 1945 (1945) jam 13.00 di daerah Semarang telah berdiri Pemerintah Daerah Republik Indonesia dan tiada lagi pemerintahan pendudukan tentara Jepang. Tanggal 28 Agustus 1945 malam di gedung *Djawa Hokokai* dilangsungkan rapat pembentukan Komite Nasional di daerah Karesidenan Semarang yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan RI di daerah Semarang. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dengan suara bulat Mr. Wongsonegoro diangkat sebagai Ketua. Kemudian untuk daerah Kotapraja Semarang diangkat Mr. Koentjoro sebagai Ketua dan Dr. Soedjono Djoened Poesonegoro dan Bambang Suprpto sebagai Ketua Muda (39. h. 35).

Sementara itu untuk melengkapi aparaturnya pemerintahan telah dibentuk *Badan Keamanan Rakyat* yang bertugas antara lain memelihara keamanan bersama sama dengan rakyat dan Jawatan-jawatan Negeri yang bersangkutan.

BKR untuk daerah Semarang dipimpin oleh bekas *Daidanco* Sutrisno Sudomo dan Tarunokusumo dan pembantu Hendropranoto, yang menjadi pimpinan pusat untuk daerah kota Semarang.

Anggota BKR terdiri dari pemuda Indonesia bekas Peta, *Heiho*, *Keibodan*, *Seinendan*, KNIL dan lainnya yang berminat bergabung pada BKR. Kemudian tanggal 23 September 1945 terbentuk BKR LAUT di Semarang dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Komandan	:	Sumarno
Wakil Komandan	:	M. Nazir.
Bagian Perkapalan	:	O.B. Sjaaf, B. Djatmiko, Legowo dan Marsis.
Bagian Keamanan	:	Daruno dan Achmad Dipo

Koordinator : Agus Subekti dan Widagdo.

Anggota-anggota K.N.I. untuk Karesidenan Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mr. Wongsonegoro; Dr. Darmasetiawan.
2. Mr. Soejoedi; Winarno Danoeatmodjo.
6. Mr. Iman Soedjahri; Soewardjo.
7. Soewondo; Sinaga.
8. Moh Sunarman; Kridoharsoyo.
9. Soewandi; Brahim.
10. Slamet Hardjodipoero; Soeparno Kridoharsojo.
11. Nyonya Mr. Hadinoto; Ny. Ngandari.
12. Ny. Poedjotomo; Ny. Soenarman.
13. Roos Poerwokoeosoemo; Dr. Gaffar.
14. S. Soekarno; Soeprapto.
15. Soetrisno Soedomo; Abdulkadir.
16. Mardjono; O. Poedjotomo.
17. Soegiono; S. Krarno.
18. H. Chambali; Abdullah.
19. Patah.

Komandan Pasukan : Oemar Said, Supardi dan Saleh Sastramidjaja (39, h. 35).

BKR dibentuk di daerah daerah mulai daerah Karesidenan, Kabupaten, Kotapraja, Kawedanan, Kecamatan, dan Desa sampai ke daerah Rukun Tetangga. Di tiap jawatan atau instansi pemerintah juga dibentuk BKR. Dalam hal tersebut BKR Jawatan Telepon dan BKR Kereta api mengambil peranan penting dalam pengiriman berita berita penting. Di samping KNI dan BKR juga dibentuk *Fonds Kemerdekaan*, yaitu suatu lembaga bersifat nasional dan bertugas untuk menghimpun dana bagi kepentingan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan lembaga ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

1. Sikap Pasukan Jepang

Kira kira pada awal bulan Agustus 45 Jepang sudah mulai merencanakan persiapan gerilya di seluruh Indonesia terutama Jawa. (Adam Malik, 1978, hal. 44). Brosur taktik perang gerilya sudah dicetak dan disebar ke mana-mana. Mereka mengumpulkan pemimpin-pemimpin yang dianggap mempunyai pengikut di kalangan rakyat. Para pemimpin rakyat yang dipenjarakan segera dibebaskan dan dipanggil untuk turut merencanakan perang gerilya. Mereka membentuk barisan pengempur berani mati (*Jibakutai*) untuk menghalau serangan atau pendaratan Sekutu bila waktunya telah tiba. Dengan demikian hubungan antara rakyat dan penguasa Jepang menjadi lebih rapat.

Tampaknya para pemimpin dapat menerima rencana Jepang, tetapi di dalamnya tersembunyi semangat dan perasaan tidak senang. Keadaan menjadi berbalik setelah para pemimpin daerah menerima berita Proklamasi Kemerdekaan RI Rakyat tidak lagi mempedulikan kekuasaan Jepang. Larangan, ancaman, ataupun janji Jepang tidak lagi diperhatikan.

Pada saat berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berkumandang di seluruh pelosok Indonesia, Penguasa Jepang boleh dikatakan tidak bertindak apa apa. Barangkali keadaan ini disebabkan banyak di antara mereka menjadi bingung setelah mendengar berita kekalahan dan menyerah kerajaan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu. Sedangkan yang paling giat beroperasi karena anggota *Kempeitai* (Polisi Rahasia). Mereka selalu mengawasi barisan pemuda dan memunguti pamflet-pamflet yang disebar para pemuda. Tetapi bagaimana pun giatnya polisi Jepang untuk menghalang-halangi perjuangan pemuda, namun semangat Proklamasi Kemerdekaan berkobar terus dan bertambah luas daerah persebarannya. Pekik "Merdeka" dan komando "Siap" terdengar di mana-mana. Rakyat telah bersiap siap mempersenjatai diri Mereka sadar, bahwa Prokla-

masi kemerdekaan menuntut perjuangan yang hebat dan dahsyat.

Melihat keadaan seperti ini para pemimpin Jepang, berusaha untuk menghalang-halangi Proklamasi yang sudah meletus itu. Mereka melakukan perintah menyetop penyebaran proklamasi tersebut. (Adam Malik, hal. 49). Mereka menyadari harus menyerahkan Indonesia kepada sekutu dalam keadaan sebelum Perang Pasifik (1942) Penguasa Jepang khawatir kalau kalau gerakan rakyat yang penuh semangat itu juga akan menghantam pasukan Jepang. Di daerah daerah yang dipandang strategis diadakan penjagaan kuat Pasukan dan persenjataan berat dikerahkan. Melalui *Domei* dan siaran radio Jepang berusaha mengaburkan berita Proklamasi Kemerdekaan.

Perintah Umum (No. 1) kepada semua Angkatan Perang Jepang dikeluarkan Markas Besar Umum Kerajaan Jepang, berisi pengumuman agar menjaga ketenteraman dan menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Angkatan Perang Sekutu. (39, h. 247).

Menghadapi tantangan Jepang ini sikap pemuda Indonesia tetap bulat, tetap tangguh, dan tetap tidak mau mundur setapak pun.

Supaya persatuan antara mereka itu kokoh, perlu adanya satu program, yaitu :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945, dan Rakyat telah merdeka, bebas dari Pemerintah Asing.
- b. Semua kekuasaan harus di tangan Negara dan Bangsa Indonesia.
- c. Jepang sudah kalah dan tidak ada hak untuk menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
- d. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.
- e. Segala perusahaan (kantor, pabrik, tambang, kebon dan

lain-lain) harus direbut dan dikuasai oleh Rakyat Indonesia dari tangan Jepang. (Adam Malik, hal. 67).

Program itu disebarluaskan melalui surat sebaran "*Suara Rakyat*" dan siaran kilat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah ke seluruh Indonesia (Surat sebaran "*Suara Rakyat* No. 1").

Perebutan kekuasaan atau pengambil-alihan kekuasaan terjadi dengan pesatnya tanpa memperhatikan penjagaan ketat oleh pasukan pasukan Jepang. Mereka walaupun sudah takluk kepada Sekutu, tidak mau menyerahkan kekuasaan yang masih ada di tangannya kepada Republik Indonesia. Di kalangan pemuda lalu diadakan kesatuan aksi antara berbagai Angkatan Muda yang melahirkan *Angkatan Muda Republik Indonesia*, disingkat AMRI. Pamflet pamflet disebarluaskan. Isinya mengenai anjuran agar Angkatan Muda mengambil tindakan tegas dan berani mengambil alih kekuasaan, selanjutnya menyelamatkan semua barang milik RI yang masih dikuasai Jepang.

Dalam waktu yang singkat para pemuda mengambil alih kantor, jawatan dan perusahaan yang dikuasai Jepang. Coret coret banyak dituliskan pada gedung instansi dan barang vital dengan kata "Milik R.I". Dalam aksi pengambil alihan kekuasaan di Jawatan, kantor dan perusahaan telah berjasa sekelompok besar pemuda yang tergabung dalam Barisan Serobot. (39, h. 94).

Gerakan Angkatan Muda berlanjut sampai pada perampasan senjata Jepang. Gedung Taman Siswa yang terletak di jalan Dr. Cipto (sekarang Hotel Samudra) dijadikan markas besar. Angkatan Muda" kemudian dipindahkan ke Jalan Mataram di Gedung Nonko Gekicho. Pada tanggal 23 Agustus 1945 gedung ini diserbu oleh pasukan Jepang. (54, h. 2).

Perintah Umum (No. 1) seperti tersebut di depan itu dikeluarkan oleh Jendral Mac Arthur, selaku Panglima Tertinggi Tentara Sekutu di medan Perang Pasifik. Di dalam Pemerintah

Umum itu dinyatakan, bahwa pasukan Jepang harus menyerahkan segala perlengkapan perang kepada perwira Sekutu yang ditunjuk, dan bahwa mereka harus bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban wilayah yang didudukinya, sampai tanggung-jawab demikian diambil alih oleh Sekutu. (39, h. 111).

Pasukan Jepang ke-16 yang berkedudukan di Jawa menerima perintah itu, sedangkan mereka juga menghadapi kenyataan, bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya.

Markas besar pasukan Jepang di Jawa Tengah berada di Magelang dipimpin oleh Mayor Jendral Nakamura. Tanggung jawab militer atas kota Semarang berada di tangan Mayor Kido dari Batalyon Kido (*kido Butai*) yang bermarkas di Jatingaleh. Batalyon lainnya berada di Purwokerto, dipimpin Mayor Yuda.

Untuk melaksanakan "*General Order Number 1*", Mayor Kido memperkuat penjagaan dan memperkuat penjagaan kota dan mempersiapkan tempat penampungan dan perbekalannya bagi orang Jepang yang akan diserahkan kepada Sekutu, yaitu di Sumowono, Bandungan, dan Ambarawa bagi para bekas prajurit Jepang, dan Weleri bagi orang Jepang lainnya. Kota Semarang dijadikan pusat penampungan pasukan Jepang yang akan diserahkan kepada tentara Sekutu, karena itu perlu adanya persediaan perbekalan yang cukup untuk menampung kurang lebih 3.000 orang.

Sementara itu datang pasukan Jepang dari Irian di bawah pimpinan Mayor Jogi. Mereka merupakan pasukan tempur yang berpengalaman. Jepang mengalami kesulitan untuk mengatur semua ini, karena di semua tempat telah diduduki dan dijaga keras oleh para pemuda, bahkan gerak gerik pasukan Jepang selalu dicurigai dan diawasi terus oleh para pemuda dan mendapat rintangan sehingga kemungkinan dapat terjadi perang.

Pada tanggal 25 September 1945 Markas Besar Tentara Jepang mengeluarkan perintah yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

- a. Demonstrasi dalam bentuk apa pun harus dicegah, tetapi untuk ini tidak dibenarkan menggunakan senjata.
- b. Gudang gudang senjata harus dijaga dengan baik.
- c. Stop semua pencurian senjata.
- d. Harai dijaga jangan sampai menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia.
- e. Para perwira dilarang berjalan sendirian.
- f. Semua pasukan disiapkan untuk sewaktu waktu diberangkatkan. (39, h. 113).

Sementara itu Mayor Jenderal Nakamura Komandan pasukan Jepang di Jawa Tengah yang berkedudukan di Magelang mengeluarkan larangan mengibarkan bendera Merah Putih. Dalam perintah itu ditandaskan, bahwa arak-arakan dan demonstrasi dilarang, dan jalan jalan harus aman. Sudah tentu larangan ini menimbulkan amarah penduduk. Para pemuda pejuang segera bersiap siap di jalan jalan dipasangi barikade. Suasana menjadi panas dengan adanya berita, bahwa di Ambarawa para bekas interniran Belanda mendapat dropping senjata dari udara. Hubungan telpun antara Ambarawa dan Semarang segera diputus. Lapangan Kalibanteng segera diduduki pemuda pejuang dan Letnan Kusumoto beserta 40 pasukannya ditawan.

Dalam suasana panas itu Batalyon Kido mengkonsinyir pasukan dan siap tempur. Perintah dikeluarkan kepada orang Jepang yang berada di kantor kantor dan di rumah untuk segera menggabungkan diri.

2. Hambatan-hambatan

Berkat keberanian dan semangat dari beberapa pemuda di kantor Berita Domei, Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan berhasil dikumandangkan ke angkasa. Di Semarang, setelah diterima oleh markonis Sugiadin dari kantor Berita Domei, berita tersebut segera disampaikan oleh Arief Sulaiman ke pada Mr. Wongsonegoro selaku *Fuku Syuucookan* (Wk. residen) di Semarang yang ada waktu itu sedang memimpin rapat Komite Persiapan

sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat. Baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro (adik Sri Sultan).”

Demikianlah pertemuan singkat yang terjadi antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan kelompok pemuda di bangsal Kepatihan pada tanggal 19 Agustus 1945 jam 10.00 pagi.

Dalam pada itu sebagaimana termuat dalam harian *Sinar Matahari* yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX berkenan pula memberikan kata sambutan atas peringatan Kemerdekaan Indonesia itu yang antara lain berisi sebagai berikut:⁸⁾

”Sekarang kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam, nasib Nusa dan Bangsa adalah di tangan kita pula, tergantung kepada kita sendiri.

Kita harus menginsyafi, bahwa lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua, tiada kecualinya harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing, untuk kepentingan kita bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela Kemerdekaan Nusa dan Bangsa.

Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan paham. Tiap-tiap golongan harus sanggup menyampaikan kepentingannya sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk memperjuangkan Kemerdekaannya, buat menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap angkatan-angkatan Bangsa Indonesia yang akan datang dan membikin sejarah yang gemilang.”

Sebagian sangat kecil dari bangsa kita yang karena keterkaitannya yang sangat besar di masa penjajahan Belanda dengan kaum penjajah, juga menunjukkan sikap yang dapat merugikan perjuangan kemerdekaan, di antaranya dengan membantu kaum bekas penjajah Belanda terhadap hambatan serupa itu, bangsa Indonesia dipelopori oleh para pemuda bertindak tegas.

Sementara itu dari kalangan bangsa sendiri, terdapat juga keadaan atau gejala yang dapat dikategorikan sebagai hambatan atau kendala dan bersifat oportunistis dan anarkhi.

Hambatan oportunistis, dilakukan mereka yang sengaja mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri, misalnya perampokan, dan pencurian terhadap penduduk di tempat terpencil yang sebenarnya termasuk perbuatan kriminal, namun perbuatan a-sosial seperti itu hanya kecil saja dan dapat segera diatasi.

Di samping itu karena adanya pengertian dan penafsiran arti kemerdekaan yang keliru, yaitu yang menganggap dengan datangnya kemerdekaan, maka harus diadakan perubahan total dalam kehidupan masyarakat dan mengabaikan azas hukum, dapat menimbulkan gejala anarkhi, seperti peristiwa tiga daerah di wilayah Tegal, Brebes dan Pekalongan pada masa awal revolusi kemerdekaan. Hambatan serupa ini pun ditangani dengan tepat dan cepat.

3. Penghapusan Kekuasaan Swapraja di Surakarta

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden R.I. mengeluarkan piagam yang menetapkan Sri-Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII dalam kedudukan semula sebagai raja, kepala pemerintahan swapraja Surakarta.

Kemudian pada tanggal 1 September 1945 Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan Mangkunegoro VIII mengeluarkan pernyataan sebagai berikut :

- a. Bahwa kerajaan Kasunan dan Mangkunegaran adalah daerah Istimewa dari Republik Indonesia.
- b. Bahwa dari semua urusan pemerintah dipimpin oleh pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran dengan mengingat peraturan-peraturan pemerintah R.I.
- c. Hubungannya dengan pemerintah R.I. bersifat langsung.
- d. Memerintahkan kepada penduduk agar mengindahkan semua peraturan yang ditetapkan.

Keputusan ini menimbulkan reaksi rakyat yang tidak menghendaki adanya pemerintah yang bercorak swapraja itu. Di kalangan masyarakat timbul tuntutan kepada Pemerintah R.I. agar pemerintahan Swapraja diganti dengan tenaga muda yang berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Menteri Dalam Negeri, Mr. Dr. Soedarsono kemudian mengangkat Gubernur Suryo pada tanggal 27 Mei 1946 sebagai wakil Pemerintah Pusat R.I., berkedudukan di Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan di daerah Surakarta. Pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 16 tahun 1946 yang menetapkan, menghapus Pemerintah Daerah Istimewa Kasunanan dan Mangkunegaran. Sebelum bentuk Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang Undang, daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan satu karesidenan yang dikepalai oleh Residen yang memimpin segenap pegawai Pamongpraja dan Polisi Serta memegang segala kekuasaan Residen di Jawa dan Madura.

Pada tanggal 16 Juni 1946 berakhirlah Pemerintahan Swapraja daerah Kasunan dan Mangkunegaran di Surakarta. Tanggal ini kelak dijadikan Hari Jadi Pemerintah Daerah Surakarta. Pada tanggal 15 Juli 1946 Pemerintah menetapkan daerah Kotamadya Surakarta dan mengangkat seorang Walikota. (50, h. V).

4. Pemberontakan Tiga Daerah di Tegal

Tiga Daerah merupakan daerah meliputi Tegal – Brebes dan

1. Bahwa Negeri Paku Alaman, yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada daerah ini segala urusan Pemerintahan dalam Negara Paku Alaman mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan amanat kami ini.

Paku Alaman, 28 Puasa Ehe 1876.
atau 5-9-1945

Paku Alam VIII

Kedua plakat, amanat itu.¹⁰⁾ yang mengatakan bahwa daerahnya (Kasultanan dan Pakualaman) merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, kemudian dicetak dengan kertas merang di percetakan *Sinar Matahari*, sekarang Hotel Garuda. Plakat amanat kedua pimpinan daerah Yogyakarta ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan lebih mengobarkan dan membakar semangat perjuangan rakyat.

Apabila kedua amanat itu kita lihat dari sudut pandangan waktu itu di mana pemerintah pendudukan Jepang masih berkuasa dan masih lengkap persenjataannya, maka kedua amanat itu mempunyai nilai besar bagi rakyat, sebab dapat mengorbankan semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Dalam sejarah, ketegasan sikap kedua orang Kepala Daerah Yogyakarta itu memiliki bobot dan nilai yang tinggi. Kesultanan

sari Timur dan Tanjung; Pimpinannya Dinadjim, Ketua KNI Brebes.

Kabupaten Pemalang : Pimpinannya Supangat dan di Petarukan Idris.

Pemerintah R.I. kemudian melakukan tindakan untuk menjernihkan suasana yang semakin gawat. Gubernur Jawa Tengah mengirim utusan Sayuti Melik ke Tegal, kemudian menyusul Letkol Iskandar Idris sebagai Komandan Resimen TKR XII Pekalongan Letkol Iskandar Idris, meminta bantuan kedua tokoh agama yang terkenal di daerah Tegal, yaitu Kyai Bisri dan Kyai M. Muchidin untuk menenteramkan kembali masyarakat. Namun usahanya tidak berhasil, bahkan Sayuti Melik dan Letkol Iskandar Idris tertangkap dan dijadikan tawanan.

Pada tanggal 4 Nopember 1945 Gerakan Tiga Daerah mulai bergerak menyerbu Tegal. Puluhan ribu massa rakyat dengan bersenjata bambu runcing dan tanda pengenal Janur kuning berjalan kaki sambil beramai-ramai memasuki kota. Semua orang lelaki yang dijumpai dipaksa ikut, kalau menolak berarti disiksa atau dibunuh, sehingga barisan gerombolan makin lama makin bertambah banyak.

Kantor pemerintah, asrama polisi, dan rumah pejabat, diserbu dan diduduki. Banyak pejabat daerah segera menyingkir, di antaranya. Bupati Tegal R. Sunaryo, Wedono Tegal R. Basirun dan Mr. Besar Residen Pekalongan karena terancam keamanan dirinya.

R.A. Kardinah, adik R.A. Kartini, dan keluarga Bupati Tegal tidak sempat menyingkir, lalu ditangkap dan dipaksa memakai sarung karung goni serta diarak keliling kota.

Gerombolan kemudian berusaha menyerbu markas Batalyon III TKR Tegal. Badan Keamanan Rakyat yang bertugas menjaga kota Tegal adalah Batalyon III TKR dan BKR Laut. Para prajurit diperintahkan untuk menahan diri dan tidak boleh menembak, karena sebagian besar pengikut Gerakan Tiga Dae-

rah hanya akibat paksaan saja atau hanya ikut-ikutan. Mereka umumnya tidak mengerti apa tujuan gerakan yang sebenarnya. Ketika massa rakyat mendekati asrama dalam jarak 10 meter mulai ada tembakan senjata metraliur ke atas sebagai peringatan agar penyerbuan jangan dilanjutkan. Namun tembakan peringatan ini tidak hiraukan. Pemimpin gerombolan yang berpakaian serba hitam dan ikat kepala kain merah memberi komando, "Terus maju, terus maju, peluru tidak mempan" Sementara itu gerombolan semakin bertambah berani menyerbu. Baru setelah keadaan menjadi gawat Komandan TKR memerintahkan menembak, pemimpin gerakan Tiga Daerah dengan karaben.

Sersan Wiryia menembak pemimpin Gerakan Tiga Daerah sehingga terkena perutnya dan meninggal. Rudjab juga terkena pahanya. Setelah pemimpin mereka terkena tembakan gerombolan menghentikan penyerbuan dan membubarkan diri. Sementara itu daerah Tegal sudah diduduki Gerakan Tiga Daerah kecuali pusat-pusat militer. Komandan Resimen TKR XVII di Pekalongan lalu memerintahkan semua pasukan Batalyon III menarik diri ke Pekalongan melalui lautan. Setelah kota Tegal diduduki, Gerakan Tiga Daerah beramai-ramai mengadakan pemilihan pejabat daerah, terdiri dari :

Bupati Tegal	:	Abu Sudjai dari desa Pacul
Patih	:	Tjitro Satmoko, Ketua KNI Tegal
Wedana Kota Tegal	:	Mardjono
Wedana Slawi	:	Kya H. Fachruri
Asisten Wedana Talang	:	Abdullatif
Bupati Brebes	:	H. Satori (I, h. 8).

Sementara itu Mr. Besar sebagai Residen Pekalongan telah digantikan oleh R. Supangat. Pada tanggal 9 Desember 1945 diadakan pemilihan Residen Pekalongan yang baru untuk mengatasi keadaan yang meresahkan itu. Dalam pemilihan itu ditampilkan nama Sardjijo dari Purworejo. Dengan surat keputusan Presiden R.I. Sardjijo diangkat sebagai Residen Pekalongan.

Tetapi terbukti Sardjijo mengikuti Gerakan Tiga Daerah. Pada waktu mengadakan kunjungan dinas ke daerah Kedungwuni, ia disergap oleh H. Ismail Hasan Idris, adik Iskandar Idris, tetapi dapat meloloskan diri, sekalipun tertembak kakinya. Akhirnya Letkol Boestomi dan Mayor Wadiyono berhasil menjebak dan menangkap Sardjijo beserta anak buahnya.

Berita tertangkapnya Sardjijo tersebar di daerah Gerakan Tiga Daerah dan membangkitkan kemarahan di kalangan pimpinan Gerakan Tiga Daerah. Karena itu Kutil menyusun kekuatan untuk menyerbu daerah Pekalongan. Penyerbuan Gerakan Tiga Daerah dipimpin sendiri oleh Syakyani alias Kutil.

Beribu ribu pasukannya terdiri dari masa rakyat diberangkatkan ke Pekalongan dengan Kereta Api dan truk. Pelataran Stasiun K.A. dijadikan tempat berkumpul.

Sementara itu pasukan TKR yang bertugas memadamkan gerakan pengacauan Kutil membuat gerakan pengepungan. Kekuatan dipusatkan di pinggiran kota dan sangat disembunyikan, sedangkan pusat kota dibuat sepi seperti tidak ada pertahanan sama sekali. Setelah gerombolan Gerakan Tiga Daerah berkumpul di Pekalongan dan mulai menyerbu kantor-kantor pemerintah, pasukan TKR mulai bergerak menyerbu dari berbagai penjuru.

Gerakan Kutil yang terdiri dari massa rakyat sama sekali tidak mengetahui siasat perang. Mereka menjadi ketakutan dan bubar mencari keselamatan diri sendiri dan banyak yang menyerah. Sakyani yang baru turun dari mobilnya juga terkepung oleh pasukan TKR dan turut menyerah. Ia segera ditangkap dan ditawan di markas Polisi. Pada tanggal 17 Desember 1945, mulai diadakan operasi keamanan. Pusat kota yang diduduki Gerakan Tiga Daerah segera dibebaskan kembali. Para pemimpin rakyat dan pegawai negeri yang ditawan dibebaskan, termasuk Letkol Iskandar Idris dan Sayuti Melik.

Para pejabat daerah yang dipilih dan diangkat oleh Gerakan

Tiga Daerah dibiarkan meneruskan jabatannya. Mereka diberi kesempatan memilih meneruskan tugas atau meletakkan jabatan karena sebenarnya mereka dipaksa dan dipilih oleh massa rakyat. Mereka tidak tahu apa mengenai tujuan Gerakan Tiga Daerah. Sebagian pejabat baru dari Gerakan Tiga Daerah memilih meletakkan jabatan, karena merasa tidak mampu memangku jabatannya. Mereka diberhentikan dengan hormat oleh pemerintah.

Menjelang akhir pemberontakan Gerakan Tiga Daerah, Mr. Iskak Tjokrohadisuryo selaku utusan Presiden RI datang ke Tegal, untuk membuat laporan tentang kehendak rakyat yang sebenarnya. Laporan Mr. Iskak Tjokrohadisoeryo dan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro, mengharap kunjungan Presiden RI di daerah Gerakan Tiga Daerah. Pada tanggal 25 Desember 1945 Presiden Soekarno datang di Tegal, bersama Ibu Fatmawati, Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta Istri, Menteri dan Menteri Sutan Syahrir, Mr. Wongsonegoro, dan pembesar pembesar lainnya. Dari kalangan militer tampak Jenderal Sudirman, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Mayor Jenderal Simatupang, Mayor Jendral Kafrawi dan para Perwira lainnya.

Beribu ribu rakyat menyambut kedatangan rombongan Presiden. Rapat Raksasa diadakan di lapangan Slerok, Tegal yang dikunjungi massa rakyat yang berasal dari daerah daerah di sekitarnya. Presiden Soekarno memberikan wejangannya yang disambut gegap gempita oleh pengunjung.

Setelah pemberontakan Gerakan Tiga daerah berakhir keadaan tenang kembali. Pemberontakan ini memakan korban yang tidak sedikit, sehingga mengurangi kekuatan rakyat yang sangat diperlukan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, namun pembontakan ini merupakan bagian dari sejarah Revolusi Kemerdekaan terutama di daerah Jawa Tengah.

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN DI DAERAH

1. Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Daerah

Setelah berita Proklamasi Kemerdekaan tersiar ke daerah Jawa Tengah pada tanggal 19 Agustus 1945 para pemuda mengadakan konperensi kilat di Semarang yang dihadiri oleh wakil wakil pemuda dari berbagai tempat di Jawa Tengah. Mereka bersepakat mengadakan kesatuan aksi di antara berbagai Angkatan Muda yang melahirkan *Angkatan Muda Republik Indonesia* disingkat AMRI. Bambang Suprpto dipilih sebagai ketua, sedangkan anggota pengurus lainnya ialah S. Karna, Ibinu Parna, Martadi, Rochati, Bambang Subandono, Suwarso dan S. Broto. Selanjutnya berbagai daerah mempunyai wakil wakilnya, yaitu Slamet Sunaryo dan Arsad untuk Pekalongan, Hamid Efendi untuk Pati, Harsono untuk Surakarta, Sunarto untuk Kedu dan Sutoyo untuk Banyumas. (Bambang Suprpto, Kisah Pertempuran 5 hari Semarang).

Dengan terbentuknya kesatuan aksi AMRI, maka semua kegiatan dan perjuangan dapat dengan cepat dikordinasi dan saling membantu dalam perjuangan. Di tiap jawatan atau kantor juga berdiri organisasi Angkatan Muda. Di antara sekian banyak Angkatan Muda itu yang terpenting ialah AMKA, singkatan dari *Angkatan Muda Kereta Api*. AMKA menguasai komunikasi angkutan perkereta-apian.

Para pemuda berusaha mendapatkan senjata dengan melucuti senjata tentara Jepang. Pemuda membutuhkan senjata untuk mempertahankan Republik Indonesia, mengingat Belanda akan mengadakan aksi untuk menguasai kembali bekas jajahannya. Untuk mendapatkan senjata dilaksanakan dengan diplomasi dengan komandan militer Jepang, tapi bila tidak mungkin maka terjadi perang.

Mula-mula Mayor Jendral Nakamura, komandan militer Jepang di Jawa Tengah yang berkedudukan di Magelang tidak keberatan memberi senjata senjata kepada para pemuda, demi

kian juga Mayor Kido dari Batalyon Kido. Banyak senjata senjata Jepang yang telah diserahkan kepada pemuda Indonesia. Tetapi tidak semua tentara Jepang yang berada di daerah mau menyerahkan senjatanya. Bahkan mereka juga tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa daerah, sehingga terjadi pertempuran antara pemuda melawan Jepang.

Pada tanggal 3 Oktober 1945 di *Pekalongan* terjadi insiden berdarah antara Jepang dan Indonesia. Pokok masalahnya ialah tuntutan penyerahan senjata. Karena insiden tersebut 32 orang penduduk tewas, dan ratusan menderita luka parah. (34, h. 153).

Usaha Mr. Besar selaku Residen Pekalongan untuk merundingkan penyerahan kekuasaan Jepang gagal, sehingga menimbulkan kemarahan pemuda. Banyak pemuda ingin membalas dendam terhadap *Kempeitai* yang terkenal kejamnya. Gedung *Kempeitai* dikepung, pada tanggal 3 Oktober 1945. Dua orang pemuda bernama Rahayu dan Bisma memberanikan diri mengganti bendera Jepang dengan Sang Merah Putih. Kedua pemuda memanjat atap Gedung lalu mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Seorang *Kempeitai* segera menembaknya dari bawah. Rahayu menjatuhkan diri sambil memegang benderanya. Tembakan segera dibalas oleh Sunaryo (kemudian Brigjen CPM Purnawirawan), sehingga terjadi tembak menembak dari kedua belah pihak.

Dari kejadian ini telah gugur 32 orang penduduk. Pertempuran berlangsung selama tiga hari, dan setelah aliran listrik dan air minum gedung *Kenpeitai* diputus, Jepang menyerah. Setelah keadaan dikuasai oleh pemuda penjuang, ternyata Rahayu dan Bismo masih hidup. Mereka luput dari tembakan Jepang. Semua prajurit Jepang di karesidenan Pekalongan yang menyerah dikirim ke Purwokerto sebagai tawanan perang yang akan diserahkan kepada Sekutu. (48), (8).

Di *Banyumas* pengoperan senjata pasukan Jepang kepada para pemuda (BKR) dapat berjalan dengan teratur, berkat

pimpinan dari Pak Dirman (*Daidanco* Sudirman) yang bijaksana. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, atas inisiatif Pak Dirman, seluruh bekas *Cudanco* dan *Syodanco* dari Karesidenan Banyumas (4 daidan/batalyon) dikumpulkan dan diasramakan dalam kota Purwokerto selama tiga hari dengan maksud untuk diberi petunjuk dan penjelasan sekitar perkembangan politik serta menyatukan kebulatan tekad dan berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Setelah digembleng, para bekas *Syodanco* itu disebar ke seluruh kecamatan dalam karesidenan untuk menyusun dan membentuk kekuatan dari bekas tentara (*Peta*, *Neiho*, *KNIL*) di setiap kecamatan paling sedikit satu regu. Di Purwokerto diadakan asrama dan latihan tetap, yang pengikutnya diambil dari setiap kecamatan (setiap kecamatan mengirimkan dua orang bekas tentara) dan berganti ganti selama satu minggu (Karesidenan Banyumas mempunyai 72 Kecamatan), Ketika dari Pemerintah Pusat datang instruksi pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat), maka segera disusun BKR Banyumas di antara para pemuda bekas tentara tersebut. Selain itu banyak pemuda menyusun pula organisasinya yang berada di luar BKR, tetapi berhubungan dan bekerjasama dengan BKR.

BKR Banyumas kemudian mengirimkan utusan ke berbagai daerah dan ke pusat, antara lain Sutiro dan Suparjo ke Jakarta, dan Abimanyu ke Yogyakarta. Sementara itu BKR Banyumas juga mengadakan hubungan dengan pihak pasukan Jepang untuk mendapatkan alat senjata. Di Purwokerto pada waktu itu ditempatkan Batalyon Yuda di bawah komando Mayor Yuda Mitsuomi. Sesudah mendapatkan cukup keterangan serta persatuan dan tenaga telah tersusun dan terlatih, maka pemimpin BKR Banyumas dengan resmi mulai mengadakan perundingan dengan pihak Jepang untuk membicarakan permintaan pihak Indonesia mengenai penyerahan alat senjata. Dalam perundingan itu BKR Banyumas diwakili oleh pimpinannya, ialah Pak Dirman (kemudian menjadi Jendral Sudirman, Panglima Besar TNI) dan pihak Jepang diwakili oleh pimpinan batalyon, ialah Yuda Butaico (Mayor Yuda), dengan perantara Iskah Tjo-

krohadisurya (sebagai pejabat *Fuku Syucokan*). Perundingan itu diadakan di rumah *Syucokan*, di mana pihak kita memberikan penjelasan kepada pihak Jepang tentang perkembangan keadaan politik bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya, maksud dan tujuan pemuda pemuda Banyumas serta telah tersusunnya BKR yang terdiri dari bekas tenaga bersenjata (*Peta*, *Heiho*) dan organisasi organisasi pemuda lainnya yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah karesidenan Banyumas.

Untuk keperluan penjagaan keamanan pihak kita membutuhkan senjata dari pihak Jepang. Dalam hal ini pihak pimpinan pasukan Jepang tidak dapat menyanggupi, karena akan sukar mempertanggungjawabkannya kepada Sekutu, sebab atas perintah atasannya senjata senjata tersebut harus dikumpulkan dan selanjutnya dikirimkan ke Bandung. Pimpinan BKR tidak berputus asa dan terus mendesak untuk mendapatkan senjata tersebut.

Dijelaskan tentang kejadian kejadian di daerah lain di mana para pemuda terpaksa menyerbu markas Jepang untuk mendapatkan senjata. Tetapi pemuda pemuda Banyumas masih dapat dikuasai dan ketaatan kepada pimpinan, sehingga belum mau bertindak demikian. Pada akhirnya setelah pihak Jepang memikirkan masak masak dan mengadakan pembicaraan di antara mereka sendiri, mereka menyanggupi untuk menyerahkan senjata kepada pihak BKR untuk satu kompi. Penyelenggaraan penyerahan dan urusan selanjutnya diserahkan kepada kapten persenjataan mereka bersama Pujisamarto dari pihak BKR.

Setelah senjata tersebut diterima oleh pihak kita (BKR), terus dibagikan ke kecamatan-kecamatan yang dipandang penting. Ternyata jumlahnya masih jauh dari mencukupi, sehingga pada bulan September 1945 diadakan pembicaraan lagi di antara pihak Jepang dengan pihak pimpinan BKR untuk penambahan senjata senjata bagi BKR.

Tetapi perundingan tersebut mengalami kegagalan karena

para pemuda di luar BKR, ketika mendengar akan diadakan perundingan dan telah diperoleh senjata dari pihak Jepang, dengan secara tidak teratur berduyun-duyun pergi ke *butai* dan beramai-ramai berkumpul di halaman, bahkan ada yang sampai masuk ruangan perundingan sehingga keadaan menjadi kacau.

Pihak Jepang tidak mau meneruskan perundingan dengan alasan tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban, maka perundingan dihentikan. Para pemuda kemudian diperintahkan kembali ke tempatnya, dengan memberi penjelasan, bahwa jika kita ingin mencapai hasil yang nyata dan menguntungkan, kita harus sabar dan tenang, tetapi siap dan waspada untuk sewaktu-waktu menjalankan perintah.

Kemudian pihak kita (pimpinan BKR) mencoba lagi meneruskan perundingan, di mana para pemuda dengan tertib dan teratur menunggu di luar halaman. Juga pasukan BKR yang bersenjata di tempatkan di sekitarnya dengan maksud untuk mencegah timbulnya keributan seperti sebelumnya. Setelah Mayor Yuda (*Butaico*) mengetahui dan menyaksikan keadaan seperti tersebut di atas dan karena mengakui pula bahwa jumlah senjata yang telah diserahkan untuk dapat menjamin keamanan di seluruh karesidenan Banyumas memang kurang, maka ia bersedia memberi tambahan. Pada hari itu juga diadakan pengambilan tambahan senjata lengkap dengan peluru dan alat-alat lainnya, sehingga sampai jauh malam baru selesai. Karena para pemuda sangat ingin untuk memiliki senjata, maka mereka mengambil senjata lebih daripada yang ditetapkan. Setelah *butaico* mendengar laporan mengenai hal ini, maka ia menyatakan penyesalan dan kekecewaannya kepada pimpinan BKR, dan ia menyatakan bahwa ia tidak sanggup melayani lagi jika tidak diambil tindakan terhadap yang bersalah serta perbaikan dalam penyelenggaraannya. Pihak pimpinan BKR menyatakan penyesalannya dan meminta maaf serta menyanggupi tuntutan pihak Jepang. Untuk sementara tidak diadakan perundingan lagi, tetapi diadakan konsolidasi ke dalam dengan adanya penerimaan senjata senjata tadi. Hal ini ternyata telah memperkuat BKR

serta menambah kepercayaan penduduk Purwokerto terhadap BKR.

Tetapi, pada suatu hari sekonyong konyong terjadi kebakaran di gudang persenjataan Jepang di Purwokerto yang untung dapat segera dapat dipadamkan. Sebab sebabnya tidak diketahui, tetapi menurut dugaan akibat sabotase pihak Jepang sendiri. Penduduk menjadi gelisah dan tidak merasa aman jika tentara Jepang masih dapat bergerak dengan leluasa keluar masuk asrama dan bergerak di dalam kota. Semakin hari suasana semakin hangat. Pimpinan BKR menegaskan kepada pemuda pemuda supaya tenang serta siap menunggu perintah. Usaha untuk mengatasinya dilakukan oleh pak Dirman sendiri kepada Butaico. Pak Dirman menjelaskan bahaya yang sedang mengancam jika keadaan tidak dapat dikuasai lagi. Butaico (Mayor Yuda) menyatakan, bahwa pihak Jepang akan membela diri dengan segala yang ada padanya. Tetapi pihak BKR tidak putus asa dan para pemuda merapatkan pengepungannya terhadap Buatai sehingga pihak Jepang menginsafi akan kesulitan kedu-dukannya, hingga pada akhirnya mereka bersedia menyerah. Butai dengan seluruh isinya dipertanggung-jawabkan kepada KNI Daerah, juga nanti dalam menghadapi pihak Sekutu. Semua orang Jepang akan diinternir di Banyumas dan dikawal oleh BKR dan Polisi. Makanan mereka akan dijamin. Pada malam itu juga mereka diangkut ke Banyumas.

Kepada rakyat pemuda dijelaskan tentang perjanjian yang telah dicapai dengan pihak Jepang. Rakyat kemudian pulang teratur ke tempatnya masing-masing. Dengan demikian, dapatlah BKR kini mengatur diri dengan baik serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Kapten Pujisumarto disertai mengurus persenjataan, Mayor Badarussamsi perlengkapan dan Dokter Rajiman bagian kesehatan. Kemudian dibentuk dua pasukan (batalyon) yang dipimpin oleh Mayor Abimayu dan Mayor Surono.

Peralatan yang dimiliki BKR Banyumas, antara lain 5.000

pucuk senapan, 700 pucuk pistol, 500 pucuk sten 150 pucuk senapan mesin ringan, 80 pucuk senapan mesin M.23,4 pucuk senapan mesin berat, 2" ada 50 pucuk dan 2" ada 30 pucuk, 2 pucuk meriam lapangan 7,5 dan 2 pucuk meriam gunung 7,5 serta 5 pucuk meriam pantai. Kemudian 4 gudang peluru, 1 gudang Zeni, dan 1 gudang alat perhubungan. Kendaraan ada 13 buah sedan, 60 buah truk, dan 4 buah bren - carrier, selain alat kecil seperti peneropong, pedang, sepeda motor, dan lain lain. Seluruh alat perlengkapan tersebut, cukup untuk satu resimen pertempuran yang sederhana. Hal ini juga menyebabkan bahwa dibandingkan dengan tentara BKR - BKR di tempat lain di Jawa Tengah, BKR Banyumas adalah yang paling lengkap persenjataannya. (24, h. 364).

Sikap Mayor Yuda tersebut dapat dianggap sebagai contoh kasus dari sikap pimpinan pasukan Jepang yang berada di bawah komando Mayor Jendral Nakamura Junji yang berpusat di Magelang (*Jawa Bo-eitai*), sebagai sikap yang netral terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, yang berarti mereka tidak bergabung dengan pihak Indonesia atau membantunya, tetapi juga tidak menghalangi aspirasi orang Indonesia untuk memperoleh sarana fisik guna dapat mempertahankan diri terhadap orang Belanda yang akan kembali. Sikap netral yang mengakibatkan pengoperan senjata oleh pihak pemuda (BKR) dengan secara damai ini kiranya berbeda dengan kejadian di Semarang yang mengakibatkan pecahnya Pertempuran Lima Hari pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana terlibat Batalyon Kido di bawah Mayor Kido Shinichiro yang berkedudukan di Jatingaleh dan kedatangan pasukan Batalyon Yogi (Yagi) di bawah Mayor Yogi yang baru kembali dari pertempuran di Irian. Berlainan dengan sikap Mayor Yuda, sikap Mayor Kido (dan lebih lebih kedatangan Batalyon Yogi yang tidak mengetahui sebelumnya tentang perkembangan yang terjadi di Jawa) adalah sikap yang keras dan menentang terhadap keinginan para pemuda serta tidak mau menyerahkan semua senjatanya kepada pihak Indonesia. Dalam hal Mayor Yu-

da dan batalyonnya, kemudian oleh Pasukan Serikat mereka dikirim ke Singapura dan kemudian dipulangkan ke negerinya. Ternyata tidak ada tindakan apa pun yang diambil oleh pihak Serikat terhadap Mayor Yuda dan batalyonnya karena tindakan mereka menyerahkan senjata kepada pihak Indonesia yang di mata pihak Serikat merupakan "pihak yang tidak berwenang". (28, h. 136 – 141).

Pada tanggal 6 Oktober 1945 di Yogyakarta juga terjadi insiden yang sama. Angkatan Muda berusaha untuk mendapatkan senjata dari tentara Jepang yang bermarkas di Kotabaru, tetapi permintaannya ditolak. Akibatnya pada jam 23.00 para pemuda dan massa rakyat bangkit bergerak mengepung markas tentara Jepang. Pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Baru siang harinya Jepang menyerah. Dalam pertempuran itu tercatat korban sembilan orang dari Jepang dan 19 orang pemuda Indonesia. (2, h. 28).

Solo yang merupakan Daerah Istimewa (*Koci*) diperintah oleh *Solo Koci Cokan Zozo Hiyono*. Perebutan kekuasaan di Solo dilakukan oleh pemuda pemuda yang telah bersiap di bawah tanah selama masa pendudukan Jepang dan oleh pemuda pemuda bekas Peta, Heiho, dan lain lain. Perwira perwira dari Peta Wonogiri bergabung menjadi *Angkatan Muda Tentara Surakarta* di bawah pimpinan bekas Syodanco Sutarto. Markas rakyat dan pemuda terletak di Purbayan, di bekas Hotel *Yuliana* dekat kantor *Koci Cokan*. Aksi mereka yang pertama ialah gerakan mengibarkan bendera yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 1945. Pemuda Maladi dari Jawatan Radio yakin bahwa pada hari itu orang orang Belanda akan merayakan Hari Ratu dan mengadakan demonstrasi untuk menunjukkan kekuasaannya kembali dan mungkin pesawat pesawat terbang Belanda akan menyebarkan pamflet. Maka pada hari itu para pemuda melakukan aksi pengibaran bendera Merah Putih di tiap rumah untuk mendemonstrasikan kemerdekaan kita. Beribu ribu pemuda dikerahkan untuk berpawai di dalam kota, terutama di depan *Koci Cokan*. Semua bendera yang bukan bendera Indonesia

diturunkan dan di mana mana dikibarkan Sang Dwi Warna. Dan memang benar pada hari itu terdapat pesawat terbang Belanda yang menyebarkan pamflet. Tetapi rakyat mengumpulkan selebaran Belanda itu dan diserahkan kepada pemerintah serta dibakar beramai ramai.

Pihak Jepang tidak dapat lagi menahan gerakan para pemuda dan rakyat, sehingga ada yang bersedia berunding karena takut menghadapi kekerasan. Jawatan Radio adalah salah satu yang pertama tama kita kuasai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perjuangan. Dari gedung ini juga diterbitkan surat kabar *Merah Putih* yang mulanya secara sembunyi sembunyi kemudian secara terus terang.

KNI Daerah berdiri untuk merencanakan siasat dalam merebut kekuasaan dari *Koci Cokan*. Wakil wakil KNI telah mulai berkantor di gedung *Koan*. Setelah berkali kali dilakukan perundingan dan desakan kepada pihak Jepang, akhirnya pihak Jepang bersedia menyerahkan kekuasaan sipil kepada pihak kita, karena mereka menyadari akan kelemahannya pada waktu itu. Setelah itu, dilakukan pula pengoperan terhadap kantor kantor lainnya, misalnya kantor kabupaten dan perusahaan perusahaan.

Setelah dapat dilakukan perebutan kekuasaan sipil, dilanjutkan dengan tindakan untuk melucuti persenjataan *butai butai* Jepang di Surakarta. Pada waktu itu sudah terdapat beberapa rombongan bersenjata seperti BKR di bawah pimpinan *Daidanco* Mulyadi Joyomartono, Angkatan Muda Tentara Surabaya di bawah pimpinan bekas Syodanco Sutarta, Badan Pengawas Umum, dan sebagainya. Dengan perundingan yang berat disertai ancaman, dapat direbut persediaan senjata Jepang di *Zieken Zorg* Mangkubumen dan Lapangan Panas.

Dengan demikian pasukan kita mulai lebih lengkap persenjataannya dan lebih teratur. Tetapi persoalan yang sulit ialah dalam menghadapi *Kempeitai* di bekas gedung *San Gui Timatsu*. Sementara itu perlucutan senjata di tempat lain berlang-

sung dengan selamat, seperti di Baros Tampir, dan Colomadu. Namun terhadap *Kempeitai*, diplomasi kita masih belum berhasil, dan mereka menolak tuntutan kita untuk menaikkan bendera Merah Putih dan menurunkan bendera Hinomaru, bahkan mereka melakukan stelling di sekeliling markas dan asramanya. Perundingan tersebut sudah berlangsung sejak 11 Oktober 1945, dan perundingan terakhir dengan keputusan pihak kita yang terdiri dari Maladi dan Iskandar, juga gagal. Maka sejak saat itu pihak kita memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Pada tanggal 12 Oktober 1945 tengah malam terdengar tembakan pertama sebagai isyarat untuk bersiap. Rakyat dan pemuda berkumpul di markas markas nya dan mengepung markas *Kempeitai* di Jalan Timuran (Jln. Slamet Riyadi) di mana *Kempeitai* juga telah menyiapkan pertahanannya. Dalam pertempuran yang terjadi, pihak Jepang berusaha untuk meloloskan diri dari kepungan akan tetapi tidak berhasil. Dalam pertempuran ini telah gugur pemuda Arifin dan Suryosuksara, Saudara Susuhunan menderita luka parah. Pihak kita kemudian melancarkan taktik secara mendadak dengan memasuki halaman markas *Kempeitai* dengan mobil. Demikian pada waktu pagi, sebuah mobil masuk sekonyong konyong dinaiki oleh dua orang pemuda bersenjata, bernama Slamet dan Sudarman. Penjaga Jepang tercengang dan tertegun, kemudian mengangkat tangannya. Pada saat itu rakyat dan pemuda serentak masuk menyerbu dan bercampur-baur dengan Jepang, sehingga semua orang Jepang terpaksa menyerah. Rakyat hampir saja melakukan penyembelihan terhadap orang-orang Jepang *Kempeitai* tersebut, kalau para pemimpin tidak cepat memelihara ketertiban. Sambil berpawai, orang-orang Jepang dibawa ke penjara Lojiwarung. Pada akhirnya, semua orang Jepang, sipil maupun militer, diinternir di Boros Tampir; Boyolali, di mana sudah disiapkan tempatnya oleh pihak kita. (24, h. 367–370; 55).

Di daerah *Pati*, kekuasaan *Syucokan* Pati diambil alih oleh Residen Milono, bekas *Fuku Syucokan*, pada tanggal 3 Oktober 1945 dalam suatu upacara yang dihadiri oleh seluruh pegawai,

BKR, dan KNI. Bendera Merah Putih menggantikan bendera Jepang di gedung Karesidenan yang kemudian ditempati oleh Residen R.I. Kira-kira lima ribu pegawai dan rakyat mengadakan pawai dan mengucapkan sumpah setia kepada Pemerintah R.I. di depan Gedung Karesidenan.

Di *Magelang*, pusat kedudukan markas Jepang di Jawa Tengah juga terjadi insiden berdarah. Pada tanggal 25 September 1945 massa pemuda giat memasang bendera Merah Putih, terutama gedung kantor pemerintah. Dua hari sebelumnya ada seorang Jepang yang merobek-robek bendera Merah Putih. Seketika itu terjadi gelombang protes pemuda Indonesia kepada Jepang. Demonstrasi pemuda menuntut agar prajurit yang menyobek bendera itu dijatuhi hukuman. Peristiwa semula terjadi di muka Gedung Hotel Nitaka merembet menjadi aksi pemuda menentang kekuasaan Jepang.

Pada saat itu pagi-pagi benar para pemuda berbondong-bondong mendaki Gunung Tidar bermaksud memancangkan tiang bendera dan mengibarkan bendera Merah Putih. Di lereng Gunung Tidar terletak asrama *Kempeitai* sehingga terjadi perkelahian antara prajurit Jepang dengan pemuda.

Karena jumlah pemuda makin lama makin banyak, prajurit prajurit Jepang melarikan diri ke markas. Kemudian markas Jepang menjadi sasaran serbuan pemuda dan masa rakyat. Pasukan Jepang menjadi kalap, rakyat ditembaki secara gencar. Dalam peristiwa itu terdapat lima orang Indonesia gugur (62, h. 3).

2. Pertempuran Lima Hari di Semarang

Pada tanggal 14 Oktober 1945 pasukan Jepang tiba-tiba menyerang dan melucuti delapan orang petugas kepolisian yang sedang berjaga di persediaan air minum di Jln. Wungkal. Tidak lama kemudian tersiar berita, bahwa Jepang telah meracuni reservoir air minum itu.

Drs. (med) Kariadi yang menjadi kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara Semarang, segera berangkat ke Jln. Wungkal untuk mengadakan penelitian mengenai air minum bagi kota Semarang. Tetapi tiba tiba mobil yang ditumpangi diserang di daerah Jln. Pandanaran. Drs. Karyadi dan supirnya gugur. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan para pemuda. Keadaan kota menjadi gawat. Semua anggota BKR berjaga jaga. Saat itu terjadi pula pemberontakan para kawan Jepang di tempat tawanan di Sekolah Pelayaran.

Polisi Istimewa yang menjaga tawanan itu jumlahnya sangat sedikit, namun dapat bertahan. Setelah dapat membunuh tiga orang Jepang mereka mengundurkan diri. (15, h. 2).

Di antara tawanan Jepang ada yang melarikan diri menuju ke Markas Polisi Militer Jepang di Candi Baru. Mendengar pemberontakan tawanan Jepang yang berhasil mendobrak penjagaan Polisi Istimewa Indonesia, seluruh pemuda bersiap siaga berjaga jaga menghadapi segala kemungkinan serangan dari pasukan Jepang.

Pada pagi hari sekitar jam 08.00 pasukan *Kido Butai* mengadakan serangan kilat dengan dalih melindungi orang orang Jepang dari tindakan orang Indonesia. Sebenarnya Kota Semarang akan dikuasai dan diserahkan kepada Sekutu. (60), (61).

Pasukan *Kido Butai* mengadakan serangan membabi buta, lebih lebih setelah mereka mendengar, bahwa Jendral Nakamura ditawan di Magelang. Jendral Nakamura sebagai komandan pasukan Jepang untuk Jawa—Madura yang bermarkas di Magelang, pada tanggal 14 Oktober 1945 telah ditawan dan dibawa ke Purworejo. Dalam hal ini para pemuda tidak mengindahkan saran R.P. Suroso, sebagai Komisaris Pemerintah yang berkedudukan di Yogyakarta, yang telah mengingatkan para pemuda bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Dalam gerakannya pasukan *Kido Butai* membunuh orang laki-laki terutama pemuda yang dijumpainya. Namun gerakan

ini tidak menggentarkan hati pemuda. Banyak pemuda dan pelajar ditawan, di antaranya terdapat seorang guru bahasa Jepang dari Taman Siswa bernama Pak Djandji. Sediannya pemuda pelajar yang ditawan di Candi 42 akan dibunuh, namun berkat diplomasi Pak Djandji yang pandai bahasa Jepang itu, luput dari pembunuhan.

Asrama pemuda yang dipertahankan dapat direbut pasukan Jepang dan mereka yang tertawan dibunuh. Pertempuran terjadi di mana mana. Rumah Sakit Purusada diduduki dan gedung pemerintah tidak luput dari serangan Jepang.

Tanggal 15 Oktober 1945 Gedung Gubernur diserang dan diduduki. Mr. Wongsonegoro yang berada dalam gedung ditawan, kemudian dibawa ke Asrama *Kido Butai* di Jatingaleh. (66). Sudah jelas maksud penawanan Mr. Wongsonegoro ini sebagai tindakan pembalasan atas penawanan Jendral Nakamura oleh pemuda pemuda Magelang.

Setiap gerakan pembersihannya di kampung pasukan Jepang selalu membunuh orang muda. Hal ini menimbulkan kemarahan setiap pemuda, sehingga tawanan Jepang yang berada di penjara Bulu tidak luput dari kemarahan para pemuda para tawanan Jepang itu di Bunuh semua. Di dalam penjara Bulu itu terdapat tawanan orang Belanda – Indo tetapi mereka tidak diapa-apakan.

Setelah mendengar, bahwa penjara Bulu juga dijadikan tempat tawanan Jepang, pasukan *Kido Butai* di bawah komando Kapten Wada dibantu oleh Sersan Tanaka dan Sersan Oki mengadakan serangan. Penjara Bulu dapat diduduki dan Kapten Wada terkejut setelah memasuki penjara, karena para tawanan telah mati terbunuh. Bersama sama Sersan Tanaka, Kapten Wada kembali ke Jatingaleh, ke markas *Kido Butai*, tempat Mr. Wongsonegoro ditawan bersama Dr. Soekardjo, Kepala R.S. Purusara. Setelah menjumpainya, dengan sangat marah Kapten Wada menampar Mr. Wongsonegoro, lalu mengajaknya untuk menyaksikan para korban di penjara Bulu.

Dengan perasaan khawatir Mr. Wongsonegoro menyampaikan pesan kepada Dr. Soekardjo untuk menyampaikannya kepada Ibu dan menyerahkan kunci lemari besi. Sesampainya di penjara Bulu, Mr. Wongsonegoro dan Drs. Soekardjo disambut pasukan Kido dengan mengacungkan senjata ke hadapannya karena marahnya. Namun Mr. Wongsonegoro diberi perlindungan Sersan Tanaka, yang mengancam prajurit-prajuritnya akan ditembak apabila berani mengganggunya. (60), (51). Mr. Wongsonegoro dan Dr. Soekardjo menyaksikan sendiri semua korban Jepang yang telah dibunuh oleh pemuda pemuda. Kemudian dibawa ke salah satu tempat.

Keesokan harinya tanggal 16 Oktober 1945, Jepang menambah pasukan tempur untuk memperkuat gerakannya. Tetapi para pemuda juga mengerahkan balabantuan dari segala penjuru. Dari sebelah barat datang dari Kendal dan Weleri dan dari timur datang bantuan dari Demak, Kudus, Pati, Tayu dan Purwodadi. Juga bantuan dari Ambarawa, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto, dan Solo. Semua memasuki kota Semarang dan ikut memperkuat pertahanan.

Pasukan BKR Pati di bawah pimpinan Mulyono ditugaskan untuk menguasai sektor Kebon Laut, terus menyerang ke arah Selatan, hingga Setasiun Tawang. Pasukan Partono dari Pati dengan massa rakyat terus menyerang dari Stasiun Tawang ke daerah Jl. Letjen Suprpto. Pasukan Polisi pimpinan Sutoyo menyerbu dari Jln. Letjen Suprpto terus ke Mlaten.

Pasukan Mataram dari Yogyakarta bersama dengan pasukan Polisi Purwodadi pimpinan Weeston dan Barman ditugaskan di Mlaten sampai Rejosari kemudian bergerak terus ke Karangtempel. (5, h. 2).

Daerah pelabuhan Semarang dipertahankan oleh pasukan TKR Laut pimpinan Achmad Dipo. Pasukan Kido berhasil menduduki pelabuhan, sedang sebagian pasukan TKR Laut mengundurkan diri. Pasukan TKR Laut pimpinan Agus Subekti terlibat pertempuran di sekitar Gereja Blenduk.

Pada tanggal 17 Oktober 1945, sekitar jam tujuh malam pasukan Indonesia, mengadakan serangan mendadak yang tidak diduga sama sekali oleh Jepang, sehingga satu per satu daerah yang telah diduduki Jepang dapat direbut kembali. Untuk menolong korban perang yang begitu banyak itu Dr. Subiyakto dan Dr. Darma Setiawan membentuk pos PMI. Anggotanya hampir seluruhnya terdiri dari karyawan Rumah Sakit Purusara. (39, h. 177, (56).

Pertempuran hari kedua sampai ke empat berlangsung sangat seru. Kedua pihak banyak jatuh korban. Nilai-nilai perike-manusiaan sudah hilang sama sekali. Kampung Batik dibakar musuh hingga semua rumah boleh dikatakan habis. Penduduk mengungsi ke daerah yang lebih aman dan tidak sedikit yang menjadi korban perang yang ganas itu. Namun semua itu tidak menakutkan para pemuda yang mempertahankan kemerdekaannya. Melihat begitu gigih semangat perlawanan pemuda, akhirnya pasukan Jepang yang bermarkas di bekas kantor *Semarang Kikai* melarikan diri. Hal ini merupakan kemenangan gemilang bagi para pemuda. Api yang mengamuk di kampung Batik dan kampung Jaksa segera dipadamkan oleh penduduk sambil menolong para korban. (60), (51).

Ketika perlawanan sedang berlangsung, Mr. Wongsonegoro dan Dr. Soekardjo berusaha mengadakan perundingan gencatan senjata dengan pihak Jepang. Diantar Sersan Tanaka mereka pergi ke markas *Kido Butai*. Dalam perundingan tersebut kedua pihak menyetujui gencatan senjata, namun mengenai perletakan senjata menjadi sulit penyelesaiannya. Para pejuang Indonesia menolak perletakan senjata.

Mr. Wongsonegoro, Sutrisno Sudomo dan Sersan Tenaka mengadakan kontak dengan para komandan pejuang Indonesia. Di sektor Barat, di sekitar jembatan Banjir Kanal bertemu dengan pasukan Sartono dan Komandan Polisi daerah Kendal, Sukarno Djojonegoro. Mereka ingin juga bertemu dengan Haji Umar Effendi, Abdulmutalib dan Muchrom, komandan pasukan rakyat dari daerah Tugu, namun tidak berhasil.

Sementara itu pada tanggal 18 Oktober 1945 para utusan dari Jakarta terdiri dari Mr. Sartono, Mr. Kasman Singodimedjo, Dr. Kodiati dan Soeliodikoesoemo datang di Semarang. Bersama mereka juga datang Jendral Nomura, Komandan Tertinggi pasukan Jepang beserta staf. Sekitar jam 15.00 diadakan perundingan di Candi Baru antara Jendral Nomura, Mayor Kido, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Wongsonegoro. (66, h. 6). (Mr. Wongsonegoro, Peristiwa Semarang, hal. 6).

Di dalam perundingan itu delegasi Indonesia menolak menyerahkan senjata sekalipun mendapat ancaman dari Jendral Nomura. Perundingan tidak membawa hasil apa apa. Sementara itu pada tanggal 19 Oktober 1945 jam 7.45 di pelabuhan Semarang telah mendarat kapal perang Sekutu "AMS Glenroy" yang mengangkut pasukan Sekutu, terdiri dari pasukan Inggris dari Brigade ke-37 yang sebagian besar terdiri dari serdadu Gurkha, di bawah pimpinan Brigade Jendral Bethel, yang bertugas melindungi tawanan Sekutu dan menerima penyerahan tawanan Jepang. (66), (63, h. 320).

Di Markas pejuang Indonesia di Ungaran, tidak lama kemudian telah datang utusan pemuda dari Yogyakarta terdiri dari Soedibyo, Soedarsono, Tarsono, Rudjito dengan membawa serta Jendral Nakamura dan Letnan Saiki.

Di markas Djatikoesoemo, diselenggarakan pertemuan antara utusan Yogyakarta dan Mr. Kasman Singodimedjo serta Mr. Satono kemudian dilanjutkan di markas *Kido Butai* Jatingaleh, untuk merundingkan masalah senjata seperti telah dijanjikan oleh Mayor Jendral Nakamura, Mayor Jendral Nakamura telah menjanjikan akan menyerahkan senjata Jepang kepada pihak Indonesia. Namun perundingan ini menjadi tidak berguna lagi, karena pada hari itu diadakan perundingan dengan pihak Sekutu. Perundingan dilaksanakan di Hotel du Pavillon (Hotel Dinya Puri). Dari pihak Indonesia selain, para utusan dari Jakarta juga hadir Mr. Wongsonegoro dan Mr. Koentjoro. (33, h. 5).

Perlu diterangkan bahwa pada saat itu dilegasi dari Semarang baru saja dikeluarkan dari tahanan markas *Kido Butai*. Ja di pakaiannya tidak rapi, kotor ada yang tidak sempat mengenakan sandal. Perundingan itu berjalan sangat cepat dan menghasilkan perintah penghentian tembak menembak. Dengan adanya perundingan itu maka berakhirlah Pertempuran Lima Hari di Semarang yang heroik itu.

Pasukan Jepang menyerahkan diri kepada Sekutu. Perintah penghentian tembak menembak segera disiarkan melalui konvoi perdamaian. Iring-iringan kendaraan dari misi perdamaian berkeliling kota dan kampung tempat pertahanan para pejuang, menyampaikan perintah penghentian tembak menembak. Tentara Sekutu terdiri dari pasukan Inggris dari Brigade ke-37 segera menggantikan kedudukan pasukan Jepang.

3. Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan (*Badan Keamanan Rakyat, Kelaskaran*)

Setelah berita Proklamasi Kemerdekaan tersebar luas ke daerah daerah, maka pada tanggal 28 Agustus 1945 di Semarang dibentuk Komite Nasional Daerah Semarang dan Mr. Wongsonegoro diangkat sebagai ketuanya. Komite Nasional Daerah juga dibentuk di daerah daerah pada tingkat kabupaten, kawedanan, dan kecamatan. Untuk daerah Kotamadya Semarang ditunjuk Mr. Koentjoro sebagai ketua dan Dr. Soedjono Djoened Poesponegoro dan Bambang Soeprapto sebagai Ketua Muda. Kemudian untuk menjaga keamanan dan keselamatan penduduk dan tugas mempertahankan wilayah, dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

BKR dibentuk di daerah daerah mulai dari daerah karesidenan, kabupaten atau kotapraja (kotamadya), kawedanan dan kecamatan, desa, sampai lingkungan rukun tetangga. Anggota anggotanya terdiri dari para bekas Peta, Heiho, Kaigun, Knil serta pemuda lain yang berminat menggabungkan diri. Kebanyakan mereka adalah bekas *Seinendan Keibodan, Gakutotai* yang pernah mendapat pendidikan kemiliteran.

BKR Semarang dipimpin oleh Soetrisno Soedomo dan Hendropranoto. Mengingat wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau maka untuk lengkapnya BKR ini dibagi menjadi BKR Darat dan BKR Laut.

BKR Laut daerah Semarang dipimpin oleh Soemarno, M. Nazir, O.B. Sjaaf, B. Djatmiko, Legowo, Marsis, Daruno, Achmad Dipo, Agus Subekti, Widagdo, Omar Said, Supardi dan Saleh Sastra Amidjaja.

Di samping BKR yang merupakan badan resmi, di kalangan pemuda juga terbentuk Barisan Kelaskaran. Angkatan Muda Republik Indonesia, merupakan wadah kelaskaran pemuda di Semarang dengan pimpinannya, antara lain S. Broto dan Soetoyo Arcundata. Hampir di tiap kantor, jawatan, dan pabrik didirikan Barisan pemudanya. Terkenal sekali ialah AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api dan Angkatan Muda PTT. Mereka menguasai dan melaksanakan komunikasi ke daerah-daerah. Di kalangan kaum agama juga dibentuk barisan-barisan pemuda, seperti Barisan Hizbullah. Kemudian juga terbentuk organisasi lainnya, seperti PESINDO, BPRI dan lain-lain. Di kalangan pelajar sekolah menengah, mula-mula berdiri berbagai organisasi pelajar dengan nama Gabungan, misalnya *Gabungan (Pelajar) Sekolah Menengah Semarang (Gasemse)*, *Gasempa* (Pati) dan sebagainya.

Di Pekalongan BKR dipimpin antara lain oleh H. Iskandar Idris ex *Dai Danco* Pekalongan, Mr. Besar ex *Syucokan* (Residen) Pekalongan, Kyai Haji Syafii dari golongan Ulama, R. Wediono ex *Cudanco Daidan* Pekalongan, H. Soedarmo Djajadiwangsa ex *Sydanco* dan R. Soenaryo, Kepala Polisi Karesidenan Pekalongan. BKR Pekalongan telah diuji kemampuannya dalam Pertempuran Tiga Hari di Pekalongan (3 s.d. 6 Oktober 1945) melawan pasukan Jepang dengan kemenangan besar. Kemudian BKR berkembang menjadi TKR dengan H. Iskandar Idris sebagai Komandan Brigade VII dan Resimen XII, yang kemudian diganti dengan Resimen XVII yang berwilayah hukum di daerah Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kendal.

Setelah mengakhiri tugas dalam Pertempuran Tiga Hari di Pekalongan Resimen XVII mendapat tugas mengawal tawanan Jepang ke Purwokerto untuk diserahkan kepada Jendral Sudirman ex *Baidanco* Purwokerto. (38).

4. Partisipasi Masyarakat

Dalam situasi perang melawan pasukan Jepang penduduk tetap bertahan di lingkungan kampungnya, sambil bersikap waspada. Setiap saat maut mengintai dan nyawapun dengan tiba tiba dapat melayang. Di jalan jalan besar hanya nampak truk truk dan mobil mobil baja Jepang. Kehidupan ekonomi terhenti sama sekali.

Pasar sunyi senyap, tidak ada pedagang yang membuka usahanya. Bahan makanan tidak masuk ke kota, sehingga penduduk sudah mulai kelaparan. Di berbagai tempat sudah terasa kekurangan bahan makanan. Dalam keadaan demikian, di kalangan sementara orang ada kalanya timbul pikiran ingin minta bahan makanan pada orang orang yang berada. Selama mereka minta dengan baik, mereka diberi bantuan dengan keiklasan. Tetapi jika ada orang yang memaksa pada orang lain untuk menyerahkan bahan makanan, hal ini dapat berbahaya. Di dalam keadaan yang mencekam kehidupan masyarakat ini, Sayuti Melik dan Oei Tiong Djoe berusaha membuka gudang gudang tempat penyimpanan bahan makanan Jepang di kota Semarang untuk dibagikan kepada rakyat.

Satu hal yang perlu dicatat, dalam kesusahan dan musibah yang tiada putus-putus nya itu rasa solidaritas di kalangan rakyat justru berkembang. Banyak orang yang mampu telah membantu orang orang yang sedang menderita, sedangkan penduduk kampung yang mampu mengirimkan sebagian bahan makanan yang dimilikinya. Masyarakat di luar kota Semarang, sangat memprihatinkan nasib saudara-saudaranya yang terancam kelaparan dan bahaya.

Dapur umum terdapat di mana-mana untuk membantu para pemuda dan rakyat pejuang. Dengan berbagai jalan mereka sem-

pat membantu para pejuang. Semangat solidaritas sangat menonjol waktu itu. Dr. Darma Setiawan dan Dr. Subiyakto mendirikan Barisan Palang Merah untuk menolong karbon pertempuran.

Dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang Barisan Palang Merah memberikan jasa yang tidak kecil. Pasukan bantuan dari luar kota ditampung di langgar (surau) dan dijamin oleh dapur umum.

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI DAERAH

Pada tanggal 19 Oktober 1945 Jam 7.45 telah mendarat kapal perang Sekutu "HMS Glenroy" yang mengangkut pasukan Sekutu terdiri dari pasukan Inggris dari Brigade ke 37 di bawah komando Brigadir Jendral Bethel. Sebagian besar pasukannya terdiri dari tentara Gurka.

Kedatangan tentara Sekutu telah menghentikan Pertempuran Lima Hari di Semarang. Keesokan harinya tentara Sekutu menduduki lapangan udara Kalibanteng (sekarang L.U. Ahmad Yani) yang dipertahankan para pemuda pejuang. Pertempuran melawan pasukan Jepang baru saja selesai, telah disusul pertempuran melawan tentara Sekutu. Di Kalibanteng terdapat para tawanan perang bekas serdadu KNIL. Mereka dapat dibebaskan oleh tentara Sekutu.

Diantara rombongan tentara Sekutu yang mendapat di Semarang, terdapat pula tentara Belanda yang menggunakan seragam dan senjata Amerika. Pasukan NICA-Belanda sudah jelas bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Sehubungan dengan ini, Presiden Soekarno (menurut *Associated Press*) telah mengirim protes kepada Presiden Truman (USA), bahwa pasukan Belanda telah menggunakan seragam militer Amerika dan senjata Amerika guna kepentingan sendiri untuk menekan perjuangan RI. (35, h. 60).

Setelah menduduki lapangan udara Kalibanteng, tentara Sekutu melanjutkan gerakannya ke Magelang. Para pejuang sesudah mengetahui, bahwa tentara Belanda ikut dalam gerakan tentara Sekutu yang bermaksud mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia, mulai menahan gerakan tentara Sekutu. Terjadi pertempuran antara para pemuda pejuang melawan tentara Sekutu. Tentara Sekutu yang sudah berada di Magelang dikepung.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 Pertempuran Magelang meletus. Angkatan Udara Inggris (RAF) dengan pesawat Thunderbolt berangkat ke Magelang mengadakan dropping amunisi dan perbekalan pangan kepada pasukan Sekutu yang sudah berada dalam kepungan rakyat. Kota Magelang mendapat serangan udara bertubi tubi, namun tidak dapat mematahkan semangat pertempuran para TKR dan pemuda. Dari daerah mengalir bala bantuan untuk rakyat Magelang. Resimen Sarbini dengan berkekuatan lima batalion, antara lain Yon Yani, Yon Suryosumpeno, Yon Kusen memperkuat pertahanan rakyat. Dari Purwokerto datang Resimen I Yon widjajakusuma di bawah komando Letkol Isdiman. Dari Yogyakarta Yon Suharto dan Yon Sardjono segera membantu. Melihat perlawanan rakyat yang gigih itu tentara Sekutu terpaksa mengadakan penghentian tembakan (*Ceasefire*) pada tanggal 3 Nopember 1945 diadakan perundingan gencatan senjata antara RI dan Sekutu. Gencatan Senjata tidak berlangsung lama dan tanggal 9 Nopember 1945 pertempuran berkobar lagi. Pertempuran kali ini tidak berpusat di Magelang saja, melainkan meluas ke mana mana. Setiap ada pemusatan tentara Sekutu, di situ terjadi pertempuran.

Pada tanggal 18 Nopember 1945 pertempuran berkobar lagi di Semarang. Dalam pertempuran di Kepandean, Semarang TKR dan pemuda pejuang tidak hanya melawan tentara Sekutu, melainkan juga melawan pasukan Jepang. Pemuda pejuang mengepung pasukan Inggris, sehingga mereka putus hubungan satu sama lain. Inggris mengerahkan enam buah pesawat Thunderbolt yang melayang layang di Semarang dan bom berjatuhan.

Dengan berkobarnya lagi pertempuran di Semarang tentara Inggris tidak bisa memusatkan lagi pertempuran di Magelang.

Tanggal 21 Nopember 1945 Magelang dapat direbut kembali oleh TKR dan pemuda pejuang. Tentara Inggris lalu memusatkan pertahanannya di Ambarawa. Pemancar RRI Yogyakarta dan Solo yang selalu memberitakan jalannya pertempuran pada 25–27 Nopember 1945 mendapat serangan udara. Dalam serangan udara itu tujuh orang tewas dan 40 orang luka luka. Sekarang para pejuang memusatkan kekuatannya untuk merebut kembali kota Ambarawa.

Di sebelah kiri jalan Margoagung dipertahankan oleh Batalyon Hadrongi di bawah komando Mayor Iman Hadrongi. Bat. Suharto dan Bat. Sugeng Tirtosiswoyo bersiap di sebelah kanan jalan. Di sebelah barat kota Ambarawa ditempati pertahanan Letkol Isdiman. Pertempuran sengit segera terjadi. Serangan mortir Sekutu dibalas oleh serangan mortir dan houwitzer dari pasukan Bat. Suharto, Bat. Sardjono dan Bat. Sugeng. Tentara Sekutu di Ambarawa sudah terkepung. Hubungan Ambarawa dengan Semarang terputus. Satu satunya jalan untuk mengirim perbekalan ialah melalui Udara. Tanggal 26 – 28 Nopember 1945 Sekutu mengadakan serangan Udara secara bertubi-tubi. Di desa Kelurahan, Letkol Isdiman gugur karena serangan bom Sekutu. Jenazahnya dimakamkan di Yogyakarta. Nama Letkol Isdiman kemudian diabadikan dalam Monumen Palagan Ambarawa. (52, h. VII). Komando pertahanan rakyat digantikan oleh Kolonel Sudirman.

Sementara itu di Semarang pertempuran masih berlangsung. Bantuan rakyat dari Purworejo, Karanganyar dan tempat lain mengalir terus. Pasukan Berani mati dari Kudus, Demak, Pati dan lain-lain menyerbu Semarang dan mengadakan gerakan Sapu bersih. Kapal perang Inggris tetap menembaki dari lautan ke benteng pertahanan R.I.

Pertempuran Ambarawa mulai mengganas dan Inggris membakari rumah penduduk. Pada hari Jum'at tanggal 14 Desem-

ber 1945 tengah malam, pasukan Haji Muchlis dari Cilacap dengan 60 orang pasukannya bergerak dari Bukit Pasikan memasuki kota. Pertempuran terjadi di dalam kota. Kemudian disusul serbuan TKR dari segala penjuru. Pasukan rakyat dari Purwokerto dan Banyumas dan diikuti pasukan dari Yogyakarta, Kedu, Solo dan Salatiga masuk dari jurusan Ngempin Sumowono dan Banyubiru.

Tanggal 16 Desember 1945 musuh keluar dari Ambarawa dengan meninggalkan perbekalan perangnya. Siang harinya seluruh kota sudah dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Indonesia. Berpuluh puluh senjata dan berpeti peti peluru dapat dirampas. Dalam pertempuran Ambarawa yang berlangsung selama 24 hari, turut bertempur barisan putri dari Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Widayati.

Pada tanggal 17 Desember 1945 karena jasanya Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Keamanan Rakyat dengan pangkat Jenderal. Pengangkatan ini didasarkan atas keputusan rapat antara Presiden, Wakil Presiden, Dewan Menteri, Anggota anggota Markas Tertinggi TKR, Komandan Divisi dan Resimen Jawa Madura.

Sementara itu pertempuran di Semarang bertambah menghebat. Inggris tidak hanya menggunakan tentara Gurkha, melainkan tentara Belanda, pasukan Jepang dan masih ditambah lagi dengan datangnya tentara Chungking. Barisan rakyat dengan bekal semangat juang "Merdeka atau mati", melawan tentara gabungan Sekutu yang menggunakan persenjataan modern. Belanda terus mengirimkan pasukan marinir ke Indonesia demikian menurut berita V.O.A. (*Voice of America*, 30 Desember 1945). Belanda telah mendaratkan 2000 pasukan marinir Indonesia.

Pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta. Beliau berdua mendapat sambutan hangat dan dielu-elukan rakyat.

Pada tanggal 16 Januari 1946 di Solo diadakan pertemuan

oleh barisan pemuda untuk membentuk Persatuan Perjuangan. Mereka yang hadir antara lain : Ibnu Parna (Pesindo), Wali Al-fatah (Masyumi), Ir. Sakirman (Dewan Perjuangan Jateng), Mr. Abdulmajid Joyodiningrat (PI), Jendral Sudirman (TKR), At-maji (TKR Laut) dan Tan Malaka. Di dalam pertemuan ini telah dirumuskan program perjuangan untuk mempertahankan ne-gara.

Sementara itu hari peringatan lima bulan Negara Republik Indonesia dirayakan secara besar besaran. Defile militer diada-kan dengan Sultan Hamengku Buwono IX serta Pakualam se-bagai Inspektur upacara. Upacara ini mempunyai arti untuk menggalang persatuan rakyat dan bahwa negara Republik Indo-nesia merupakan manifestasi dari kebulatan tekad bangsa Indo-nesia.

Sementara itu usaha Belanda untuk memutar-balikkan keadaan di Indonesia berjalan terus. *Tweede Kamer* memben-tuk Komisi Parlemen Belanda untuk menyelidiki cara cara van Mook mengurus keadaan di Indonesia. Berita ini dianggap sepi oleh kalangan Republik Indonesia dan dianggap sebagai taktik Belanda saja. Menteri Seberang Lautan Belanda Logeman men-uduh pemerintah Kabinet Syahrir sebagai lanjutan komidi Jepang. Pada tanggal 25 Januari 1946 Tentara Keamanan Rak-yat diubah menjadi *Tentara Republik Indonesia* atau disingkat *TRI*. TRI merupakan satu satu organisasi militer di Indonesia dan disusun secara militer internasional. (35, h. 207).

Untuk menyempurnakan organisasi militer, Presiden mem-bentuk Panitia Besar Penyelenggara Organisasi Tentara, guna menyusun peraturan peraturan, antara lain mengenai :

1. Bentuk Kementerian Pertahanan
2. Bentuk ketentaraan
3. Kekuatan tentara
4. Organisasi tentara
5. Pembatasan dan hubungan kekuasaan tentara
6. Peralihan dan keadaan TKR ke keadaan susunan TRI

7. Kedudukan laskar dan barisan bersenjata dari Badan Ketentaraan yang bukan Pemerintah.

Kemudian TRI bagian Laut pada tanggal 19 Maret 1946 diganti namanya menjadi ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia).

Dengan demikian organisasi ketentaraan di Indonesia makin sempurna. Sedangkan untuk barisan kelaskaran tetap dibina dengan mendirikan ASRAMA R.I. guna melatih kemiliteran kepada para pemuda selama 25 hari. Yang dilatih ialah : Laskar Rakyat, Barisan Banteng, Pesindo, Hisbullah, Sabililah, Laskar Buruh, Laskar Tani dan lain-lain.

Tidak lama sesudah Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta (4 Januari 1946) kemudian Kabinet Sutan Sjahrir pada tanggal 6 Februari 1946 pindah juga ke Yogyakarta. Dengan demikian Yogyakarta dijadikan Ibukota Republik Indonesia. Semua kegiatan pemerintahan diatur dari Yogyakarta.

Di samping perjuangan di dalam negeri tidak kalah pentingnya perjuangan diplomasi di luar negeri Perdana Menteri Sutan Syahrir mengirim utusan ke luar negeri, terdiri dari Dr. Sudarsono, Mr. Suwandi dan Mr. A.K. Pringgodigdo didampingi oleh Mr. Z. Zain dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai penasihat. Pada tanggal 7 Februari 1946 untuk pertama kalinya masalah Indonesia dibicarakan di Dewan Keamanan (P.B.B.) atas usul Dr. Demitri Manulsky Wakil dari Ukraina. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Elco van Kloffens.

Delegasi Inggris dipimpin Bevin yang membela Belanda dan menuduh Indonesia menculik Jendral A.W.S. Mallaby. Sekalipun dalam Sidang itu belum membawa hasil, namun nama dan perjuangan bangsa Indonesia mulai dikenal di forum internasional.

Sementara itu pertempuran di kota-kota antara pasukan Indonesia melawan Nica Belanda yang dibantu oleh tentara Inggris, Jepang dan kemudian Cungkung masih berlangsung terus.

Pada tanggal 1 Maret 1946 pertempuran di pinggiran kota Semarang bertambah seru. Belanda menggunakan senjata modern dengan tembakan meriam, mortir dan peluru roket secara membabi buta. Sejak itu sedikit demi sedikit Semarang mulai dikosongkan para pejuang. Pusat pusat pertahanan mulai dialihkan ke daerah pinggiran kota.

Tanggal 16 Mei 1946 Inggris menyerahkan kota Semarang kepada Belanda. Hal ini menunjuk secara jelas, bahwa Inggris telah diperalat oleh NICA – Belanda dalam usahanya menguasai kembali daerah Indonesia. Tetapi penjajahan Belanda selama beratus ratus tahun dan ditambah lagi dengan penderitaan dan siksaan di masa pendudukan tentara Jepang selama tiga setengah tahun, telah menjadikan rakyat Indonesia makin sadar apa arti hidup di bawah penjajahan bangsa lain. Rakyat memang sudah matang untuk merdeka, siap pula membela Proklamasi Kemerdekaan, dengan darah, keringat dan air mata. Pasukan pejuang Indonesia dengan senjata seadanya melawan pasukan yang terlatih dan pengalaman bertempur dengan persenjataan yang lengkap, telah memakan korban jiwa putra-putra Indonesia dalam jumlah yang besar. Tetapi bangsa Indonesia pantang mundur dan melawan terus kepada siapa saja yang berusaha meniadakan kemerdekaan Indonesia. Harta tenaga dan jiwa disediakan untuk membela Republik Indonesia.

Sementara itu dengan makin besarnya kekuasaan pasukan Sekutu dan NICA–Belanda di kota Semarang, maka penduduk banyak yang meninggalkan kota, sehingga kota Semarang boleh dikatakan kosong kantor, perusahaan, sekolah, bengkel, pasar dan lain-lain ditutup.

Namun, sebenarnya di kota Semarang masih ada sebagian penduduk, termasuk pegawai, guru, petugas rumah sakit dan sebagainya, yang tetap bertahan. Walau pun secara fisik mereka hidup di daerah pendudukan yang dikuasai musuh, tetapi semangat dan jiwa mereka tetap Merah-Putih dan tetap republikain. Mereka itu tidak bekerja pada kantor dan perusahaan Belanda, tetapi tetap berdikari. Di antaranya ada yang mencoba

berdagang di pasar, membuka kedai, membuka kursus dan sebagainya, asal dapat memenuhi nafkah keluarga dengan sangat sederhana.

Pemerintahan Republik Indonesia di Semarang sejauh dan sekuat mungkin tetap diusahakan berdiri. Di kota Semarang yang sudah diduduki Sekutu dan NICA—Belanda itu tetap berdiri *Badan Pemerintah Republik Indonesia*, disingkat BAPRIS yang berkantor di dekat gedung RRI, dipimpin oleh Bp. Mr. Muhammad Ichsan (kemudian menjabat Sekretaris Negara pada zaman Presiden Soekarno di Jakarta).

BAPRIS terasa pengaruh dan kewibawaannya hingga di kelurahan-kelurahan yang langsung membina warga masyarakat. BAPRIS juga berusaha untuk memelihara jiwa dan semangat Republik dengan menerbitkan buletin bernama *Warta Semarang* yang diasuh oleh tenaga-tenaga republikein, di antaranya Gadis Rasyid. Penyebaran distribusi buletin *Warta Semarang* dilakukan oleh para pelajar sekolah menengah yang bekerja atas dasar pengabdian. Sebenarnya seluruh karyawan BAPRIS dan pemimpin-pemimpinnya, di antaranya Ibu Rusiah Sardjono (kemudian menjadi Menteri Sosial) memang bekerja atas dasar perjuangan dan pengabdian.

BAPRIS juga membina pendidikan yang tetap berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia di Yogyakarta. Selain beberapa Sekolah Dasar, BAPRIS juga mengelola dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jalan Pemuda, di bekas gedung Kantor Perwakilan Depdikbud sekarang dan di Jalan Sidodadi, serta sebuah Sekolah Menengah Tinggi (SMT) di Jalan Pemuda. Kurikulum dan penyelenggaraannya seluruhnya mengikuti pola yang digariskan pemerintah RI di Yogyakarta, bahkan bahan ujian akhir dan ijazahnya juga didatangkan dari Yogyakarta. Perlu disebut tokoh-tokoh pengajarnya yang bekerja atas dasar pengabdian dan perjuangan belaka, di antaranya Bapak-bapak: Drs. Wirasto, Ir. Gazali, Soetadi, Drs. Rawuh Susmono, Hendrotamtomo,

Alfred Simanjuntak, Ir. Husein, Ilyas, dan Ibu-ibu: Mimi Mustari, Widowati, Mud Tisnamurti.

Pada zaman BAPRIS, Rumah Sakit Purusara menjadi tumpuan dan kekuatan kaum republikein di Semarang. Sejak awal masa Revolusi Kemerdekaan, Purusara tetap mengibarkan semangat juang kemerdekaan dan tidak pernah lekang dan luntur, walaupun kota Semarang sudah diduduki pasukan sekutu dan Nica – Belanda. Dr. Darma Setiawan, tokoh pemerintah RI pernah datang di ruangan rapat Purusara untuk memberi penerangan tentang perjuangan RI di hadapan kaum republikein yang juga dipadati oleh para pelajar. Para pelajar SMP/SMT BAPRIS di Semarang, Juwono, selalu berusaha meneguhkan semangat kemerdekaan antara lain dengan mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun RI setiap tanggal 17 Agustus dan menerbitkan majalah sekolah yang berisi jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945.

Kepanduan juga didirikan di Semarang dengan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 dan menggunakan nama pahlawan nasional, seperti *kelompok Dokter Sutomo* di Pendrikan. Gugus kepanduan ini membantu kongres PGRI di Yogyakarta menjelang pengakuan kedaulatan dengan mempersiapkan akomodasi dan perlengkapan bagi para anggota PGRI dari daerah yang transit di kota Semarang (17).

BAB IV PERJUANGAN DI DAERAH

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I.

Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaannya, maka rakyat Indonesia bertekad untuk mempertahankannya. Gangguan, dan usaha untuk menghilangkan kemerdekaan Indonesia datang dari dalam dan luar negeri. Usaha dari dalam untuk merebut kekuasaan terjadi juga di wilayah Jawa Tengah. Tentunya tidak semua kota dijadikan pusat gerakan untuk merebut kekuasaan. Hal ini dipertimbangkan oleh kaum pemberontak atas dasar kokohnya pertahanan TNI, nilai strategisnya, letak suatu daerah, pendukungnya, keadaan ekonomi dan sebagainya. Rakyat Jawa Tengah yang cinta akan kemerdekaan berjuang menumpas pemberontak ataupun serangan dari luar negeri. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi hampir di semua wilayah dan kota di Jawa Tengah. Sebelum terjadinya Aksi Militer Belanda I, keadaan kota dan wilayah di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Kota Pekalongan

Kepala Kemakmuran Karesidenan Pekalongan, pada bulan Nopember 1946 sampai bulan Juli 1947 dijabat oleh Bapak Mochtar (kemudian menjabat Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah). Keadaan sosial ekonomi pada masa sebelum Aksi

Militer Belanda I sangat sulit, ditambah suasana genting dan suasana siap tempur menghadapi Belanda yang hendak merebut Indonesia kembali. Keadaan ekonomi yang sulit di daerah ini, disebabkan:

- a. Rakyat yang baru mengenyam kemerdekaan Indonesia digoncang dengan adanya Peristiwa Tiga Daerah (Brebès, Tegal – Pemalang).
- b. Penyembunyian bahan makanan pokok oleh sebagian golongan masyarakat yang menguasai perekonomian, sehingga menyebabkan harga barang membubung tinggi.
- c. Rakyat kurang perhatiannya terhadap penggarapan sawah, industri dan perdagangan, karena keadaan belum stabil dan rakyat sering berpindah tempat. Maka ada sebagian rakyat yang mudah dibelokkan ke arah hal-hal yang merugikan pihak pemerintah Indonesia. Banyak terjadi perampokan ke gudang-gudang tempat penyimpanan bahan makanan.

Pejabat pemerintah di Pekalongan berusaha mengatasi keadaan tersebut, agar terbina kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia dan juga terpeliharanya semangat perjuangan, kesanggupan bertempur melawan musuh, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Belanda). Untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, Badan-badan Perjuangan tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, antara lain: Hisbullah, Barisan Banteng, Badan Perjuangan Republik Indonesia (BPRI). Ada juga yang bersifat lokal/kedaerahan, misalnya: Pasukan Kyai Gede Atas Angin. Tujuan badan-badan perjuangan itu:

- a. mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
- b. menjaga keamanan daerah.

Tujuan yang baik itu ada kalanya dibelokkan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dan menyalahgunakan kekuasaan.

Kantor Kemakmuran Karesidenan Pekalongan selalu sibuk tiap hari, mengurus permintaan dari badan-badan perjuangan

yang mungkin dapat dikabulkan. Daerah Pekalongan tidak berjuang sendiri, tetapi bekerja sama dengan daerah lain; ini dibuktikan dengan adanya bantuan dari Pekalongan terhadap berdirinya Angkatan Laut di Tegal, pimpinan Darwis Jamin.

2. Kota Tegal

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengubah status bangsa dan negara kita, dari bangsa jajahan menjadi bangsa dan negara yang merdeka. Kemerdekaan yang diperoleh merupakan hasil perjuangan yang panjang Negara Republik Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dalam sejarahnya pernah memegang peranan penting dalam hubungan internasional dan juga dalam dunia perdagangan. Sudah sejak ribuan tahun dahulu, hubungan Asia bagian Barat dengan wilayah Asia bagian Timur dalam bidang perdagangan ikut mempengaruhi kedudukan negara kita. Perdagangan akan berjalan lancar, aman, bila keadaan laut aman. Keamanan laut perlu dijaga, agar dapat terjamin keamanan negara, karena wilayah negara Republik Indonesia itu terdiri dari.

- a. Wilayah darat
- b. Wilayah laut
- c. Wilayah udara

Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai alat Hankam bertugas pada matra laut memerlukan kekuatan armada yang kuat, guna dapat mengawasi perairan Indonesia. Untuk dapat memiliki armada yang kuat diperlukan beberapa syarat:

- a. tenaga ahli yang cukup
- b. materi persenjataan yang lengkap modern
- c. jiwa yang cinta pada laut

Maka pendidikan untuk keahlian dalam bidang kelautan adalah sangat erat hubungannya dengan perkembangan Angkatan Laut.

Sudah sejak tahun-tahun pertama berdirinya, ALRI telah menyelenggarakan tempat latihan dan sekolah-sekolah. Para perintis AL menyadari pentingnya tenaga ahli dalam pengem-

bangun. AL, sehingga meskipun dalam situasi yang berbahaya dan kritis seperti pada tahun 1948–1949, bidang pendidikan Angkatan Laut tetap mendapat perhatian dan tetap diselenggarakan. Selama perang kemerdekaan, ALRI telah mendirikan tempat-tempat pendidikan untuk calon tamtama, bintara, perwira di Jawa maupun di Sumatera. Lembaga Pendidikan di Tegal adalah *SEKOLAH ANGKATAN LAUT (SAL) Tegal*. Untuk mendidik calon bintara dan perwira AL, MBU Yogyakarta telah membuka Sekolah Angkatan Laut di Tegal. Tanggal 12 Mei 1946 SAL Tegal dibuka resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Hadir pada peresmian ini Wakil Presiden, para menteri, Panglima Besar, dan pejabat teras MB Yogyakarta.

Para siswa SAL terdiri dari pemuda-pemuda yang telah disaring dan memenuhi syarat sebagai pelaut. Para Instruktur terdiri dari perwira-perwira ALRI yang telah berpengalaman. Sebagai Komandan SAL diangkat Laksamana Adam, bekas Kepala Sekolah Pelayaran Tinggi Jakarta, Letkol R.S. Hadwinarso sebagai wakil Komandan, Mayor E.H. Thomas sebagai Perwira I, dan Mayor Djaelani sebagai Kepala Pendidikan. (12, h. 46).

Dengan dilancarkanya Aksi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947, SAL Tegal terpaksa mengundurkan diri dari kota Tegal. Selama Aksi Militer, pelajar-pelajar SAL bertugas di front Banjarnegara dan di pantai Parangtritis, sebagai penjaga pantai. Dalam menunaikan tugas di front, telah gugur beberapa pelajar SAL, di antaranya Kopral Pelajar Taufik dan Kopral Pelajar Subiyanto. Dengan tercapainya Persetujuan Renville pada bulan Januari 1948, pelajar-pelajar dan instruktur SAL Tegal ditarik dari front dan kembali ke depot pendidikan dengan mengambil tempat di Juana. Sebagai komandan SAL Juana diangkat Mayor Djaelani.

3. Kota Kebumen - Gombang

Jiwa dan semangat rakyat Kebumeri dapat dibanggakan. Mereka berjuang dengan gigih melawan Belanda pada masa

Aksi Militer Belanda I dan Aksi Militer Belanda II. Rakyat Kebumen menyadari sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, mempunyai kewajiban membela negara. Pembelaan terhadap negara dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947 – 1949 dapat dibuktikan dengan adanya:

- a. Makam pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan.
- b. Tugu peringatan sebagai bukti perjuangan rakyat Kebumen dalam mempertahankan kemerdekaan.

Semangat perjuangan rakyat menentang penjajahan di kota Kebumen dapat berkembang dan dibina, karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengalaman masa penjajahan yang dirasakan pahit dan getir tidak dapat dilupakan oleh rakyat Kebumen.
- b. Peristiwa nasional yang terdengar di Kebumen dapat membangkitkan semangat perjuangan, misalnya:
 - 1) Peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya
Semangat pahlawan, berjuang tidak mau menyerah ini ditiru pula oleh rakyat Kebumen.
 - 2) Peristiwa Marga di Bali 20 Nopember 1945
Banyak korban diderita antara lain: Letkol I Gusti Ngurah Rai.
 - 3) Peristiwa pertempuran Lima Hari di kota Semarang yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945.
 - 4) Korban keganasan Westerling di Makasar yang memakan korban jiwa sebanyak 40.000 orang.
- c. Kedatangan tokoh nasional di Kebumen yang memberikan wejangan berharga:
 - 1) Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 28 April 1946.
 - 2) Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo pada tanggal 26 Oktober 1946 dalam rangka memberikan pengertian kesadaran bernegara.
 - 3) Mr. Sartono, tokoh KNI Pusat, datang pada tanggal 29

Maret 1947. Memberikan ceramah sekitar persetujuan Linggarjati.

- 4) Panglima Besar Sudirman beserta pengawalnya tiba di Kebumen pada tanggal 25 Januari 1947.

Kedatangan tokoh nasional di Kebumen itu tepat pada waktu kota Gombong menjadi rebutan dan menjadi medan perang antara Belanda dengan Tentara Nasional Indonesia. Belanda berusaha merebut kota Gombong, karena mempunyai arti penting dalam pertahanan memerlukan tempat yang strategis. Maka peristiwa nasional yang mengandung nilai perjuangan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditambah kedatangan tokoh nasional memperkuat semangat dan mempertebal jiwa patriotisme rakyat Kebumen.

B. MASA AKSI MILITER BELANDA I

Belanda selalu berusaha menghancurkan negara Republik Indonesia. Berbagai daya upaya dari pihak Belanda dijalankan, misalnya dengan mengerahkan kekuatan militer dan mendirikan negara boneka. Siasat Belanda diarahkan ke daerah Indonesia Timur. Bulan Juli 1945 Konperensi Malino diadakan dengan tujuan menyusun kerangka ketatanegaraan federal. Usaha terus ditingkatkan dengan mengadakan Konperensi Pangkalpinang dan Konperensi Denpasar pada bulan Desember 1946 dalam rangka mendirikan Negara Indonesia Timur. Dengan pola yang sama, Belanda berusaha mendirikan negara boneka di Jawa dan Sumatera. (67, h. 29).

Ketika proses konsolidasi hasil Konperensi Malino masih berjalan, Belanda mendekati Pemerintah Republik Indonesia dengan mengadakan serangkaian perjanjian yang didahului dengan senjata dan Persetujuan Linggarjati. Hasil perundingan Linggarjati diumumkan pada tanggal 15 Nopember 1946, tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri dari 17 pasal. Isi naskah antara lain:

1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggara-

kan berdirinya sebuah negara, berdasarkan federasi dinamai Negara Indonesia Serikat.

2. Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan tetap bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. (13, h. 43).

Penghentian tembak menembak dan persetujuan Linggarjati telah memberikan kesempatan berlangsungnya timbang terima kedudukan Inggris kepada Belanda. Belanda terus meningkatkan ofensif politiknya. Lebih-lebih setelah konsep pendirian negara federal berhasil dilaksanakan di daerah Indonesia Timur, Belanda mulai mempersukar pelaksanaan Persetujuan Linggarjati dan telah mempersiapkan serangan terhadap Jawa dan Sumatra. Serangan Belanda terhadap delta Brantas pada bulan Maret 1947 merupakan langkah pertama ke arah rencana serangan umum. Pada *tanggal 21 Juli 1947* jam 0.00 dengan serentak Belanda melancarkan serangan umum ke seluruh daerah *de facto* Republik Indonesia. (10, h. 27).

Berita pertama dari Banyuwangi menyatakan pihak Belanda melakukan serangan dari darat dan udara atas Godong (antara Demak – Purwodadi). Penyerangan ke *Jawa Tengah* dilakukan oleh Brigade V di bawah komando Meir. Tujuan penyerbuan untuk dapat merebut daerah Divisi II pimpinan Jenderal Mayor Gatot Subroto. Guna menghambat kemajuan musuh yang datang dari Jawa Barat yang hendak merebut kota distrik Losari pada perbatasan Cirebon – Pekalongan, maka jembatan Cisanggarung diputuskan.

Daerah Brebes dipertahankan oleh Batalyon Kasimin dari Resimen B di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mohamad Susman yang bermarkas di Tegal. Resimen ini mempunyai tiga batalyon:

1. Batalyon Ribut di Tegal;
2. Batalyon Parwoto di Slawi,
3. Batalyon Sudrajat di kota distrik Balapulang, di pangkal kaki Gunung Slamet di pertigaan jalan raya ke Tegal Bumi-

ayu dan Belik – Bobotsari.

Ketiga batalyon ini sangat minimal persenjataannya, di setiap batalyon keadaan persenjataannya efektif kurang dari keperluan satu kompi. Daerah Brebes – Tegal merupakan pintu gerbang bagi serangan musuh menuju Banyumas dan Pekalongan. Selain tiga batalyon infanteri, terdapat pula beberapa pasukan ALRI di Tegal, dengan persenjataan sederhana, ditambah pula pasukan perjuangan seperti Hisbullah, Barisan Pemberontak RI yang sangat bersahaja. peralatannya.

1. Kota Tegal

Keadaan masyarakat di Tegal, sebelum terjadinya Aksi Militer Belanda I, boleh dikatakan belum tenteram dan belum stabil. Ketidak-stabilan situasi di kota Tegal pada waktu itu adalah akibat adanya Peristiwa Tiga Daerah yang melemahkan ketahanan nasional karena antara sesama bangsa Indonesia terjadi perebutan kekuasaan. Pertentangan yang tajam ini ditambah lagi dengan adanya ketidak-serasian antara golongan pribumi (Indonesia) dengan non pribumi (Cina) yang berjumlah besar. Akar pertentangan ini sudah lama sejak sebelum tahun 1942, disebabkan kesenjangan hidup yang lebar antara kedua golongan itu. Ekonomi selalu dikuasai oleh golongan non pribumi, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar dan menimbulkan kecemburuan sosial. Rakyat daerah ini hidup serba prihatin dan miskin, tetapi mempunyai keyakinan agama yang kuat dan tebal. Keadaan masyarakat belum pulih kembali dari luka-lukanya, ditambah lagi adanya serangan Belanda ke kota Tegal sehingga kota Tegal dapat dikuasai Belanda pada tanggal 26 Juli 1947. Belanda melakukan kanonade dari laut, sehingga banyak korban jatuh dan kerusakan berat, serta menekan pertahanan pihak Indonesia.

Kedatangan Belanda di kota Tegal disambut oleh sebagian golongan Cina yang membentuk komite *Po An Tui*. Keadaan serupa itu menimbulkan ketidak-serasian antara golongan Indonesia dengan golongan Cina.

Belanda tidak menemukan sesuatu yang berharga di kota Tegal, karena telah dibumi-hanguskan oleh tentara kita, sebelum meninggalkan kota Tegal. Akibat dari Aksi Militer I di kota Tegal, antara lain:

- a. Banyak pemuda Indonesia ditawan dan dibunuh.
- b. Pelabuhan kota Tegal rusak sama sekali, bengkel rusak, gudang terbakar.
- c. Pabrik tekstil yang pernah merajai di Indonesia dan dapat menghasilkan 60.000 yard tiap hari menderita kerusakan hebat, gedung terbakar.
- d. Gerbong kereta api, lokomotif, rusak dan ada yang hancur.

Satu per satu kota-kota di Jawa Tengah direbut dan diduduki oleh Belanda. Dan akhirnya sampai juga di kota Purworejo.

2. Kota Purworejo – Kebumen – Gombang

Ketiga daerah ini berada di bawah Divisi III pimpinan Jenderalla Mayor Susalit. Divisi III mempunyai 3 brigade dengan resimen dan 36 batalyon infanteri. Resimen 19 berkedudukan di Magelang dengan 4 batalyon, yakni:

- a. Tiga batalyon di Magelang
- b. Satu batalyon di Muntilan

Brigade "Mataram" pimpinan Kolonel Makasar berkedudukan di Purworejo mengkoordinasi 3 resimen, yaitu: resimen 20 berkedudukan di Purworejo dengan 4 batalyon, yakni 2 batalyon di Purworejo dan 1 (satu) batalyon di Kebumen dan 1 (satu) batalyon di Gombang. (24, h. 221).

Terlibatnya daerah Gombang dan Kebumen dalam Aksi Militer Belanda I dan Aksi Militer Belanda II, karena faktor posisi yang strategis dari daerah Kebumen, antara lain:

- a. Sebagai daerah Republik yang terletak di sebelah Barat dekat dengan perbatasan negara pasundan, di bawah Wali-negara Wiranatakusumah, sedangkan waktu itu pusat pemerintahan berada di Yogyakarta. Belanda, musuh yang

akan menyerang, bermaksud menduduki Yogyakarta, tentu melalui Gombong terlebih dahulu.

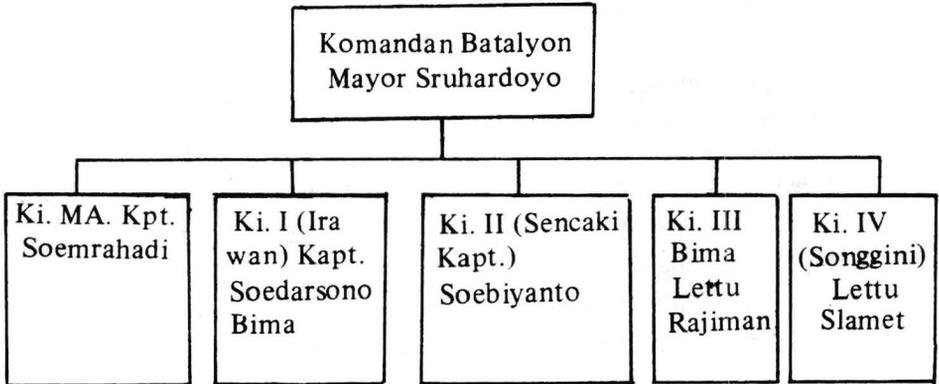
- b. Daerah Kebumen merupakan salah satu daerah Republik yang mempunyai markas besar di Gombong. Maka tidak dapat dipungkiri daerah Gombong menjadi daerah pertahanan sebelah Barat. Untuk dapat bergerak ke Timur, Belanda harus merebut kota Gombong dahulu.

Pada waktu Aksi Militer Belanda I meletus, dan kota Gombong dapat diduduki oleh Belanda, maka tentara kita mengepung tentara Belanda di sepanjang pertahanan Timur Gombong, daerah kecamatan Puring, Klirong, Podo Urip, Adimulyo, Karanganyar ke Utara sampai Kecamatan Karanggayam, dan sampai sebelah Utara kota Gombong. Pos Komando berada di kota Kebumen. Pertahanan Gombong dipertahankan oleh TNI bersama Badan-badan Perjuangan lainnya selama 1½ tahun. Korban dari tentara kita cukup banyak dan juga rakyat Kebumen.

Pada pertengahan tahun 1948 Tentara Batalyon 66 yang berada di Tangsi Lama Kebumen, mengalami reorganisasi atau rasionalisasi. Untuk penyempurnaan susunan Batalyon Tempur, dari dua Batalyon menjadi satu Batalyon tempur di bawah pimpinan Dan Yon Mayor Sruhardoyo. Sedangkan anggota yang tidak terpilih dalam Batalyon Tempur (Batalyon Mobil) dimasukkan di Tangsi Baru dan dibentuk Batalyon Territorial di bawah pimpinan Mayor Slamet. Dan Yon Batalyon Territorial merangkap sebagai Komandan Distrik Militer (KDM) Kabupaten Purworejo.

Batalyon Mobil atau Batalyon Tempur di bawah Dan Yon Mayor Sruhardoyo bertugas bertempur mendobrak musuh-musuh yang timbul dari pihak dalam dan luar. Batalyon Territorial/KDM bertugas di daerah (Sosial Politik), dan terjun ke dalam masyarakat, serta mengadakan hubungan erat dengan Pemerintahan Sipil.

Adapun skema Batalyon Tempur Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: (47, h. 18).



C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA

Kebijaksanaan Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin menerima perjanjian Renville, yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, sangat merugikan pihak Republik, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Kerugian pihak Republik:

1. Dalam bidang politik: Pemerintah Republik Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda pada Aksi Militer pertama. Wilayah Republik Indonesia tinggal 2/3 di Jawa dan 1/5 di Sumatra. Batas wilayah Republik Indonesia dengan daerah pendudukan itu terkenal dengan nama "garis van Mook".
2. Dalam bidang ekonomi: Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan kota-kota besar pusat perindustrian dan perdagangan kepada Belanda, sehingga memberi kesempatan

seluas-luasnya kepada Belanda untuk melakukan blokade ekonomi terhadap Republik.

3. Dalam bidang militer: Pemerintah Republik Indonesia harus menyerahkan kantong-kantong gerilya yang telah disusun atau kantong-kantong pertahanan kepada musuh. Umumnya kantong gerilya dibentuk di Jawa Barat. (3, h. 5).

Sebagaimana nasib Persetujuan Linggarjati yang kemudian dirobek-robek, demikian pula nasib Persetujuan Renville. Setelah melalui perundingan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN), pelaksanaan Renville menghadapi jalan buntu.

Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan nota kepada KTN mengenai pendirian Republik Indonesia:

1. Pemerintah Republik Indonesia telah mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati pendirian Belanda.
2. Petunjuk yang diberikan kepada Menteri Belanda terbatas kepada peninjauan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-syarat yang diajukan Belanda sehingga tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian lewat perundingan.
3. Pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan membentuk pemerintahan interim tanpa RI, tanpa berunding dengan RI di bawah pengawasan KTN lebih dahulu.

KTN juga menerima nota dari Belanda yang isinya:

1. Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena itu tidak bisa diharapkan kerja sama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran gencatan senjata.
2. Pendirian RI terhadap Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda sebagaimana yang ditetapkan dalam pokok-pokok asasi persetujuan Renville yang berarti berlangsungnya keadaan tidak dapat diper-tahankan, di mana ada dua tentara saling berhadapan di

bawah pimpinan yang terpisah.

3. Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan menyebabkan tidak ada harganya RI menerima nas- kah persetujuan yang direncanakan oleh KTN dan Amerika Serikat pada tanggal 10 September sebagai dasar perunding- an.
4. Pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah Federal. (13 h. 615).

Akhirnya pada tanggal 18 Desember 1948 Dr. Beel, Wakil Tinggi Mahkota Belanda menyatakan pihaknya tidak terikat oleh Persetujuan Renville dan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan serangan umum terhadap wilayah Republik Indonesia.

Belanda melakukan serbuan langsung dan serentak terhadap Yogyakarta, Ibukota Republik serta tempat kedudukan Markas Besar TNI. Serangan Belanda bertujuan menguasai kota-kota dan jalan raya. Seluruh kota di Jawa dapat diduduki oleh Be- landa. Belanda mengira bahwa dengan jatuhnya Yogyakarta dan ditawannya Kepala Negara Republik Indonesia, berarti Republik dan TNI telah runtuh. Perkiraan itu meleset, sehingga Belanda menanggung konsekuensinya, baik di bidang politik maupun militer. Belanda mengalami kesulitan dan juga proses dari:

1. Negara boneka: Negara Indonesia Timur
2. Negara Pasundan
3. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

TNI melancarkan perang rakyat semesta dan pasukan-pasukan hijrah dikirimkan kembali ke daerah asal, sehingga seluruh wilayah pendudukan Belanda dijadikan medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman sekalipun dalam keadaan sakit keras, aktif memimpin pelaksanaan gerilya. Walaupun TNI bertempur

dengan gighnya, kota-kota di Jawa Tengah satu per satu jatuh ke tangan Belanda; antara lain:

1. Kota Pekalongan – Wonosobo

Bapak Mochtar (kemudian pensiunan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah), beserta pembantunya ke luar dari daerah Karesidenan Pekalongan berdasarkan Persetujuan Renville dan hijrah ke daerah Banjarnegara dan Wonosobo. Perjalanan ditempuh melalui desa Depok ke desa Kalibening (Banjarnegara). Di Kalibening beberapa pengawal ditinggal, diberi tugas untuk mengawasi, menginfiltrasi serta memindahkan daerah pendudukan Pekalongan. Bapak Mochtar dipanggil ke Wonosobo, tempat hijrah Pemerintahan Karesidenan Pekalongan dan di Wonosobo bertemu dengan Kolonel Gatot Subroto yang akan pergi ke Yogyakarta.

Di Wonosobo pegawai pemerintahan RI tinggal sedikit. Hal ini disebabkan karena:

- a. tidak tahan penderitaan ekonomi,
- b. tidak tahan fisiknya, mereka harus menempuh jalan turun naik gunung.

Bapak Mochtar mendapat kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia dan juga dari masyarakat yang berasal dari Pekalongan, untuk melakukan tugas-rangkaian:

- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Kepala Bagian Umum Kantor Karesidenan.
- b. Sekretaris, kemudian Ketua PKD (Panitia Koordinasi Urusan Daerah Pendudukan), yang diciptakan oleh Biro Kabinet. Tugasnya ialah bersama-sama badan-badan perjuangan mengurus daerah pendudukan, memelihara semangat Republikan serta membina semangat perjuangan.
- c. Turut dalam pimpinan GPR (Gabungan Perjuangan Rakyat).
- d. Wakil Ketua Persatuan Pengungsi, yang mempunyai peranan penting melihat penderitaan para pengungsi yang perlu dibantu moril maupun material.

d. Kursus Kader Pembelaan.

Kapten Ali Murtopo dengan tangkasnya memelihara hubungan antara daerah pendudukan dengan Wonosobo. Keadaan sekalipun "dalam pengungsian" tetapi pekerjaan selalu sibuk: antara lain mengurus daerah pendudukan (infiltrasi, penyerangan dan sebagainya), mengurus ekonomi para pengungsi dan menentramkan perselisihan antara sesama kita. Perselisihan ini mungkin dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan jatuhnya penguasa Republik. Ternyata hal itu benar setelah terbukti adanya pelarian PKI Madiun ke Temanggung. Keadaan itu segera dapat diatasi dan dapat ditumpas oleh pasukan kita (TNI).

Setelah *pecah aksi militer Belanda II*, yang dimulai dengan bombardemen di atas kota Wonosobo, maka TNI bersama rakyat berjalan masuk daerah ke pendudukan Pekalongan. TNI bersama rakyat berjuang untuk merebut kembali dari tangan Belanda yang mendudukinya. Sebagai pangkalan dipusatkan di Lebahbarang dan Petungkriyono. Di sini Bapak Mochtar duduk sebagai Staf Pemerintahan Militer Karesidenan Pekalongan, yang dipimpin oleh Mayor Brotosewoyo, sedang bagian sipil dikepalai oleh Residen Sudjono. Adapun kesatuan-kesatuan dipimpin oleh Mayor KKO/AL Soehadi (sekarang: Letnan Jenderal Marine/AL Purnawirawan) dibantu oleh:

- a. Letnan Suwadji (sub sektor Pekalongan Selatan, Barat dan Timur: sekarang Mayor Jenderal).
- b. Letnan Ali Sadikin (kemudian Letnan Jenderal dan mantan Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya), Perwira Staf Operasi merangkap Komandan Sektor Kabupaten Pemalang.
- c. Letnan Wiranto (memimpin Sektor Batang, grup C).
- d. Kapten Hartono (kemudian Letnan Jenderal – sudah wafat), memimpin Pekalongan Selatan grup B.

Tokoh-tokoh pembantu lainnya ialah: Letnan KKO Bambang Wijanarka, Letnan KKO Joenoes dan lain-lain. Dengan bantuan KKO kerja sama dapat berjalan dengan baik. Perang gerilya berjalan dengan tertib dan pada waktu malam diadakan serang-

an umum ke markas Belanda. Rakyat yang ikut perang gerilya umumnya sudah berpengalaman. Selain TNI ada juga Barisan Kyai Gede Atas Angin yang dipimpin oleh Mukti alias Condro, berdiam di Rowokembu, Wopringgo, Pekalongan. Mereka ini memberikan andil dalam perang gerilya.

Tanggal 25 Agustus 1949 terjadi *cease fire*. Keesokan paginya Mayor Brotosewoyo, Mayor KKO Soehadi, Residen Soedjono, Letnan KKO Hartono, dan Bapak Mochtar pergi ke Pekalongan.

Tanggal 1 Desember 1949 Bapak Mochtar diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Pemalang, bertugas mengkonsolidasi Pemerintahan Republik Indonesia, menyelesaikan *dubbelbes-tuur* atau pemerintahan rangkap, melaksanakan pembangunan, serta menjaga keamanan dari gangguan DI TII yang mulai mengganas di daerah tetangganya, daerah Tegal.

2. Kota Purworejo

Tentara Belanda yang berada di Gombang pada tanggal 19 Desember 1948 jam 14.00 mengadakan gerakan masuk ke wilayah Republik Indonesia (*Doorstoot naar Yogyakarta*). Tentara Belanda mengelabui rakyat Indonesia, dengan menggunakan kendaraan yang di muka dihias dengan bendera Merah Putih tetapi di belakangnya tentara Belanda menembaki rakyat dan TNI.

Pada jam 16.00 – 18.00 tentara Belanda memasuki kota Purworejo, Belanda mendapat perlawanan dari Tentara Batalyon Sroehardoyo yang dibantu rakyat. Rakyat mengadakan rintangan di jalan-jalan, tetapi karena Belanda mendapat bantuan dari udara, maka TNI mengundurkan diri ke luar kota, sambil mengadakan persiapan gerakan Perang Gerilya. Belanda beristirahat di Purworejo dan Kutoarjo, tidak melanjutkan perjalanan ke Magelang dan Yogyakarta.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan penyerbuan ke Purworejo, tahanan PKI yang berada dalam Lembaga Pemasya-

rakatan dan di luar, melarikan diri ke luar kota. Keadaan kota Purworejo dan sekitarnya pada malam pertama kelihatan sepi, penduduk merasa gelisah, takut untuk tinggal dalam kota.

Maka secara berangsur-angsur penduduk kota Purworejo meninggalkan kota. Semangat TNI yang dibantu rakyat tetap menyala-nyala.

Pada tanggal 20 Desember 1948 TNI mengepung kota Purworejo, bertempat di desa Mranti, Paduroso, Condongsari, Ganggeng, Tambakriyo dan pada malam hari menyerang markas Belanda yang berada dalam kota Purworejo, tetapi penyerangan ini gagal, sebab tentara Belanda mempunyai persenjataan yang kuat. TNI hanya berhasil mengambil alat perbekalan. TNI mundur melalui desa Baledono Candi. TNI menunggu di sepanjang jalan yang menuju ke Magelang; diperkirakan oleh tentara kita, bahwa Belanda akan melanjutkan gerakannya.

D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL

Perjanjian Renville menimbulkan pertentangan politik di dalam negeri, yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta sebagai formatur kabinet baru. Moh. Hatta mencoba membentuk kabinet koalisi dengan mengikutsertakan semua partai dalam kabinetnya untuk menggaling persatuan nasional. Permintaan sayap kiri empat kursi termasuk jabatan Menteri Pertahanan, ditolak oleh Moh. Hatta. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1948 susunan kabinet baru diumumkan, tanpa wakil-wakil sayap kiri duduk di dalam kabinet. Program Kabinet Hatta:

1. Pelaksanaan Persetujuan Renville dan selanjutnya perundingan dasar yang telah dicapai.
2. Mempercepat dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).
3. Melaksanakan rasionalisasi di dalam negeri.
4. Pembangunan. (15, h. 54).

Tanggal 26 Pebruari 1948 sayap kiri yang menjadi oposisi membentuk *Front Demokrasi Rakyat (FDR)* di Solo yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh dan Sobsi. Kemudian FDR mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membatalkan perjanjian Linggarjati dan Renville.
2. Perundingan-perundingan yang diadakan dengan Belanda dilaksanakan atas dasar pengakuan kedaulatan.
3. FDR mengusulkan agar pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tanpa kompensasi.

Selain tuntutan tersebut di atas, FDR menjalankan rencananya melalui jalur parlementer dan non parlementer. FDR mendapat kepercayaan memimpin PKI, setelah tokoh Muso pada bulan Agustus 1948 pulang ke Indonesia. Muso sejak tahun 1926 bertempat tinggal di Moskwa. Muso berusaha merebut pimpinan revolusi di Indonesia. Usaha PKI menjatuhkan Kabinet Hatta tidak berhasil, maka PKI menghasut rakyat agar tidak mempercayai lagi kepada Pemerintah RI dan menghalangi kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia. Langkah lain yang diambil PKI ialah mengadakan gejolak politik di Solo pada bulan Agustus 1948.

Kedaaan Solo menjadi tegang. Penculikan dan insiden ber-senjata meletus. PKI menimbulkan pertentangan antara kesatuan-kesatuan tentara hijrah Divisi Siliwangi dengan pasukan-pasukan setempat ex Divisi Panembahan Senopati. Untuk memulihkan keamanan kota Solo, Pemerintah RI, mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer daerah Solo. (10, h. 31).

Tanggal 18 September 1948 Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo dan segera mengeluarkan pengumuman yang berisi perintah untuk menghentikan tembak menembak dengan segera. Selain itu juga diperintahkan kepada semua komandan kesatuan yang sedang bermusuhan, di dalam maupun di luar

kota, agar segera menghadap Gubernur Militer di kantor Karesidenan untuk mendapat perintah dan instruksi guna mengembalikan keadaan yang aman di Solo. Dalam waktu tiga hari setelah pengumuman dikeluarkan, bagi mereka yang tidak mengindahkannya, maka pemerintah akan mengambil tindakan keras. Tetapi kenyataannya masih terjadi tembak menembak yang terjadi, baik di dalam kota maupun di luar kota. Melihat keadaan yang demikian itu, maka Presiden Soekarno mengucapkan pidatonya, yang antara lain berisi:

1. Pemerintah akan mengambil tindakan keras di Surakarta (Solo). Pemerintah percaya bahwa semua peristiwa di Solo akan segera diselesaikan dengan cepat dan baik.
2. Kepada rakyat di Solo, Presiden menyerukan agar rakyat menjalankan kewajiban sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Gubernur Militer di Solo, dan turut serta menjaga keamanan di daerah masing-masing.
3. Diharapkan agar setiap warga negara jangan mengeruhkan suasana.
4. Hilangkan penyakit curiga mencurigai dan ingatlah bahwa pertikaian antara kita hanya melemahkan kita sendiri dan menguntungkan pihak lawan. (25, h. 210).

PKI berhasil mengalihkan perhatian Pemerintah terhadap kekacauan di Solo, maka kesempatan ini digunakan oleh PKI untuk menyusun kekuatan, yang dipusatkan di kota Madiun (Jawa Timur). Tanggal 18 September 1948 Sumarsono, seorang pemimpin pemuda PKI memaklumkan terbentuknya "Soviet Republik Indonesia" di Madiun. Di kota Madiun PKI menyergap Markas Staf Pertahanan Jawa Timur, Sub Territorial Komando Madiun, Depot Batalyon Corps Polisi Militer, dan Asrama Polisi Negara. Sesudah itu dilucuti pula Tentara Pelajar, TRIP dan Tentara Genie Pelajar (TGP). Tanggal 19 September 1948 FDR membentuk pemerintahan komunis dan sebuah front nasional dengan anggota-anggota PKI, Sobsi, Partai Buruh, Pesindo. Peristiwa PKI Madiun menjalar ke beberapa kota di

Jawa Tengah, yang diikuti oleh anggota-anggota PKI di daerah, antara lain:

1. Kota Purworejo

PKI di daerah kota Purworejo memberontak pula terhadap pemerintah Republik Indonesia. Daerah Kawedanan Purwodadi menjadi basis pertahanan PKI Batalyon Territorial/KDM ditugaskan menumpas PKI. Di antaranya Kompi Kusworo ditugaskan di kecamatan Purwodadi yang pada waktu itu bertempat di desa Jenar Wetan, sedangkan Komando Kompi berada di Pendopo Kawedanan Purwodadi, yang menjabat sebagai Wedono pada waktu itu, Bapak Slamet Soetowijoyo yang pernah menjabat sebagai Bupati Purworejo, sedang Asisten Wedono pada waktu itu Bapak Kodrat, ayah dari Dan Ki Lettu Kisworo. Kawedanan Purwodadi menjadi basis PKI, karena:

- a. Di daerah Purworejo tinggal tokoh PKI bernama Sarjio, berada di Bagelen, Sarjio pernah memimpin pemberontakan di Tegal yang terkenal sebagai: PERISTIWA TIGA DAE-RAH (Pekalongan – Tegal – Brebes/Pemalang).
- b. Bahwa perjuangan BPRI yang semula aktif dalam perjuangan menumpas Belanda, kemasukan ideologi Komunis, sehingga membuat kekacauan di daerah kabupaten Purworejo.

Akhirnya BPRI di Purworejo/Kutoarjo dilucuti senjatanya oleh Batalyon Mobil di bawah Mayor Sruhardoyo dan Batalyon Mobil Soedarmo. Badan perjuangan BPRI dibubarkan dan pengikutnya yang setia kepada PKI ditangkap, ditahan dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Setelah pemberontakan PKI Madiun yang mengacau di daerah Purworejo dapat diberantas, maka Batalyon Sruhardoyo bersiap-siap menghadapi serangan musuh (Belanda). Di daerah Loano dan Banyuasin dijadikan tempat menyimpan mesiu dan senjata, di bawah pimpinan Kapten Soedarsono. Bahan

makanan disimpan di Kecamatan Bruno di bawah pimpinan Lettu Soedirman.

Pemerintah Sipil di kota Purworejo dan Kutoarjo mempersiapkan perang gerilya dan bumi hangus, jika sewaktu-waktu Belanda menyerbu kota Purworejo dan dapat mendudukinya. Rakyat membantu TNI membuat rintangan di jalan dengan cara menebang pohon-pohon besar. Persatuan rakyat dan TNI erat sekali, terjalin kerja sama, pembagian tugas yang baik. TNI dan rakyat siap tempur menghadapi serangan musuh (Belanda). (47, h. 12-13).

2. Kota Cepu

PKI mengadakan pemberontakan juga di kota Cepu dengan membakar 120 rumah rakyat dan hutan. Alat dan bahan makanan kepunyaan pabrik minyak Cepu seharga dua juta rupiah diambil oleh kaum pemberontak. Pemberontakan PKI Madiun mempengaruhi pula keadaan di Cepu. Tanggal 27 September 1948 terjadi pertempuran antara TNI dengan Laskar Minyak dibantu oleh beberapa oknum TNI yang pemberontak. Perhubungan antara Surakarta - Cepu terputus, sehingga kota Cepu terisolasi. Sesudah Madiun jatuh, kota Ngawi dan Cepu dapat dikuasai oleh TNI. Kerusakan jembatan yang dilakukan oleh kaum pemberontak segera diperbaiki.

PKI menggunakan akal yang licik sekali dalam mempertahankan serangan dari TNI. PKI menggunakan penduduk sebagai perisainya, sehingga 200 orang menjadi korban. Dengan dikuasainya Cepu oleh TNI, segera dilaksanakan gerakan pembersihan terhadap sisa kaum pemberontak.

Daerah perminyakan Cepu sukar dikendalikan, sehingga masih terjadi pergolakan. Pemberontakan dengan SOBSI telah siap akan melakukan bumi hangus, jika TNI menyerang. Letnan Kolonel Sadikin mengirim Daeng Ardiwinata dari Madiun untuk merebut kembali kota minyak. Ketika pasukan TNI datang di Cepu, kaum pemberontak melakukan pembakaran. Keadaan di Cepu menjadi kacau, karena SOBSI melakukan pemogokan.

Terjadi perebutan kota Cepu. Cepu diserang oleh kaum pemberontak terdiri dari pasukan Brigade Sudiarto dan Laskar Minyak. Untuk sementara mereka berhasil menguasai Cepu kembali dan menekan TNI. Dengan usaha yang gigih akhirnya TNI berhasil menguasai Cepu kembali. Segera pasukan TNI melakukan pembersihan dan mengamankan seluruh kompleks pabrik minyak. Operasi di bawah pimpinan Mayor Sumaryadi. Setelah keadaan Cepu aman kembali, Menteri Penerangan Natsir mengadakan penerangan ke daerah-daerah dan kota-kota yang pernah diduduki PKI, dan telah direbut kembali oleh TNI, antara lain Purworejo, Ngawi, Cepu dan Bojonegoro.

3. Kota Blora

Anasir pemberontak PKI yang lolos dari Cepu lari ke Blora dan menggabungkan diri kepada markas Brigade Sudiarto, yang pemberontak terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 13 Oktober 1948 Blora dapat direbut kembali oleh pasukan Republik. Banyak pegawai sipil dipaksa lari bersama pemberontak PKI dengan membawa uang milik Pemerintah Republik Indonesia. TNI berhasil merebut kota Blora, tetapi sisa pemberontak sempat lolos dan melarikan diri ke hutan.

4. Kota Pati

Kota Pati tidak luput dari pemberontakan PKI. PKI menguasai kota Pati. Mereka menangkap para pegawai Republik yang tidak mau berpihak kepada mereka. Kemudian diadakan pembaruan jabatan:

- a. Sunardi dari SOBSI diangkat sebagai Bupati Pati
- b. Kapten Rohan sebagai Komandan STC
- c. Adisucipto sebagai Bupati Blora dan Rusman sebagai Bupati Kudus.

Tanggal 21 Oktober 1948 TNI mengepung kota Pati dan berhasil merebutnya dari tangan pemberontak PKI. Dr. Wirono, Residen Pati dan kawan-kawannya melarikan diri ke hutan.

Kota Pati tidak mengalami kerusakan, sebab kaum pemberontak tidak sempat melakukan bumi hangus, berkat cepatnya aksi pembersihan oleh TNI, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam pemberontakan ini, juga tertangkap orang PKI yang telah membunuh Letnan Kolonel Tituler Sudono, Wakil Ketua Mahkamah Tentara Pati, ialah Surahmat, Asisten Wedono Kudus. Di hutan dekat Pati, Blora dan Rembang, banyak orang PKI yang bersembunyi.

E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/KEHIDUPAN

1. Tata Pemerintahan di Kebumen

Belanda selalu mengancam ketenteraman rakyat Kebumen, sehingga rakyat tidak merasa aman. Untuk persiapan menghadapi kemungkinan yang akan terjadi, khususnya serangan dari Belanda, maka dibentuk sebuah badan bernama **BADAN KOORDINATOR KABUPATEN KEBUMEN**. Pada bulan Juni 1947 dengan ketua Bupati Sudjono dengan keanggotaan terdiri dari ketentaraan dan sipil. Tugasnya mengkoordinasi segala kekuatan yang ada di daerah Kebumen, baik itu dari BKR Angkatan Muda dan lain-lain. Tujuannya:

- a. melancarkan jalannya pemerintahan
- b. mempercepat komunikasi di dalam menghadapi serangan Belanda.

Pada waktu Belanda mengadakan serangan di Kebumen, siasat bumi hangus dijalankan. Beberapa kantor pemerintahan, bangunan militer dan pabrik dibakar, di antaranya markas tentara Gombang, pabrik minyak Karanganyar, rumah gadai, kantor telegram dan sebagainya.

Pemerintahan Kawedanan dan kecamatan pindah dari Gombang ke Kebumen. Untuk memperkuat pertahanan di garis depan, rakyat dipimpin lurah membantu persediaan bahan makanan. Tentara dan rakyat terus mengadakan perang gerilya.

Kerugian yang diderita pihak Indonesia di Kebumen cukup besar, antara lain:

- a. Kerugian korban jiwa yang cukup besar dan jumlahnya tidak dapat dihitung dengan pasti.
- b. Pendidikan sekolah terhenti, karena terpaksa ditutup. Rakyat sebagian mengungsi, sehingga tidak ada guru yang mengajar dan murid yang diajar.
- c. Jawatan berpindah-pindah tempat. Untuk sementara waktu dipindahkan ke kota Kutowinangun, Krakal dan Prembun.
- d. Industri rakyat kecil, perdagangan, terhenti, karena pasar-pasar ditutup.

2. Kepemudaan

Pemuda umumnya mempunyai sifat ingin lekas mencapai cita-citanya. Jiwa pembaharuan selalu berkobar di kalbunya. Pemuda tidak suka adanya tekanan yang menyebabkan mereka tidak hidup bebas. Tekanan ini pernah dialami pada zaman penjajahan. Maka jiwa ingin hidup bebas selalu tumbuh dalam hati para pemuda. Hal ini dialami oleh para pemuda di seluruh Indonesia, termasuk para pemuda di Kebumen, maka berdirilah ANGKATAN MUDA.

Angkatan Muda di Kebumen melakukan kegiatan yang bersifat membangun dan mengisi kemerdekaan. Kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Memberi penerangan kepada rakyat, bahwa penjajahan menyebabkan hidup sengsara.
- b. Mengkoordinasi para pemuda untuk melakukan kerja sama yang baik.
- c. Mengadakan latihan kemiliteran seperti baris berbaris, latihan dan perang.
- d. Membantu TNI mengadakan perlawanan terhadap Belanda, baik secara terbuka maupun bergerilya.
- e. Membantu pemerintah daerah mengamankan arsip pemerintah.

Kegiatan para pemuda membawa hasil yang menggembirakan. Perang gerilya pada masa Aksi Militer Belanda II mendapat bantuan besar dari Angkatan Muda Daerah Kebumen. Tokoh-tokoh Angkatan Muda Daerah Kebumen antara lain dapat disebutkan:

- a. Sri Darumdji sebagai Ketua, berasal dari Angkatan Muda Indonesia Pusat. Ia semula bekerja sebagai karyawan Kantor Pos Bandung yang pindah ke Kebumen. Ia sangat aktif memelopori Angkatan Muda Kebumen.
- b. Usilan, Alip Prawirodisastra dan kawan-kawan.

Angkatan Muda yang bersifat keagamaan juga bangkit di Kebumen, bernama ANGKATAN OEMAT ISLAM. Angkatan Oemat Islam ini biasa dikenal dengan sebutan AOI. Berdirinya gerakan Muda Islam ini di desa Somolangu, Kelurahan Sumber Adi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. AOI didirikan pada bulan Oktober 1945. Pimpinan gerakan ini Haji Machfuds Abdurachman, dan Kyai Afandi sebagai pembantu. Tujuan gerakan ini:

- a. mengkoordinasi umat Islam supaya bersatu untuk menentang penjajah.
- b. menentang orang kafir, yang dimaksud adalah orang Belanda.

Guna memperkuat gerakan ini, maka dilakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- a. mengadakan penerangan ke desa-desa supaya penduduk terpengaruh oleh cita-cita AOI.
- b. mengadakan usaha sosial dan mengumpulkan dana.
- c. mengadakan latihan kemiliteran.

Pada permulaannya gerakan ini bersifat sederhana, tetapi setelah kedudukannya kuat dan mempunyai pendukung kuat hampir di seluruh daerah Kebumen, maka beralih tujuan hendak membentuk Negara Islam di daerah Kebumen. Kegiatan organisasi ini diatur oleh pusat (sentralisasi) dengan ranting berada di desa Plumbon, Pugotirto, dan Tamanwinangun. Para peng-

ikut AOI sangat fanatik terhadap "Romo Pusat". Anggota-anggota di desa menurut apa yang diperintahkan oleh Romo Pusat. Tanpa disadari, apakah perintah itu sesuai dengan Pemerintah RI atau bertentangan. Harta, benda, dan jiwa mereka korbakan untuk kepentingan organisasinya, yang juga bersifat kemiliteran dan pernah membantu dalam perang gerilya pada masa perang Kemerdekaan I (Aksi Militer I) dan Perang Kemerdekaan II (Aksi Militer II). Tetapi karena merasa kuat, mereka membelokkan tujuannya ingin membentuk Negara Islam di bawah panji-panji Kyai Romo Pusat di Somolangu. Tujuan ini direalisasi dengan serangan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kebumen pada tanggal 1 Agustus 1950, sesudah pengakuan kedaulatan. Organisasi ini dapat diatasi oleh rakyat bersama TNI, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan korban jiwa rakyat Kebumen.

BAB V

KEADAAN DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN

Masa menjelang akhir Revolusi Kemerdekaan, di daerah Jawa Tengah secara umum perkembangannya mengikuti apa terjadi di pusat pemerintahan. Arus peristiwanya juga sama dengan yang terjadi di pusat dalam skala daerah. Secara hakekat, keadaan di daerah Jawa Tengah mempunyai kesamaan dengan di daerah lain di wilayah Indonesia.

Beberapa kesulitan yang dijumpai setelah KMB, seperti yang dirasakan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia juga ada di Jawa Tengah. Aparat perjuangan dan aparat pemerintah juga menghadapi masalah yang sama. Misalnya, rencana pembangunan yang tidak dapat dijalankan sebelum ada kestabilan politik dan keuangan. Pemerintahan kolonial memberikan warisan neraca defisit yang besar kepada bangsa Indonesia. Terjadi pula ledakan bom waktu di bidang politik dan keamanan yang ditinggalkan oleh pemerintah penjajahan. Timbul pula pergolakan di daerah yang mengganggu stabilitas dan kesatuan serta persatuan bangsa.

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB

1. Agresi Militer Belanda di Daerah Jawa Tengah

Peristiwa menonjol menjelang persetujuan KMB adalah

masa perjuangan fisik menghadapi kekuatan bersenjata Belanda. Perjuangan fisik ini tidak berdiri sendiri. Ia dibarengi oleh kegiatan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka.

Mulai tanggal 18 Desember 1948, pihak Belanda meninggalkan meja perundingan yang digantinya dengan kekerasan senjata. Tujuan yang utama adalah menghancurkan kekuatan TNI dan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Tindakan yang lebih parah lagi adalah blokade ekonomi yang sangat terasa bagi kehidupan rakyat.

" . . . Belanda tetap menuntut penghapusan TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama itu. Belanda sangat tangkas melakukan perang totalnya, walaupun ada senjata senjata. Mereka terus menyerang di lapangan politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik. Belanda hendak menghapuskan TNI dengan politik". (25, h. 165).

Beban pemerintah RI pada waktu itu sangat berat sebab baru saja dilanda pemberontakan PKI di Madiun. Sementara itu pasukan TNI masih bergerak menumpas sisa pasukan PKI di daerah pedalaman dan pegunungan di Blora dan Pati.

Secara umum pasukan TNI sedang dalam taraf mengkonsolidasi diri. Lebih menyedihkan lagi karena cukup banyak kekuatan tentara kita, terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun. Walaupun demikian persiapan terus dilakukan sekuat-kuatnya untuk menghadapi serangan Belanda. Ancaman Belanda sudah semakin besar. Mereka mulai memusatkan pasukannya secara berangsur dan sistematis ke daerah Gombong, Purwokerto, Banjarnegara, Pekalongan Selatan, Ambarawa dan Magelang.

Sebenarnya telah lama persiapan untuk menyerbu Yogyakarta mereka lakukan. Brigade T dipimpin oleh Kolonel Van Langen, telah menduduki Semarang dan sekitarnya sejak tahun 1945/1946. Belanda telah pula memindahkan brigade-

nya ke beberapa wilayah Jawa Tengah untuk menyerang wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan pada pihak kita, telah mulai membangun kekuatan atau pertahanan yang dibagi sebagai berikut:

Divisi II dan Divisi III akan mempertahankan wilayah Yogyakarta dan Surakarta, masing-masing dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto (Panglima Divisi II) dan Kolonel Bambang Sugeng (Panglima Divisi III). Pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. Brigade X dengan komandan Letnan Kolonel Soeharto, ditugasi mempertahankan Yogyakarta dengan kekuatan dua batalyon infantri, ditambah dengan kompi dari kadet-kadet Akademi Militer, beberapa detasemen dari Brigade 16 (pasukan Kahar Muzakar); kesatuan AURI, kesatuan ALRI, CPM dan peleton Tentara Pelajar. Beberapa bagian dari Brigade ini bertugas mempertahankan Bagelen, yang berpusat di Kebumen dan Purworejo. Tujuan utamanya adalah mempertahankan serbuan Belanda dari Gombong. Dua batalyon tersebut adalah Batalyon Sudarmo dan Batalyon Suhardoyo.
- b. Brigade IX dengan komandan Mayor Ahmad Yani, bertugas mempertahankan Magelang dan Temanggung. Kemudian juga menyusup ke daerah pendudukan, yakni daerah Kendal dan Semarang Barat.
- c. Brigade VIII, dengan komandan Letnan Kolonel Bahrn, bertugas mempertahankan Kabupaten Wonosobo, dan sebagian bertugas mengadakan penyerbuan ke daerah Banyumas dan Pekalongan.

Persiapan pasukan TNI terutama ditujukan untuk menghadapi serangan melalui jalan raya yang menghubungkan pangkalan musuh, yakni Gombong – Purworejo, Purworejo – Banjarnegara, dan Ambarawa – Magelang. (25, h. 201).

Salah satu sebab, sehingga dengan mudah musuh menyusup

ke dalam wilayah Jawa Tengah, adalah kelemahan dinas intelejen kita, yang kurang ada komunikasi dengan pusat pemerintahan. Di samping itu pihak Belanda menggunakan kesempatan menyusup di air keruh, yakni sewaktu bangsa dan pejuang-pejuang kita menumpas pemberontakan PKI. Demikian pula hari "H" yang mereka pilih adalah hari libur (Minggu) dan pada waktu itu pasukan kita merencanakan akan latihan perang-perangan, sehingga menuvre Belanda tidak segera disadari oleh kalangan rakyat.

Betapa cepatnya gerakan Belanda (18 Desember 1948) digambarkan dalam catatan yang ditulis oleh Kolonel Soeharto, setelah Belanda dapat menduduki kota Yogyakarta antara lain berbunyi:

" . . . Tiap hari teruslah ramai pengangkutan udara dari Semarang ke Yogyakarta, dan dalam tempo satu minggu lengkaplah Brigade T di dalam kedudukan yang baru direbutnya. Pada minggu pertama itu pula musuh meneruskan gerakannya ke luar kota buat menduduki kota-kota kabupaten dan distrik yang terpenting. Tanggal 21 Desember satu kolone bergerak dari Yogyakarta ke Timur, menduduki Prambanan, dan meneruskan ke Klaten, dan dari sini berjabat tangan dengan Brigade V yang telah menduduki kota Solo dan telah mencapai kota Klaten. Kolone yang lain ke Kaliurang, kota istirahat di lereng Gunung Merapi, dan ada pula yang ke Barat buat menduduki Sentolo Pada antara itu telah berjabat tangan musuh dari Yogyakarta dengan musuh dari Magelang, yang rupanya melalui jalan raya dari Semarang. . . ." (25, h. 227-228).

Pendudukan daerah lain di kawasan Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:

"Pasukan Belanda yang berasal dari Gombong, bergerak ke Magelang dengan melewati kota Maron, pada tanggal 21 Desember 1948, sedangkan pada keesokan harinya sampai ke Magelang lewat Purworejo. Dikuasailah jalan raya yang terpenting

di wilayah Kedu Selatan ini, misalnya jalan di desa Pituruh, yang menembus ke arah Wonosobo.

Demikian juga jalan di desa Purwodadi yang menuju ke Wates. Kemudian jalan di kecamatan Sapuran, yang terus ke arah Wonosobo. Dari desa Salaman, mereka menguasai jalan yang menuju ke Borobudur dan menyatu di Muntilan.

Penguasaan kota Magelang, agak terhambat oleh karena pasukan yang diharapkan datang dari arah Utara (Ambarawa) belum sampai. Kesempatan tersebut dijadikan sarana untuk menghancurkan bangunan-bangunan vital oleh para pejuang kita; demikian pula kesempatan untuk menyingkir, di mana para pejabat pemerintahan dan pegawai negeri, ikut bersama militer mengosongkan wilayah Magelang untuk ikut berjuang dengan sistem gerilya.

Pusat pasukan kita terletak di daerah gunung, pedalaman, terutama di daerah lereng gunung Sumbing. Pos komando Divisi terletak di tiga tempat, yakni Pakis, Tegalorejo, dan Candimulyo, semuanya terletak di kawedanan Kaliangkrik.

Pada tanggal 23 Desember, kota Temanggung jatuh di tangan Belanda setelah mendapat perlawanan sengit dari pasukan kita. Pasukan Belanda dari arah Utara, ternyata baru bergerak setelah Magelang jatuh ke tangan mereka. Dari kota Magelang inilah tindakan ofensif Belanda mulai dilancarkan secara maksimal terhadap pertahanan pasukan TNI dan para gerilya kita, seperti misalnya yang bertahan di wilayah sekitar Purworejo, Prembun, Muntilan, Magelang, Secang, dan Kebumen. Terutama sekali terhadap pusat pos komando di Kawedanan Kaliangkrik.

Akibat dari ofensif ini maka banyak pasukan kita terdesak mundur ke pedalaman dan kemudian bergerak berkelompok-kelompok. Pasukan kemudian diorganisir dalam KODM—KODM di daerah Kawedanan dan para Kader Desa.

Pertempuran yang terjadi di daerah Banjarnegara, merupakan pertempuran yang menggambarkan semangat juang yang

tidak kunjung padam. Pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan musuh mulai mengadakan serangan udara di atas kecamatan Karangkoobar dan Kawedanan Balur serta kecamatan Martianom, kesemuanya terletak di Kabupaten Banjarnegara.

Gerakan musuh dapat dipukul mundur oleh pasukan Siliwangi Brigade XIII, dari Batalyon Lukas Kustarya. Akan tetapi pada 21 Desember kembali Belanda mengadakan serangan balasan, di mana akhirnya Banjarnegara terpaksa ditinggalkan dan jatuh ke tangan Belanda. Dari kota ini sebagian pasukan Belanda bergerak ke arah Wonosobo. Desakan Belanda ini, membuat pimpinan Brigade VII, Letnan Kolonel Bahrn, mengambil keputusan, untuk tidak bertahan di kota, akan tetapi di daerah pedalaman, menyusun kantong-kantong pertahanan di sekitar wilayah Banjarnegara dan Pekalongan; tindakan ini pun merupakan salah satu upaya dari pimpinan TNI untuk tetap menegakkan pemerintahan RI."

2. Sikap Rakyat terhadap Agresi Militer Belanda

Rakyat yang menyadari hakekat kedaulatan bernegara, merdeka dan bebas dari jajahan ikut berjuang bersama tentara republik yang bertahan di kantong-kantong gerilya dan pemerintahan dalam pengungsian.

Terdapat beberapa tipe rakyat pada tarap pertama invasi Belanda pada Perang Kemerdekaan II yakni :

- a. Mereka yang tidak segera mematuhi perintah untuk mundur dan mengungsi ke pedalaman. Di antaranya ada pula yang kembali ke tempat mereka semula yang sudah diduduki pasukan Belanda, seperti Semarang dan kota lain.
- b. Mereka yang ikut bersama tentara keluar dari kota memusatkan pertahanan di daerah pedalaman dan ikut bergerilya. Bantuan dari rakyat di desa-desa sangat besar. Tanpa mereka pasukan kita tidak mampu berbuat banyak.
- c. Golongan Cina lebih banyak bersikap dengan naluri untuk kepentingan perdagangan. Mereka banyak yang menuju

ke daerah Semarang dan kota pendudukan Belanda lainnya.

Banyak kesukaran yang dialami oleh pasukan kita, tetapi dengan bantuan rakyat kesukaran ini mampu diatasi. Kesukaran yang dirasakan, umpamanya :

- a. Pakaian pasukan yang sudah tidak menggambarkan kesatuan militer, dan tidak mampu untuk menahan udara dingin di daerah pertahanan di pedalaman dan pegunungan.
- b. Persediaan obat yang sangat kurang.
- c. Persediaan bahan makanan yang semakin menipis.
- d. Persediaan persenjataan dan amunisi sangat berkurang.

Dari pihak Tentara dan pemerintahan dalam pengungsian, yang paling penting adalah menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap rakyat. Bahwa mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Langkah utama adalah perbaikan dalam pemerintahan militer, sehingga kepercayaan rakyat menjadi lebih tebal dan bantuan banyak mereka berikan. Terutama penyediaan bahan makanan, pakaian dan obat. Demikian pula pos Palang Merah dan dapur umum didirikan di mana-mana sehingga koordinasi oleh pihak pemerintahan militer dapat berjalan dengan semestinya. Catatan dari Nasution dalam hal ini tercantum sebagai berikut :

- a. Pada umumnya Rakyat masih Republikan, meskipun telah dua tahun lamanya di bawah kekuasaan Belanda.
- b. Kepercayaan terhadap pemerintahan Republik masih tetap terpelihara.
- c. Dengan adanya TNI di desa, rakyat merasa terjamin keamanannya.
- d. Adanya TNI di sekitar kota yang diduduki Belanda mempengaruhi pula pegawai yang bekerja dengan Belanda, sehingga mereka pun tidak ragu-ragu lagi memberikan sumbangan moril dan materiil kepada TNI. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tetap berfihak kepada Belanda.

- c. Mengenai kehidupan rakyat pada umumnya, keadaan tidak mengecewakan.

Sokongan kepada TNI dan pegawai negeri Republik tidak mengganggu perekonomian rakyat. Hanya dalam peredaran uang, terdapat kesukaran karena adanya dua macam uang, yaitu uang Belanda yang beredar di kota dan di sekitarnya dan uang ORI yang beredar di desa.

Lebih jauh diungkapkan bahwa rakyat mengorbankan semua benda yang dimilikinya, demi kelangsungan perjuangan kita. Di samping bahan makanan, juga mereka berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi gerakan pasukan yang dilakukan; melakukan mata-mata terhadap gerak-gerak musuh, dan juga menyelenggarakan pemondokan jika pasukan lewat dan bermalam di suatu desa. Di sini terlihat kerja sama yang sangat rapi dan penuh kesadaran antara rakyat, lurah, dan camat dalam membantu pemerintahan dan perjuangan untuk menegakkan Republik Indonesia.

3. Sistem Pemerintahan dalam Masa Gerilya

Banyak aparat pemerintahan sipil yang ikut ke pedalaman bersama tentara. Diadakan tata pemerintahan militer yang mengkoordinasi kegiatan pemerintahan dan perjuangan.

Dalam instruksi yang dikeluarkan oleh Komandan Brigade III Bahrin tercantum sistem pemerintahan sipil sebagai berikut :

- a. Pamong praja, semua jawatan dan dinas sipil harus dibentuk dengan lengkap, tetapi dengan susunan sesingkat-singkatnya. Tiap residen dan bupati harus merencanakan terlebih dahulu bentukan ini serta susunannya, agar dapat mengikuti kesatuan-kesatuan dalam masuk ke daerahnya masing-masing.
- b. Dalam perlawanan fase kedua, segenap instansi sipil disubordinasi dalam pemerintahan militer pada tingkatannya masing-masing;

Tingkat karesidenan dalam pemerintahan militer karesidenan,

Tingkat kabupaten dalam pemerintahan militer kabupaten,

Tingkat kecamatan dalam pemerintahan militer kecamatan.

Pejabat-pejabat sipil dimasukkan dalam staf pemerintahan militer dalam tingkatannya masing-masing.

- c. Instansi-instansi sipil tetap mengurus administrasi dan organisasi kesatuannya masing-masing menurut pedoman yang berlaku.
- d. Jawatan-jawatan dan dinas-dinas, dalam^s perlawanan fase kedua, organik masuk pemerintah daerah di mana mereka diperbantukan, tidak lagi hubungan langsung dengan pusat jabatannya masing-masing

Di bawah ini terdapat beberapa nama para pejabat pemerintah daerah Kabupaten masa 1945 – 1950 :

Magelang, dipegang oleh Judhadiprojo.

Salatiga, dipegang oleh Soemitro (1945–1950)

dan M.S. Handjoyo (1950–1951)

Ambarawa, oleh Danoe.

Purworejo, oleh Muritno.

Dari segi perjuangan diplomatik, daerah tidak banyak mempunyai arti. Perjuangan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh cendekiawan kita yang dengan gigih berjuang di forum internasional misalnya L.N. Palar, wakil RI di Dewan Keamanan PBB DR Sumitro Djojohadikusuma, Dr. Soedarsono; Mayor Jenderal Abdul Kadir, Utoyo, Idham, Ishak Muhdi Maryunani, dan lain-lain.

4. Gerakan Pengganggu Perjuangan

Perjuangan bangsa kita selama Perang Kemerdekaan II tidak lepas dari gangguan yang harus dihadapi. Di samping perampokan oleh golongan yang tidak bertanggung-jawab, yang mengacaukan daerah Republik atau yang didalangi oleh pihak Belanda, terdapat pengacauan yang cukup besar, yakni Gerakan yang

dinamakan *Majelis Islam* di daerah Brebes – Tegal antara 28 April 1949 sampai dengan Agustus 1949. Gerakan ini membentuk sistem pemerintahan sipil mulai dari Residen sampai bupati dan camatnya. Mereka mempunyai kekuatan pasukan sebanyak satu batalyon dengan empat kompi, masing masing beranggotakan 500 orang bersenjata.

Tokoh-tokoh MI pada waktu itu adalah :

Pemimpin Umum	:	Amir Fatah
Penasehat	:	Kamran (ia merangkap sebagai anggota Dewan Imamah NII);
Kepala Staf Umum	:	Mugni
Kepala Siasat dan Hakim MI	:	Haji Sakhroni
Komandan Kompi I	:	Dimyati
Komandan Kompi II	:	Sobakhi
Komandan Kompi III	:	Samsuri
Komandan Kompi IV	:	Mokhtar
Komandan-komandan Pasukan	:	Jenal Solikhin Makmuri Maksum Kasim
Residen Pekalongan MI:		Harun Suryadimeja
Bupati Brebes MI	:	Haji Ismail
Bupati Tegal MI	:	Kasim

Sebelum tentara RI berada di daerah ini. MI berkuasa atas persediaan bahan makanan; di mana seluruh lurah dan aparat desa lainnya di sekitar wilayah tersebut di atas berada di bawah pengaruh MI terutama sekali daerah Bumiayu dan Badarkawung. Pasukan TNI yang tergabung dalam *Sub Vehrkreise III* jika membutuhkan bahan makanan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Amir Fatah. Mulai tanggal 28 April 1949, pasukan MI mengadakan penyerangan terhadap pasukan TNI

Pada tahap pertama mereka melucuti kekuatan senjata pasukan RI yang bertahan di daerah terpencil, seperti pasukan seksi Brimob; seksi Sutarno. Akibat dari pada itu maka wilayah Bumiayu dan Bandarkawung dikosongkan oleh kekuatan TNI Batalyon III.

Dalam peristiwa awal ini, telah jatuh korban dari pihak pemerintah RI, yakni : DODM Brebes, Kapten Abduljalil; Pa. DM. Brebes Letanan II Surtipa; dan Komisaris Polisi Bambang Suprpto. Demikian pula tertawan sebanyak 50 orang dari Batalyon III dan Brimob. Gerakan penumpasan segera dilancarkan. Semua bangunan yang dikuasai MI yang berhasil dirampas atau diduduki tentara kita dibakar habis.

Kekacauan ini berakhir setelah Batalyon III dan Batalyon IV mengadakan serangan pada pusat pasukan MI di Bandarkawung, demikian pula daerah pusat terakhir dari MI di Pengarasan. Akhirnya mereka ini lari ke wilayah yang diduduki oleh pihak Belanda. Latar belakang praktis terjadinya masalah ini sebenarnya dapat dijelaskan menurut pandangan Nasution, sebagai berikut :

... Kesulitan besar yang dialami di daerah Tegal – Brebes, ialah karena sebelum kedatangan TNI, di daerah ini lebih dahulu telah ada pasukan-pasukan Hizbullah dan gerakan Masyumi yang dahulu merupakan sekedar pemerintahan gerilya dengan melewati fase organisasi "Majelis Islam", dan di sini Amir Fatah memegang peranan yang penting sekali. Ia telah masuk ke daerah federal sebelum agresi Belanda mulai, dengan restu dan setahu pimpinan tentara. Mereka telah berjasa dalam meneruskan perlawanan rakyat terhadap Belanda, setelah TNI dihijrahkan akibat perjanjian Renville. Akan tetapi TNI yang sekarang kembali ke daerah ini berkewajiban menegakkan kembali pemerintahan gerilya Republik, dan susunan-susunan yang telah ada harus dimasukkan ke dalam organisasi Negara Republik. Sudah tentu masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Kemudian ternyata, bahwa mereka akan meninggalkan Republik dan menegakkan Darul Islam. (25, h. 297).

5. Usaha Memecah Belah Persatuan Bangsa

Konperensi Antar Negara Bagian adalah suatu usaha dari pihak Belanda untuk mengurangi kekuasaan dan kedaulatan negara Republik yang akan disejajarkan statusnya dengan negara-negara boneka ciptakan mereka. Di samping itu juga ketaatan pihak Republik yang telah melaksanakan sebaik-baiknya persetujuan-persetujuan bilateral dengan pihak Belanda dimana mata internasional ikut menjadi saksi. Sejak masa persetujuan Linggarjati, pihak Belanda di samping mengadakan siasat berunding, juga menciptakan suasana keruh dengan tindakan teror dan militer. Lebih jauh Belanda pun mencoba untuk mengambil hati masyarakat di daerah dengan membentuk negara negara boneka.

Perlu kiranya kita telaah dahulu negara boneka bentukan Belanda ini. Pembentukan negara-negara tersebut selalu diterbitkan dalam peraturan khusus yang termuat di dalam Staatsblad pemerintah kolonial. Daerah-daerah ini, ialah:

- a. Dalam Staatsblad No. 143, tahun 1946, yang sesuai dengan muktamar mereka di Denpasar Desember 1946, yakni pembentukan Negara Indonesia Timur. Dasar dari pembentukan ini adalah Ordonantie 19 Februari 1936, Staatsblad No. 68 dan Surat Keputusan Gubernur Jenderal 25 Mei 1938 Staatsblad No. 264 Ketentuan Negara Indonesia timur ini tercantum dalam Bab 1 pasal 1 ayat 2 dari Naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur ini meliputi: Sulawesi Selatan, Minahasa, Kepulauan Sangihe dan Talaud, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali, Lombok Flores, Sumba, Timor dan pulau lainnya, Maluku Selatan dan Maluku Utara. Semua ini diuraikan dalam pasal 14, ayat 1 sub 1 s/d 13, Bab III (Peraturan Tatanegara Sementara) dari Keputusan Muktamar Denpasar di atas.
- b. Dalam Staatsblad 1947 No. 217, 25 Desember 1947, memuat Keputusan Gubernur Jenderal No. 1, yang menetapkan Pembentukan Negara Sumatera Timur.
- c. Di Sumatra Selatan Belanda membentuk Dewan Penasehat yang diwakili oleh 30 orang Indonesia, 2 orang Belanda, 2

orang Cina, 1 orang India dan 1 orang Arab. 30 orang ini terdiri dari Kepala Marga, wakil penduduk marga, wakil pasar yang berdiri sendiri, penduduk kota Haminte Palembang, Alim Ulama dan wakil dari Gerakan Buruh Indonesia. Jelas tujuannya adalah untuk memojokkan pemerintah Republik Indonesia di Sumatra Selatan dan mengadu domba sesama bangsa Indonesia.

- d. Staatsblad 1948 No. 42, memuat keputusan Gubernur No. 1 20 Februari 1948, tentang Negara Madura dengan Wali Negara R.A.A. Cakraningrat, sebelumnya ia penjabat Residen Madura.
- e. Staatsblad 1948, No. 34, Keputusan Gubernur Jenderal, 7 Desember 1946, menetapkan daerah Dayak Besar ditetapkan sebagai *Neo zelfbestuur*.
- f. Staatsblad 1946, No. 17 pembentukan daerah-daerah *neo-zelfbestuur* di daerah Kalimantan, bagi daerah-daerah yang belum berstatus *zelfbestuur*; dan negara/daerah tersebut berstatus di bawah satu nama Dewan Kalimantan. Dan menurut Staatsblad 1948 No. 58, menurut keputusan Gubernur Jenderal, maka Dewan Kalimantan berstatus sebagai Daerah Istimewa Kalimantan (12 Mei 1947).
- g. Staatsblad 1946 No. 16, 4 daerah *Zelfbestuur* dan 1 *neo-zelfbestuur* di Kalimantan Timur terjelma sebagai suatu Federasi (12 April 1947).
- h. Staatsblad 1947, No. 3 yang memuat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 8 Januari 1947 No. 2 kemudian diikuti dengan surat keputusan tertanggal 27 Maret 1947, 3 *neo-zelfbestuur* di Kalimantan Tenggara berstatus daerah federasi.
- i. Daerah Bangka, Belitung dan Riau, ditetapkan sebagai daerah yang berstatus *neo-zelfbestuur*, keputusan gubernur Jenderal 21 Juli 1947 No. 7, 8, 9 yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 13.

- j. Daerah Banjar ditetapkan sebagai daerah *neo-zelbestuur*, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal 14 Januari 1948 termuat dalam Staatsblad 1948, No. 14.
- k. Penetapan daerah Jawa Barat sebagai Negara Pasundan, Surat Keputusan Gubernur Jenderal 26 Februari 1948, termuat dalam Staatsblad 1948, No. 52. Penetapan ini berdasarkan permintaan wakil-wakil rakyat Jawa Barat pada Mukhtamar mereka yang ketiga.

Dari susunan sementara di atas, maka sebenarnya Jawa Tengah tidak mempunyai ide untuk membentuk suatu negara bagian sendiri. Sebab pada dasarnya, Pusat Pemerintahan RI berada di wilayah Jawa Tengah, yakni Yogyakarta dan juga banyak terkumpul kesatuan-kesatuan pejuang yang berada di Surakarta dan Magelang. Tetapi ternyata pada pertemuan antar Indonesia wakil dari Jawa Tengah juga tercantum nama-nama mereka. Yang ada di daerah Jawa Tengah adalah pemerintahan *Lecomba* yang berpusat di kota-kota di mana Belanda berkuasa, seperti di Semarang, dan sebagainya.

Dengan perundingan ini, sebenarnya Belanda di luar persetujuan Republik Indonesia dan tim Komite Tiga Negara ingin memaksakan berdirinya Negara Indonesia Serikat.

Dr. H.J. van Mook menyebutnya sebagai suatu *voorlooper* dari suatu sidang konstituante. Kita ambilkan suatu kutipan dari pengumuman pemerintahan kolonial Belanda, tentang usaha konferensi ini sebagai berikut:

” . . . pada pertengahan bulan Mei 1948 di Bandung akan dilangsungkan konferensi dari wakil-wakil negara yang akan menjadi bagian yang masih akan dibentuk, ditambah dengan wakil-wakil golongan kecil.

Konferensi ini diusahakan oleh delegasi Belanda. Kewajiban penting adalah merencanakan bentuk NIS dan memberikan bantuan kepada rencana Uni Nederland – Indonesia. Konferensi ini akan dihadiri oleh kira-kira 60 a 80 orang dan pa-

ling banyak 100 orang, dan akan memakan waktu beberapa bulan lamanya. Syarat yang diutamakan buat wakil wakil ini tidak didasarkan atas beberapa besar golongan yang diwakilinya, melainkan kecakapannya semata-mata. (25. h. 67)”

Konferensi Bandung ini oleh Belanda dianggap sebagai pelopor pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Serikat. Untuk daerah Jawa Tengah wakil-wakil yang hadir adalah Mr. Sihombing, Tje Sien Tjo, R. Slamet Tirtosubroto.

Suatu hal yang pasti adalah, bahwa rakyat Indonesia tidak dapat begitu saya percaya akan usaha keamanan yang diciptakan oleh bantuan orang asing. Kenyataan banyak membuktikan. Sehingga usaha membentuk negara NIS oleh ide Dr. H.J. van Mook ini diterima dengan penuh curiga dan tidak sepenuh hati.

Di samping situasi yang demikian, maka terjadi peristiwa internasional di mana Indonesia merupakan salah satu masalah yang penting yang harus segera diselesaikan. Keputusan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB dibentuk dan suatu kelompok penengah yang mengusahakan perdamaian antara Belanda dan Indonesia, yang terkenal dengan sebutan KTN.

Di samping itu terjadi pula Pemberontakan PKI, yang bertujuan akan mengubah haluan nasionalisme ke dalam haluan Komunis yang cenderung berkompas ke Rusia. Kekacauan yang sangat terasa adalah daerah Jawa Timur sebelah Barat dan Jawa Tengah bagian utara — timur, ialah daerah Pati, Blora, Cepu dan sebagainya. Akan tetapi kekacauan ini telah meningkatkan pula rasa persatuan dan kesadaran bernegara yang menjadi semakin tebal. Perpecahan di kalangan bangsa sendiri akan menimbulkan perpecahan dan kelemahan di segala bidang. Posisi kita di mata Belanda pun sangat tidak menguntungkan, demikian pula gerakan PKI ini seolah-olah menusuk diri sendiri dalam-dalam.

Di sinilah masih dapat dibuktikan bahwa rakyat bersama

TNI pada waktu pemberontakan itu terjadi, terutama di wilayah Jawa Tengah, di mana pusat pemerintahan berpusat, bersatu dan seia-sekata untuk menumpas dan menyelesaikan pengkhianatan PKI ini secepat mungkin, sebab segera akan menyusun barisan kesatuan dalam menghadapi Belanda.

Ada tercetus bahwa pengkhianatan PKI ini pun mendapat angin dan didalangi oleh pihak Belanda. Beberapa tokoh pemberontakan ini akhirnya diadili di daerah Solo.

Dari pengalaman di atas, baik cobaan terhadap Republik yang masih usia muda, yang berasal dari dalam maupun dari Belanda, telah dapat dihadapi oleh bangsa dan rakyat serta TNI dengan rasa persatuan.

Perundingan Antar Negara Bagian dipandang oleh masyarakat Jawa Tengah sebagai usaha dari pihak Belanda sebagai alat untuk memecah belah kesatuan dan persatuan. Demikian pula sikap toleran terhadap politik pemerintahan Republik Indonesia sangatlah besar. Perundingan-perundingan dengan Belanda adalah suatu alat perjuangan yang berbentuk politik dan diplomasi, walaupun disadari banyak kelemahannya pada waktu itu, akan tetapi dianggap penting pula, sebab akan menunjukkan di mata dunia internasional, bahwa bangsa dan Negara Muda Indonesia, hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, menghormati Lembaga Perdamaian Dunia, dan kita pun cinta akan perdamaian.

Walaupun diterima dengan penuh curiga, akan tetapi ia timbul atau terjadi sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara RI dan Belanda. Walaupun menurut kenyataannya Belanda banyak mengingkari prinsip perjanjian perdamaian ini, akan tetapi kita pun telah siap dengan segala kekuatan yang dimiliki. Perjanjian antar Indonesia itu tidak mampu menggoyahkan keyakinan kita akan cita-cita persatuan dan kesatuan.

Negara-negara boneka ciptaan Dr. H.J. van Mook ini, dalam hati rakyat Jawa Tengah, bukanlah semata-mata mereka mau mengingkari persatuan akan tetapi tidak mempunyai cara lain. Sebab menurut perjanjian "Renville" secara *de facto dan de jure*

diakui sebagai wilayah kekuasaan pendudukan Belanda. Kesadaran akan jiwa persatuan masih ada pada diri mereka, ternyata dari tidak bersedianya mereka memandang Republik sebagai bukan suatu negara. Secara *de facto* Belanda mengakui bahwa sebagai wilayah Republik adalah Jawa dan Sumatra.

Republik Indonesia lahir dari hasil keringat, darah, dan air mata mereka juga. Keyakinan rakyat Jawa Tengah ini pulalah yang banyak membantu mempercepat kembalinya Negara Kesatuan RI ini.

Sikap non-kooperasi masyarakat Jawa Tengah sangat tebal dan ini ditujukan kepada pemerintah. Banyak para pemimpin daerah dan pegawai sipil Republik tidak mau bekerja di bawah pemerintahan pendudukan Belanda; mereka lebih senang ikut tentara Republik untuk bergerilya dan tetap mengendalikan pemerintahan di daerah kantong, yang karena dalam keadaan darurat perang, mereka berada di bawah pemerintahan militer.

B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA.

Usaha pertemuan antar Indonesia ini, adalah suatu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Republik untuk menentukan suatu strategi dalam menghadapi Konperensi Meja Bundar, yang akan diadakan di Den Haag.

Pada mulanya Pemerintah Pendudukan Belanda berusaha untuk membentuk Negara Indonesia Serikat tanpa Republik Indonesia. Sebab pada waktu Belanda melanggar persetujuan Renville, dengan Aksi Militer II nya, para pimpinan Indonesia yang tidak memutuskan masuk ke pedalaman untuk bergerilya, ditawan Belanda.

Kembalinya Pemerintahan Indonesia, dengan dibebaskannya para pimpinan yang ditawan tersebut pada tanggal 6 Juli 1949, menyebabkan negara-negara Boneka yang sementara bergabung dalam BFO menyadari betapa kuatnya posisi Republik di mata

internasional, di mana rakyat yang sedang berjuang menegakkan kemerdekaan. Dan mereka semakin kecewa kepada Belanda.

Pada masa itu yang tergabung di dalam BFO adalah negara-negara bagian dan daerah-daerah yang mendapat status *zelfbestuur* atau *neo-zelfbestuur*; demikian juga status daerah pendudukan yang diberi nama RECOMBA (*Regirings – Commissaris voor Bestuursaangelegenheden*). Untuk seluruh wilayah Hindia-Belanda pada waktu itu, ada tiga daerah RECOMBA, yakni Jawa Barat dengan pimpinan R. Abdulkadir Widjoatmodjo, yang kemudian diganti oleh Hilman Djajadiningrat. Dalam perkembangannya menjadi Negara Pasundan.

Jawa Tengah, dipimpin oleh Dr. Angenent. Jawa Timur dengan pimpinan Van der Plas, dan Palembang dengan pimpinan Wijamalen. Memang pada dasarnya pihak Belanda, yang pada waktu itu dipegang oleh Dr. H.J. van Mook sebagai pimpinan, selalu mengecilkan arti Republik. Pendiannya tentang KTN, adalah yang selalu tidak menguntungkan posisi Belanda walaupun tidak sepenuhnya demikian; yakni misalnya dia melihat Australia oleh karena selalu cenderung membantu perjuangan Republik, oleh karena pemerintahan Australia pada waktu itu dipegang oleh Partai Buruh, sehingga Dr. H.J. van Mook menyebutkan bahwa tindakan Australia membantu Indonesia adalah bodoh.

Sedang wakil Belgia, tidak banyak membantu Republik, oleh karena negara ini tidak mempunyai kepentingan terhadap wilayah Asia Tenggara. Sedang USA dituduh terlalu cenderung kepada Indonesia. Ucapan Graham "*You are what you are*" dinilai memberikan pengakuan kepada kedaulatan Republik, dan ini merugikan kedudukan Belanda. Karena itu, Belanda banyak meninggalkan KTN dan Dewan Keamanan, suatu lembaga internasional di bawah PBB, yang secara giat mengusahakan perdamaian antara Indonesia dan Belanda.

Dengan prakarsa sepihak, Belanda membentuk Negara Indonesia Serikat, yang anggotanya terdiri dari negara-negara

dan daerah-daerah ciptaannya. Pemerintah sementara ini oleh van Mook dimaksud untuk memojokkan Republik, sebab menurut perhitungan mereka, dalam masa peralihan, Republik tidak akan diijinkan untuk berhubungan dengan dunia luar dan tidak diperkenankan untuk mempunyai tentara nasional yang regular.

Menurut van Mook, di daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda harus ditetapkan peraturan yang tegas dan ketat, terutama status dan nasib mereka di bawah bendera Belanda. Van Mook dengan beraninya mengatakan, bahwa negara-negara di luar Republik tidak mau kembali ke dalam negara kesatuan Indonesia. Dan mereka mau mendirikan negara sendiri. Dengan didikte oleh Belanda, negara-negara di luar Republik, menerima suatu resolusi yang isinya hampir sama, yaitu:

1. Segera adanya *interim regering*, yang mempersiapkan adanya Negara Indonesia Serikat.
2. *Interim regering* ini berhak memakai tentara Hindia Belanda untuk menjaga keamanan dalam negeri NIS.
3. Ada perubahan yang segera dari *Grondwet*, agar segera terbentuknya NIS terpisah dari Nederland.

Sebenarnya usaha pertemuan Konferensi Antar Indonesia sudah sejak tahun 1948 dikehendaki oleh kedua belah pihak, tetapi Republik selalu menolak, oleh karena semuanya datang atas desakan Belanda, tidak atas kesadaran negara-negara Federal sendiri. Beberapa urutan peristiwanya adalah sebagai berikut:

Di tengah kemelut yang dihadapi pemerintah Belanda atau ulah mereka sendiri, lahirlah apa yang kita kenal dengan Rencana Beel, yang berisi:

1. Mempercepat penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia kepada suatu pemerintahan federal yang mewakili seluruh Indonesia.
2. Harus ada perundingan dari semua pihak yang terlibat pada proses penyerahan kedaulatan tersebut.

3. Perundingan hanya dapat dilakukan jika kebebasan gerak negara Republik dijamin, artinya pemimpin-pemimpin Republik memperoleh kebebasan.
4. Menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Memang dari rencana Beel ini tidak secara tegas disebut atau dikatakan tentang pemimpin Republik Indonesia, tetapi jelas diakui bahwa tanpa kedaulatan yang diakui penuh atas Republik Indonesia, segala Perundingan Perdamaian menuju kepada terealisasinya NIS tidak akan pernah berhasil.

Ajakan Belanda maupun dari pihak BFO untuk berunding sewaktu para pimpinan pemerintahan Republik masih dalam tawanan Belanda, Bung Karno di Prapat dan Bung Hatta di Bangka, ditolak dengan tegas. Walaupun Hatta masih tetap berkata, "Betapa pun besar keinginan kami untuk bertukar pikiran dengan teman-teman sebangsa kami tentang nasib tanah air kita". (37, ha. 258).

Pendirian Republik ini pun didukung oleh sikap negara Pa-sundan dan NIT yang tidak sepedapat dengan tindakan keke-rasan Belanda.

Pihak BFO sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengajak berunding, dengan mempersiapkan, misalnya orang-orang Republik yang akan diajak berunding, seperti Sutan Sjahrir, Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Hamengku Buwono. H.A. Salim, Assaat dan Darmasetiawan, juga akan ikut diajak berunding Abdulkadir Widjoatmodjo dan Urip Kartohardjo dan BFO.

Kekesalan Dr. Beel yang tidak berhasil membujuk pimpinan Republik dalam pembuangan tersebut, menyebabkan ia menga-jukan Rencananya di atas ke Den Haag. Dari Nederland ini di-buatnya surat undangan ke Prapat dan ke Bangka, dengan hanya menyebut Presiden Republik, tanpa ada kata Indonesia, sebab Belanda menganggap Indonesia tidak ada. Undangan ini pun di-tolak oleh Presiden Sukarno dengan jawaban yang dengan kata-kata yang diplomatis, menolak ajakan tersebut, karena tanpa

kebebasan menentukan delegasi, selama pemerintahan masih seperti dewasa itu, adalah tidak mungkin. Artinya selama pimpinan Republik masih terputus hubungan dengan rakyat dan negara yang menjadi kekuasaan pimpinan yang tertawan itu, maka tidak dapat mengambil keputusan resmi yang bertanggungjawab kepada kemauan rakyat.

Sedangkan pimpinan kita juga memberitahukan, bahwa undangan Belanda merupakan satu jalan untuk menyabot Resolusi Dewan Keamanan, sehingga Republik Indonesia menolak undangan itu untuk menghindari diri terlibat dalam pengingkaran resolusi dewan Keamanan PBB. Dari pihak Dewan Keamanan pun dimintakan agar:

1. Resolusi Dewan Keamanan 28 Januari 1949 dilaksanakan, terutama sekali pasal 1 dan 2.
2. Konperensi Meja Bundar supaya diadakan secepat mungkin.
3. UNCI akan ikut serta dalam proses perundingan tersebut.

Pada hakekatnya Resolusi ini disetujui, tetapi Belanda masih mau menawar, bahwa terlebih dahulu ada genjatan senjata untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam negeri. Tetapi wakil Indonesia di PBB menolak, dengan menyatakan bahwa syarat yang paling utama adalah pembebasan pimpinan Republik dan pemulihan Pemerintahan RI di Yogyakarta.

Di atas sudah disebutkan, bahwa kembalinya para pimpinan Republik Indonesia di pusat pemerintahan Yogyakarta, maka segera diusahakan pertemuan Konperensi Antar Indonesia.

Konperensi tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pertama, di Yogyakarta, berlangsung antara 19 sampai 22 Juli 1949; dan yang kedua, di Jakarta 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Dengan demikian maka Konperensi Antar Indonesia membuktikan bahwa usaha Belanda dalam mengadu-domba sesama bangsa Indonesia tidak berhasil. Dalam pertemuan pertama yang diadakan di Yogyakarta maka diambil rumusan tentang hal-hal yang menyangkut masalah ketatanegaraan, antara lain:

1. Negara Indonesia Serikat akan memakai nama Republik Indonesia Serikat, yang berdasarkan asas demokrasi dan status Federalis.
2. Negara Serikat dengan nama RIS ini akan dipimpin oleh Presiden konstitusional dengan dibantu oleh para Menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.
3. Untuk pertama kalinya akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Sedang struktur yang akan dibuat kemudian adalah sebuah Dewan Perwakilan Rakyat yang tetap dan sebuah Dewan Perwakilan Daerah atau Senat.
4. Kedaulatan RIS akan datang dari Belanda dan juga dari Republik.

Sedang masalah-masalah militer pada pokoknya akan dibentuk suatu kesatuan Angkatan Bersenjata RIS, dan masalah ini semata-mata adalah masalah intern RIS kelak.

Sedangkan pertemuan antar Indonesia yang kedua, di Jakarta, pada prinsipnya memutuskan masalah pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak, Republik dan BFO, bersama membentuk Panitia Persiapan Nasional untuk mengatur ketertiban sebelum dan sesudah Konferensi KMB diadakan.

Tim delegasi RI untuk KMB pun segera dibentuk, yang terdiri dari: Drs. Moh. Hatta, Prof. DR. Mr. Soepomo; Mr. Moh. Roem, dr. J. Leimena; Mr. Ali Sastroamidjojo; Dr. Sumitro Djojohadikusumo; Mr. Abdulkarim; Mr. Sujono Hadinoto, Kolonel Simatupang; Mr. Soemardi.

Dari pihak BFO bertindak selaku Ketua rombongan adalah Sultan Hamid dari Pontianak.

Dari masalah di atas, dalam artian berhasilnya pemerintah Republik Indonesia menghimbau negara-negara bagian dan daerah *Zelfbestuur* dan RECOMBA, menunjukkan bahwa kewibawaan RI masih diakui oleh negara-negara di luar Republik Indonesia.

Sebagian orang penduduk Jawa Tengah menjelang awal penyerahan kedaulatan ini, merasa dirinya aman dan mengharapkan ketenteraman dan kembali hidup normal. Seperti diketahui, bahwa di Jawa Tengah selama masa perjuangan fisik, baik Perang kemerdekaan I maupun Perang kemerdekaan II, banyak pengungsi yang masuk ke wilayah Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Ini adalah akibat dari persetujuan kompromi Renville, sehingga penduduk yang memihak Republik banyak yang mengungsi dari Jakarta ataupun Jawa Barat. Demikian pula pasukan TNI dari kesatuan Siliwangi harus masuk ke daerah daerah Republik.

Dan setelah terjadi persetujuan antara BFO dan Republik Indonesia, dengan harapan kemerdekaan segera dapat dinikmati kembali, maka banyak para pengungsi yang pulang ke daerah asal mereka. Demikian pula untuk menegakkan keamanan di wilayah Jawa Barat, pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat yang lazim disebut Long Mars pada awal Perang Kemerdekaan II. Harapan ini tidak saja tercermin dari kembalinya para pengungsi ke daerah asal, tetapi masyarakat Jawa Tengah sendiri mencoba untuk mendahului hidup dengan cara-cara normal. Dan memang kesengsaraan rakyat, ikut berjuang bersama angkatan perang RI dalam Perang Kemerdekaan, adalah bertujuan membangun daerahnya lebih baik.

Selama masa gencatan senjata, banyak para pejabat yang dahulu masuk pedalaman, dipanggil kembali untuk membentuk dan membangun pemerintah RI. Misalnya, Pak Muchtar, yang memusatkan pemerintahan pengungsian di sekitar Pekalongan, mendapat tugas sebagai Bupati Kepala Daerah di Pematang.

C. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH.

Rentetan peristiwa yang melatar belakangi KMB sebenarnya merupakan tarap perjuangan internasional, dalam kerangka pengakuan kedaulatan RI. Walaupun kelihatannya meru-

pakan kemunduran, tetapi situasi yang terjadi pada waktu itu memang tidak memungkinkan untuk berbaut banyak. Artinya, mulai dari perjanjian Renville dengan hasil yang sangat merugikan posisi negara kesatuan RI, maka menuju negara kesatuan harus melewati proses yang agak panjang.

Di dalam peristiwa yang panjang itu, pihak Belanda telah banyak melangkah mendahului gerak yang seharusnya bersama-sama dilakukan dengan pemerintah RI. Di samping itu, Komisi Tiga Negara, tidak pernah menghasilkan keputusan yang tuntas dalam suatu perundingan damai. Mereka hanya berhasil merumuskan ketentuan yang tidak banyak berbeda dengan isi perjanjian Renville. Ataupun hasil perundingan antar Negara di Bandung pada tahun 1948.

Lebih jauh lagi, pihak Belanda seringkali melanggar ketentuan yang telah dirumuskan oleh Dewan Keamanan dalam upaya Dewan Internasional tersebut untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah RI dengan pemerintah pendudukan Belanda. Misalnya keputusan Dewan Keamanan, yang merupakan resolusi kompromi tanggal 1 Agustus 1947, yang antara lain berisi:

1. Kedua belah pihak yang bersengketa segera menghentikan permusuhan;
2. Mereka menyelesaikan sengketa mereka dalam arbitrase atau lain-lain cara damai.

Kenyataannya Belanda tidak mau menghentikan tindakan militernya, dengan banyak dalih. Umpamanya dengan sebutan "*mopping up operation*" yang sudah barang tentu harus dilawan oleh pasukan kita. Suatu yang harus dimengerti pula, bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan selanjutnya tidak tegas benar. Memang pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia II berakhir masih banyak negara Eropa yang tergabung dalam Kesatuan Sekutu belum merasa berkepentingan untuk menyelesaikan secara tuntas pertentangan antara negara jajahan dengan penjajahnya. Sebab banyak dari mereka yang masih berstatus pemilik negara jajahan yang luas, baik di Asia, Afrika maupun di Amerika Latin. Misalnya Pe-

rancis dan Inggris. Sedangkan negara-negara bekas daerah jajahan seperti India dan negara Sekutu yang berada di luar benua Eropa, yakni Australia, tidak banyak dapat diharapkan dalam forum tersebut.

Tegasnya, pada masa itu dalam Lembaga Internasional tersebut masih sangat jelas pertentangan antara negara-negara bekas jajahan (negara-negara baru setelah PD II) dengan negara-negara yang pernah atau masih banyak mempunyai tanah jajahan. Akibatnya, setiap penyelesaian dari Dewan Keamanan tidak pernah tegas. Misalnya, dalam sengketa Indonesia dengan Belanda, pelanggaran oleh pihak Belanda tidak pernah ada sanksi setidak-tidaknya mengharuskan tentara Belanda mundur dari wilayah-wilayah Republik yang mereka serbu. Tindakan maksimal yang mereka ambil adalah membentuk panitia konsul yang terdiri dari beberapa negara yang ada di Jakarta, yang bertugas meneliti apakah resolusi Dewan Keamanan PBB itu ditaati atau tidak.

Sebenarnya hasil panitia Konsul ini sangat positif, artinya memang benar bahwa Belanda melanggar resolusi tersebut, tetapi tindakan Belanda ini tidak mendapatkan sanksi apa pun, sebab ia didukung oleh Inggris, Perancis, dan Amerika yang juga memiliki hak veto di Dewan tersebut.

Ketidak-taatan Belanda terhadap keputusan Dewan Keamanan terbukti dari tindakan yang semakin tidak terpuji, yakni dengan menambah dan memperketat blokade terhadap wilayah yang berada di bawah kekuasaan Republik.

Kembali Dewan Keamanan bersidang, dengan usul dari Amerika Serikat untuk membentuk suatu komisi pengawas penyelesaian sengketa, yang kemudian terkenal dengan nama Komite Tiga Negara, yang beranggotakan Amerika Serikat, Dr Frank Graham, seorang rektor dari Universitas North Carolina; Richard C. Kirby, seorang Hakim sebagai wakil dari Negara Australia; dan bekas Perdana Menteri Belgia, Paul van Zeeland, sebagai wakil dari Belgia.

Di samping hadirnya Komisi Tiga Negara ini, pemerintah RI yang pada waktu itu Perdana Menteriya dijabat oleh Moh. Hatta, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan perdamaiian. Jika kita lihat, maka program Pemerintah Hatta pada waktu itu adalah;

1. Persiapan Perundingan dengan Belanda atas dasar Renville.
2. Membentuk Negara Indonesia Serikat.
3. Rasionalisasi
4. Pembangunan

Langkah kepada pemikiran ke arah Negara Indonesia Serikat, yang datang dari pihak Belanda sebenarnya sudah lebih jauh. Ia telah sampai kepada pemikiran suatu konsep sistem yang akan berlaku.

Pada dasarnya negara-negara bagian ciptaan Dr. H.J. van Mook, masih memiliki pandangan nasionalis, seperti terbukti ketika Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur, cenderung sependirian dengan Republik RI, yakni tercapainya kemerdekaan yang sejati. Kita kaji kalimat dari Anak Agung dalam Parlemen NIT antara lain: ". . . . Kerjasama antara Nederland dan Indonesia harus kita lihat sebagai soal yang timbul dari kemauan merdeka antara dua negara yang sama berdaulat dan sama derajat, yang memutuskan untuk mengatur beberapa hal bersama-sama dan bekerja sama dalam beberapa hal. Harus dianggap sebagai hal yang pasti, bahwa hubungan Uni tidak boleh mengurangi prinsip bahwa NIS harus berdaulat "

Mengapa hal ini kita tonjolkan, sebab pada hakekatnya dalam hati pemerintah pendudukan Belanda tidak menginginkan kedaulatan RI dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Mereka pun tidak secara sepenuh hati menerima persetujuan Renville. Sebab mereka menganggap hasil persetujuan itu justru menghambat usaha mereka menghancurkan RI, sehingga usaha yang dilancarkan adalah melakukan gerakan militer dengan dalih yang bermacam-macam. Demikian pula dengan secara sistematis membentuk negara negara boneka untuk kemudian mendirikan negara Federal. Apa yang diucapkan oleh van Mook

adalah memberikan pandangan kepada kita bahwa mereka berusaha untuk menghilangkan peranan Republik, ” tidak usah menunggu Republik tetapi kalau Republik bersedia ikut serta boleh”, demikian ucapan van Mook pada waktu melantik pemerintahan sementara Federal.

Kedudukan Indonesia cukup sulit. Banyak kompromi yang merugikan Republik terpaksa disetujuinya, seperti menerima garis van Mook, hanya karena anjuran KTN yang sedang bertugas di wilayah Indonesia, dalam rangka menyelesaikan sengketa Indonesia – Belanda. Demikian pula menerima 12 prinsip politik Belanda karena KTN menambahkannya dengan enam prinsip politik tambahan.

Pada persoalan di atas telah dikemukakan, bahwa NIT dan Negara Pasundan tetap meminta status yang tegas dari NIS yang akan dibentuk kelak, yakni negara yang berdaulat. Perhatikan diktum hasil musyawarah antara Indonesia (Federal) di Bandung, sebagai berikut:

1. NIS yang merdeka dan berdaulat, akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan tiada mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 3 dari Persetujuan Linggarjati.
2. NIS yang merdeka dan berdaulat akan berbentuk federal.
3. Negara-negara yang daerah-daerah, serta badan-badan kenegaraan yang lain yang telah ada, termasuk daerah, di mana telah dibentuk *adviesraad* Sumatra selatan, diakui.
4. Mengakui kenyataan adanya kekuasaan yang nyata ditangan berbagai-bagai bagian dari Indonesia ini, termasuk pula RI.
5. Pengakuan adanya kedaulatan Belanda selama NIS yang merdeka dan berdaulat belum dibentuk.

Dari diktum yang ke lima itulah, mengapa baik NIT, Pasundan dan RI bertakad akan membentuk Republik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949, seperti yang tersirat dalam pidato Presiden RI. Ir. Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1948, de-

ngan mensiter ucapan Hatta pada 16 Februari 1948, a.l. "Persetujuan Renville tak lebih daripada dasar untuk menyelesaikan soal Indonesia, yang menjadi persengketaan antara kita dan Belanda. . . . Oleh karena pembentukan Negara Indonesia Serikat perlu dicapai dengan melalui pembentukan pemerintah sementara yang meliputi seluruh Indonesia, maka kita bersedia turut aktif dalam pemerintah sementara itu."

Lebih jauh dalam pidato itu ditegaskan, ". . . . Negara Indonesia Merdeka yang merdeka semerdeka-merdekanya, yang meliputi seluruh tanah tumpah darah bangsa Indonesia, meliputi seluruh tanah jajahan Hindia – Belanda yang dahulu. Buat tujuan ini kita selalu berjuang, buat tujuan ini kita selalu berkorban. Dan tujuan ini Negara Indonesia Merdeka yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda yang dahulu itu, harus tercapai pada tanggal 1 Januari 1949"

Memang usaha manusia selalu harus ada dengan tekad dan kemauan yang baik. Tetapi Tuhan mengendalikan Kehendak-Nya kadang-kadang berlainan dengan kemauan manusia biasa. Dalam kemelud yang terjadi di Indonesia, maka tidak mungkin cita-cita NIS tercapai, sebab pecah kemudian Perang Kolonial kedua. Semua aparat pemerintahan Republik untuk sementara lumpuh. Sebagian melakukan perang gerilya bersama TNI dan rakyat, sebagian masuk penjara, dan pemerintahan sementara dikendalikan di Sumatra.

Lebih dari itu, pihak Belanda kemudian berusaha untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia Sementara dengan landasan *Bewindvoering in Indonesie in Overgangstijd* (BIO). Tetapi hal ini banyak tidak disetujui oleh NIT dan negara Pasundan, karena NIS tanpa Republik tidak mungkin dibentuk. Dan Indonesia tegas pula menolak masalah ini, sebab pembentukan NIS atas ungkapan dan paksaan Belanda bukan kehendak yang didasarkan kedaulatan dan kemerdekaan yang murni. Terutama sekali menyangkut masalah TNI.

Setelah kembalinya Presiden dan Wakil Presiden Republik

ke Yogyakarta beserta aparat pemerintah lainnya yang ditawan Belanda selama Aksi Militer II, mulailah pemerintah Republik aktif mencari jalan penyelesaian perdamaian kembali. Dalam sidang kabinetnya yang pertama diputuskan untuk mulai bersiap-siap menghadapi pertemuan Konperensi Antar Indonesia (Inter Indonesia) dan sidang KMB di Den Haag.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa pertemuan inter-Indonesia diadakan dua kali yakni 19 Juli s.d. 22 Juli 1949 dan 30 Juli s.d. 2 Agustus 1949 di Yogyakarta dan yang kedua di Jakarta. Perundingan ini diadakan antara Indonesia dengan BFO yakni negara-negara hasil ciptaan kolonial, yang berupa negara-negara Bagian. Tujuan terpenting dari pertemuan ini adalah untuk menentukan strategi bersama dalam menghadapi Konperensi Meja Bundar dan juga diputuskan tentang pengakuan kedaulatan RIS kelak, baik dari Indonesia (Republik) maupun dari Belanda.

Suatu hal yang penting dari KMB yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1949 ini adalah: Terbentuknya Negara Indonesia Serikat; dan pengakuan kedaulatan atas Indonesia dari pihak Belanda. Mulai pada waktu itu kedaulatan dan kekuasaan Belanda lepas dari wilayah Indonesia, dan mungkin kecuali wilayah Irian Barat, yang pada waktu itu masih berada di dalam status perwalian.

Republik Indonesia Serikat tidak panjang usianya. Sebab atas kehendak rakyat, termasuk rakyat Jawa Tengah menghendaki tetap adanya Republik Kesatuan. ". . . Atas desakan pergerakan rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Serikat segeralah memakai kesempatan untuk mengubah susunan ketatanegaraan dalam negeri. Segala negara dan daerah bagian yang menjadi bahan bagi pembentukan federal satu-persatu habis gugur oleh tangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Gerakan Rakyat Indonesia. Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapailah persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Suatu kesan rakyat yang sangat membekas yang diamanatkan kepada para pimpinan perjuangan yang turun dari gunung-gunung dan pedalaman karena adanya *cease fire*, dan beliau-beliau ini diangkat sebagai pimpinan masyarakat dan pemerintahan, adalah, "Pak, nanti kalau berunding dengan Belanda yang hati-hati, lho. Ingat Penderitaan Rakyat, Presiden kita Bung Karno. Dan Negara Kesatuan Indonesia". (21).

Dari ungkapan ini jelaslah bahwa rakyat tetap memelihara semangat kesatuan republik. Mereka tidak rela akan adanya perpecahan antara bangsa, yang kemudian membentuk RIS. Singkatnya RIS adalah suatu bukti bahwa ungkapan rakyat, tidak pernah pudar, dan tetap dipegang teguh oleh para pemimpin kita pada waktu itu.

D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.

Di manapun di wilayah Indonesia, masa perang kemerdekaan adalah masa yang memprihatinkan. Kesulitan kehidupan sudah tentu dirasakan oleh masyarakat yang terutama hidup di daerah kekuasaan pemerintahan pendudukan Belanda. Pikiran dan tenaga kita dicurahkan untuk menegakkan kemerdekaan hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, yang telah diporak-porandakan oleh aksi militer Belanda.

Tentara dan rakyat di pedalaman pedesaan dan pegunungan berjuang dengan kekuatan senjata yang dimiliki untuk melawan Belanda. Sedangkan para pemimpin kita yang berada di ibukota RI maupun pada masa perjuangan sibuk berdiplomasi untuk menanamkan rasa simpati dan kepercayaan dunia internasional, bahwa RI tumbuh dan merdeka memang ada dan atas perjuangan suci seluruh rakyat Indonesia, melawan penjajahan. Demikian pula tokoh-tokoh pelajar, intelektual dan politisi, yang bertugas di luar negeri dengan gigih dan tekun berjuang dengan tujuan yang sama.

Di daerah JawaTengah memang secara jelas tidak terasa ke-

hidupan yang sangat sengsara, karena semua gerak kehidupan masyarakat Jawa Tengah dirasakan bersama, baik oleh rakyat, tentara, pemimpin sipil dan para politisinya. Rakyat di pedesaan terutama membantu kehidupan dan sosial ekonomi pasukan gerilya dan para pemimpin yang ikut ke pedalaman.

1. Kehidupan Pendidikan.

Setelah berdiri pemerintahan Republik Indonesia, maka pemerintah dan KNIP merasa perlu untuk membentuk dan memikirkan dasar-dasar pengajaran yang baru. Beberapa prinsip pengajaran & pendidikan yang baru adalah sebagai berikut:

- a. menerapkan bunyi pasal 31 Undang-undang Dasar RI.
- b. Susunan sekolah diatur dari Sekolah Rakyat sampai sekolah menengah umum dan kepandaian khusus.
- c. bagi murid yang tidak melanjutkan diselenggarakan pendidikan masyarakat.
- d. diselenggarakan pendidikan universitas dan sekolah-sekolah tinggi untuk mendidik calon-calon pemimpin. Demikian pula sekolah untuk pendidikan militer.
- e. biaya pendidikan ditekan serendah-rendahnya.

Pada dasarnya sekolah-sekolah masa awal kemerdekaan dan masa perang kemerdekaan fisik, pendidikan dilakukan dalam tiga kategori:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda, yang terutama terdapat di daerah pendudukan, Semarang, Salatiga, Purwokerto, Purworejo, dan sebagainya. Sedangkan sekolah-sekolah di daerah Republik menggunakan gedung Belanda dahulu.
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh swasta dengan asas kebangsaan (Taman Siswa), atau berdasarkan keagamaan (Muhammadiyah).
- c. Sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang kebanyakan adalah bekas sekolah rakyat desa *ongko loro*.

Sekolah-sekolah yang ada sejak masa penjajahan sampai

masa kemerdekaan di beberapa kota di Jawa Tengah: Magelang terdapat AMS sekarang telah tidak ada.

MOSVIA sekarang dipakai untuk gedung Konresko.

HIK sekarang sudah tidak ada.

HIS sekarang sudah tidak ada.

Pondok pesantren di Mungkid sejak tahun 1890. Demikian pula di Tegalrejo dan Payaman.

Salatiga: ELS

HIS

MULO

Meisjes Kweekschool.

Sekolah tersebut sudah tidak ada, beberapa yang masih dimanfaatkan adalah untuk SPG dan SMA.

Ambarawa : terdapat SPG Kristen sejak abad XIX; Sekolah Taman Siswa, walaupun dewasa ini kelihatan mundur.

Purworejo : terdapat HKS, HIK yang sekarang telah menjadi gedung P & K.

Sekolah Pendidikan Guru, sampai sekarang.

Purbalingga : terdapat HIS, sekarang dijadikan gedung SMP.

Banjarnegara : terdapat HIS sekarang menjadi SMP Perintis.

Purwokerto : terdapat MULO, Kweekschool, dan Normal-school. ELS. TS.

Semarang : terdapat AMS, MULO, HIS, dan sekarang telah menjadi bangunan SMA, SMP, Sekolah Pendidikan Guru, dan sebagainya.

Jenjang sekolah yang ada pada waktu itu adalah: Sekolah Rakyat selama 6 tahun; Sekolah lanjutan 3 hingga 3 tahun; Sekolah Industri 3 sampai 6 tahun; Perguruan Tinggi 4 sampai 6 tahun. Sekolah Tinggi pemerintah pada masa awal Kemerdekaan hanya terdapat di Yogyakarta, yakni Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1949.

2. Sosial Ekonomi.

Dasar perekonomian sebenarnya tidak banyak berubah,

sebab apa yang dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu belum dapat dinilai dengan baik. Peralihan dari kekuasaan Jepang, masa kemerdekaan, dan kemelud perjuangan bersenjata akibat perang kolonial Belanda yang ditimbulkannya, tidak memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan sosial perekonomian pada masa itu. Usaha ke arah masa yang makmur memang telah terpikirkan, tetapi pada masa itu banyak tercurah ke masalah politik dan militer. Kemakmuran banyak diukur dengan kemandapan hidup seseorang. Tetapi jika masyarakat pedesaan di Jawa Tengah sudah atau masih mampu menjamin perjuangan dengan memberikan bantuan bahan makanan dan pakaian ala kadarnya, sudah terang bahwa mereka hidup dalam suasana yang cukup dan tidak kekuarangan.

Timbul gejala yang menyolok pada masa perjuangan kemerdekaan itu adalah, banyaknya penduduk kota, atau lapisan masyarakat menengah dan tinggi yang rupa rupanya tidak kaku lagi berhubungan dengan masyarakat pedesaan. Kesadaran nasional telah pula merata baik pada penduduk kota maupun desa.

Demikian pula perdagangan yang dikendalikan oleh orang-orang Cina, baik mereka masuk ke dalam kota maupun mensuplai bahan ke dalam wilayah pedesaan, dirasakan tidak mempersulit hubungan dengan kemajuan perekonomian dan sosial penduduk.

Sangat diakui oleh penduduk yang hidup di kota, terutama daerah yang merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan penduduk Belanda, bahwa perekonomian dan status sosial kehidupan masyarakat dikendalikan oleh orang Belanda, Cina dan non-bumiputra lainnya. Bukti-bukti sampai sekarang sangat nyata. Bangunan, cara hidup, Pusat perdagangan dan pemukiman yang nyaman dan indah adalah milik mereka. Bangunan di daerah elit di Semarang, di daerah Slatiga, Ambarawa, Magelang, dan sebagainya, adalah bangunan untuk nonpribumi. Pecinan, nama pusat perdagangan yang dipegang oleh orang Cina hampir di tiap kota besar di Jawa Tengah selalu ada. Daerah Kebumen, yang dulunya menjadi pusat orang non bumiputra yang bukan

Cina, terutama Arab, juga hampir terdapat di tiap kota.

Memang jika ditinjau dari lingkup nasional, problema perekonomian cukup sulit. Sebagai negara yang baru menyelesaikan suatu tahap dari perjuangan kemerdekaan, harus memperbaiki apa yang hancur dan rusak binasa akibat perang. Politik bumi hangus banyak dilakukan oleh pasukan kita, sehingga perlu diperbaiki kembali.

Di Jawa Tengah, banyak pabrik yang hancur, toko yang rusak; jalan hancur, jembatan rusak, komunikasi dari pedalaman ke kota atau sebaliknya menjadi sulit. Di samping itu pemerintah RIS mewarisi hutang luar negeri yang hampir sebesar satu milyar rupiah. Dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 milyar rupiah.

Demikian juga kenaikan penduduk yang sangat cepat mempengaruhi cara pengembangan perekonomian yang masih sederhana. Setelah kemerdekaan, kehidupan kota semakin menarik penduduk daerah pedalaman untuk pindah ke kota.

3. Pers dan Komunikasi Media Lain.

Sejak tahun 1946, pers di Indonesia sudah mempunyai wadah yang jelas, yakni SPS yang anggotanya terdiri dari para usahawan persurat-kabaran dan para wartawan yang pada waktu itu berkumpul di ibukota Republik untuk meliput berita dari peristiwa nasional. SPS berdiri pada 6 Juni 1946. Pada tahun 1949 mereka berkumpul kembali untuk mengambil kesempatan di dalam peristiwa-peristiwa nasional yang sedang berkembang di Ibu kota Republik Yogyakarta, yakni ratifikasi hasil Konferensi Meja Bundar oleh Sidang ke-VI KNI Pusat.

Menurut laporan UNESCO, surat kabar di Indonesia selama aksi militer Belanda berlangsung sampai dengan awal 1949 adalah 81 surat kabar dan mempunyai tiras sebanyak 293.000 lembar setiap hari. Rata-rata terbit empat halaman, dan setiap surat kabar terbit setiap hari dengan 500 sampai 5000 tiras/eksemplar. Pada masa akhir tahun 1949 keadaan masih mem-

baik. Semakin banyak surat kabar berbahasa Indonesia, yakni 96 dengan tiras sekitar 1,1 juta. Keadaan ini bertahan sampai dengan tahun 1957.

Di kota Semarang, sejak tahun 1851 telah terbit surat kabar dengan nama *Semarangsch Advertentieblad*, dan pada tahun 1863 berganti nama dengan *De Locomotief*. Surat kabar tersebut baru berhenti terbit pada tahun 1957. Koran berbahasa Belanda ini pembacanya kebanyakan adalah kaum terpelajar dan menengah. *De Locomotief* ini adalah salah satu dari tiga surat kabar yang bisa bertahan sampai dengan tahun 1957.

Pada menjelang tahun 1946, di beberapa kota di Jawa Tengah terbit surat kabar yang bersifat nasional, seperti di Yogyakarta terbit surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, dan di Semarang terbit *Warta Indonesia*, dahulu bernama *Sinar Baru*. Pada awal masa Revolusi Kemerdekaan terbit *Warta Semarang* yang diupayakan oleh Badan Pemerintah Republik Indonesia (BAPRIS). Karena terjadi perang kemerdekaan, banyak wartawan pergi ke Ibukota Republik atau ikut berjuang ke pedalaman. Akibatnya, banyak majalah dan surat kabar yang terbit di daerah Republik yang memiliki wilayah sempit, akibat perjanjian Linggarjati dan Renville itu. Mereka banyak menghadapi kesulitan sehingga hanya sedikit yang mampu terus terbit. Walaupun demikian para wartawan sudah banyak pengalaman dan terpelajar.

Cara mengambil berita pun masih sangat sederhana. Harian yang terbit di Surakarta pada masa itu adalah *Merdeka*, yang dicetak dengan handzet dan dibuat dekat sumur dengan menggunakan lampu teplok sebagai alat penerangannya.

Peristiwa tragis tidak jarang menimpa wartawan, misalnya wartawan Soejitno yang pada waktu Perang Kemerdekaan menjadi Kepala Jawatan Penerangan di Sragen, tertembak mati oleh Belanda. Semula ia adalah redaktur mingguan *Adil*. Surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang baru terbit dalam tahun 1950. Sedangkan surat kabar lainnya terbit setelah tahun 1956.

4. Radio.

Peranan radio pada masa perjuangan sangat besar. Pada akhir masa kekuasaan militer Jepang pemuda pejuang merebut *Hosokyoku* (jawatan radio) dan dikembangkan menjadi RRI. Station radio pertama di Jawa terdiri dari 8 studio bekas *Hosokyoku*, yakni Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Malang.

Pada masa perang kemerdekaan, studio-studio meninggalkan kota dan bergerak di pedalaman sebagai radio perjuangan. Jawa Tengah memiliki *Radio Pemberontakan* di Solo dan *Radio Perjuangan* di Semarang, termasuk *Radio Militer* di Yogyakarta dan *Radio Indonesia Raya* di Yogyakarta. Studio perjuangan di daerah gerilya di pedalaman terdapat di daerah Balong, Wonosari dan Lawu.

5. Pergerakan Wanita.

Gerak langkah wanita, tidak ketinggalan di dalam memikirkan perkembangan tanah air. Gerakan wanita di Jawa Tengah tidak lepas dari gerakan wanita di tingkat nasional.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Presiden Soekarno menunjuk Ny. Soewarni Pringgodigdo untuk memimpin Pergerakan Wanita Indonesia. Tugas yang paling dasar pada waktu zaman perjuangan adalah mengadakan dan membuka dapur umum untuk menjamin kebutuhan makanan bagi para pejuang kemerdekaan. Dapur Umum hampir selalu ada di tiap basis perjuangan. Gudang-gudang bahan makanan sebagian diserahkan kepada Dapur Umum. Kebutuhan beras dipenuhi dari daerah laur kota. Demi membina semangat persatuan di kalangan wanita untuk menghadapi agresi Belanda, pada 17 Desember 1945 diadakan *Kongres Wanita Indonesia* di Klaten. Dalam Kongres itu dua organisasi, Perwani dan Wani bergabung menjadi satu organisasi, yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari. Disamping itu terdapat organisasi wanita lainnya, yaitu Aisyah, Wanita Taman Siswa, Pemuda Indonesia bagian

Putri, dan Wanita Khatolik.

Tujuan Perwari antara lain menuntut dan mempertahankan keadilan sosial, agar keselamatan dan perikemanusiaan dalam masyarakat Indonesia terjamin.

Program kerja pokok yang ditentukan adalah yang berhubungan dengan kepentingan perjuangan kemerdekaan.

Usaha untuk membentuk suatu federasi wanita diusahakan di Solo pada 24 sampai 26 Februari 1946, antara organisasi Perwari, Wanita Katholik, Aisyah, Pemuda putri Indonesia dan Persatuan Wanita Kristen kedalam wadah Kongres Wanita Indonesia, atau KOWANI. Tujuan KOWANI mengintegrasikan semua program dari perkumpulan wanita kepada perjuangan kemerdekaan. Kemudian bergabung pula ke dalam federasi KOWANI berbagai organisasi wanita, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Barisan Buruh Wanita, Perjuangan Putra Indonesia bagian Putri, Kebatian Rakyat Indonesia Bagian Putri, Angkatan Muda Katholik RI, Laskar Wanita Indonesia, Muslimat, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia bagian Putri.

Pada tahun 1947, dalam Kongresnya di Magelang, KOWANI membuat suatu pernyataan yang berisi simpati kepada *De Nederlandse Vrouwenbeweging (Gerakan Wanita Negeri Belanda)* yang menentang pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia. Kongres dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman.

Dalam kongres tahun 1948, terjadi perselisihan pendapat tentang garis politik, namun dapat diselesaikan. Karena tidak menyetujui hubungan KOWANI dengan WIDF, organisasi Wanita GPII dan Aisyah menyatakan keluar dari organisasi. Kesukaran timbul di dalam masa Pemberontakan PKI, tetapi suatu pertemuan Besar yang diikuti oleh organisasi-organisasi dari luar Jawa, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus – 2 September 1949 menerima suatu statemen politik yang berbunyi:

- a. Memperkuat resolusi Kongres Wanita Indonesia yang disampaikan kepada Delegasi RI pada Konperensi Meja Bundar;
 - 1) Menuntut Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia yang harus selesai pada waktu penyerahan kedaulatan penuh kepada RI;
 - 2) Hanya mengakui sang Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- b. Memprotes sekeras-kerasnya pembunuhan kejam terhadap 40.000 pejuang di Sulawesi Selatan.

Tokoh-tokoh pergerakan wanita pada masa-masa awal, antara lain Ny. Soewarni Pringgodigdo, Nn. Erna Djajadiningrat, Nyi Hajar Dewantara, Ny. D. Goelarso, Ny. S. Kartowiyono, Ny. Hardjodiningrat, Ny. Soekanto, Ny. Soenaryo Mangoenpoes-pito, Ny. Ismoediati Saleh, Ny. Anwar, Ny. Drijowongso, Ny. Datuk Tumenggung dan lain-lain.

BAB VI P E N U T U P

Di muka sudah diceritakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia serta perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya yang terjadi di daerah Jawa Tengah selama masa Revolusi Kemerdekaan 1942 – 1949. Telah diuraikan keadaan daerah Jawa Tengah pada masa pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan menghadapi agresi militer Belanda I dan II, dan masa-masa menjelang akhir revolusi kemerdekaan. Dari apa yang telah diceritakan di muka, beberapa hal perlu dikemukakan sebagai kesimpulan:

1. Selama masa pendudukan Jepang di Jawa Tengah, kehidupan rakyat pada umumnya, khususnya rakyat petani di desa-desa, mengalami penderitaan yang berat. Hal ini disebabkan, karena rakyat harus memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh pembesar pemerintah Jepang, misalnya dalam menyerahkan hasil padi dan keharusan untuk menanam tanaman yang diperlukan bagi peperangan, misalnya rami dan jarak. Kehidupan yang menunjukkan kesengsaraan dan kemelaratan ini dicerminkan oleh perintah Jepang agar rakyat makan bekicot dan berpakaian karung goni. Kerja paksa dengan mengerahkan penduduk dan pasukan Peta sering diadakan, misalnya dalam pembuatan benteng pertahanan, jalan, dan lapangan terbang. Pengerahan tenaga dan kehidupan ekonomi ini dilaksanakan me-

lalui aparat pemerintahan dari *Syucokan* (Residen) sampai Ketua Rukun Kampung atau *Tonarigumi*, yang juga merupakan aparat untuk mengerahkan rakyat guna memenuhi tugas pemerintah militer. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah Jepang berusaha menanamkan pengaruhnya, terutama melalui bahasa dan nyanyian Jepang, dengan perantaraan media pendidikan atau sekolah, tetapi tidak memperoleh hasil yang besar. Keadaan ini telah menyebabkan timbulnya perasaan tidak puas yang mendalam di kalangan rakyat terhadap pemerintahan militer Jepang, sehingga sering terjadi perlawanan secara terbuka.

2. Didalam bidang politik pemerintahan, kegiatan politik sama sekali dilarang, sehingga tidak terdapat pergerakan politik yang segera terbuka menentang pemerintah Jepang. Meskipun demikian, beberapa tokoh bangsa Indonesia berusaha mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jepang di dalam bidang pemerintahan agar dapat memberikan manfaat bagi cita-cita perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh tersebut untuk daerah Jawa Tengah, misalnya R.P. Suroso, R.A.A. Sastrodiprojo, R. Gondomertosuprojo, dan Hasan Danuningrat. Juga pada ketika mulai dibentuk Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air (Peta), pada bulan September 1943, banyak pemuda dari Jawa Tengah mengikuti latihan di Pusat Latihan Peta di Bogor, dan kemudian diangkat menjadi *Daidanco* (Komandan Batalyon), *Cudanco* (Komandan Kompi) dan *Syodanco* (Komandan Peleton). Pada awal revolusi Kemerdekaan, mereka mengambil bagian aktif di dalam pembentukan pasukan BKR serta perebutan senjata dan kekuasaan dari Jepang yang terjadi di kota-kota penting di daerah Jawa Tengah. Di antara tokoh Komandan Peta tersebut dapat disebutkan antara lain: Raden Mohammad Susman, Suryo Sumpeno, Maryadi, Abdul Kadir, Karyadi, Slamet Suherman, Bambang Sugeng, Sarbini, Sudirman, Ahmad Yani, dan Mirza Sidarta. Di samping Peta, pembentukan Barisan Pemuda *Seinendan dan Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi), juga dilakukan di seluruh daerah Jawa Tengah yang dalam latihan baris-berbaris dan olahraga dilakukan oleh

prajurit-prajurit Peta. Ketika pemerintah Jepang mulai membentuk Dewan Pertimbangan Daerah (*Cuo Sangi-kai*) pada tahun 1943, tokoh-tokoh Jawa Tengah yang dapat disebutkan turut duduk di dalam pemerintahan, misalnya: R.P. Suroso yang diangkat sebagai *Syucokan* (Residen) Magelang, Mr. Wongsonegoro sebagai *Fuku Syucokan* (Wakil Residen) Semarang, R.A.A. Sosrodiprojo sebagai *Kenco* (Bupati), dan R. Gondomertosuprojo sebagai Walikota (*Syico*) Magelang. Kemudian didalam pembentukan organisasi Barisan Pelopor (*Shuisintai*) di Jawa Tengah pada tahun 1944, dapat disebutkan tokoh-tokohnya untuk daerah Magelang, misalnya Dr. Marjaban, Tartib Prawirodiharjo, Sumadi, Somowarsito, dan lain-lain. Organisasi Barisan Pelopor dibentuk sampai ke tingkat kelurahan. Pemimpin-pemimpin Barisan Pelopor ini pada masa awal Kemerdekaan juga mengambil peranan aktif di dalam pembentukan organisasi BKR dan penyusunan Pemerintah dan KNI Daerah.

3. Pada masa akhir pendudukan Jepang di Jawa Tengah, penderitaan dan kesengsaraan rakyat makin meningkat, sehingga rasa perlawanan dari rakyat dan para pemimpin makin meningkat pula. Keadaan ini menyebabkan di beberapa tempat mulai timbul perlawanan dan pemberontakan melawan pemerintahan militer Jepang. Misalnya di daerah Ampel Gading, kecamatan Pulosari, Pemalang, di mana rakyat membunuh Camat yang mencari simpanan padi dirumah penduduk. Juga di daerah Cilacap, Gumilir, terjadi pemberontakan pasukan Peta yang dipimpin oleh *Syodanco* Kusaeri dan kawan-kawannya pada bulan April 1945. Meskipun pemberontakan di Gumilir ini dapat diatasi oleh pasukan Jepang berkat bantuan Sudirman yang menjabat sebagai *Daidanco* Peta di Kroya, kejadian ini menunjukkan, bahwa rasa perlawanan terhadap Jepang dan keinginan untuk merdeka telah tertanam dihati rakyat dan anggauta pasukan Peta. Di kalangan pemimpin pergerakan, perlawanan secara tersembunyi juga dilakukan oleh gerakan di bawah tanah di beberapa kota di Jawa Tengah,

dengan jalan menyusup ke dalam jawatan pemerintah dan perusahaan. Pada awal Kemerdekaan, mereka berjasa dalam menyebarkan berita Proklamasi dan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Di antara mereka dapat disebutkan, misalnya di Magelang: Suprojo, Tartib, Ir. Saksono, Somowarsito, Nirwonoyudo, dan lain lain. Di Semarang dapat disebutkan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Semarang, yang dipimpin oleh S. Karna, Ibnu Parna, dan lain-lain. Pergerakan Angkatan Muda di Semarang telah menyiapkan pernyataan kemerdekaan dan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Jepang pada saat sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

4. Berita Proklamasi Kemerdekaan pada umumnya diterima di daerah melalui radio atau kurir. Di Semarang, berita Proklamasi diterima oleh markonis Sugiarin dari Kantor Berita Domei di Semarang yang kemudian menyerahkannya kepada Syarif Sulaiman dan M.H. Mintardjo. Kedua orang ini kemudian membawanya ke rapat Komite Persiapan Indonesia Merdeka di bawah pimpinan Mr. Wongsonegoro sebagai *Fuku Syucokan* di Semarang. Rakyat Semarang mendengar berita Proklamasi pada siang hari melalui acara siaran radio yang mendahului acara siaran sembahyang Jum'at. Dengan kejadian ini, dimulai persiapan bagi pembentukan Pemerintah Daerah di Semarang dan menyebar-luaskan berita Proklamasi. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Mr. Wongsonegoro mengumumkan pembentukan Pemerintah R.I. Daerah Semarang dan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke tangan pihak Indonesia. Pada tanggal 28 Agustus 1945 di gedung *Jawa Hokokai* dilangsungkan rapat pembentukan KNI Daerah Karesidenan Semarang. Sebagai Ketuanya telah dipilih Mr. Wongsonegoro, sedangkan untuk KNI Kotapraja diangkat Mr. Koentjoro sebagai Ketuanya. Setelah itu mulai dibentuk pula kesatuan BKR terdiri dari pemuda-pemuda bekas Peta, Heiho, Barisan Pelopor, KNIL dan lain-lain. BKR Semarang dipimpin oleh Tarunokusumo, Sutrisno Sudomo, dan Hendropranoto.

5. Perebutan kekuasaan dari Jepang di daerah Jawa Tengah pada umumnya dipimpin oleh Residen-Residen RI di daerah KNI Daerah, BKR Daerah dan pasukan pemuda. Di Semarang, perebutan kekuasaan, pendudukan kantor pemerintah, dan perebutan senjata, dilakukan oleh pemuda AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) dan BKR. Tetapi gerakan para pemuda dan BKR ini kemudian ditentang oleh Batalyon Kido yang bermarkas di Jatingaleh. Penyerangan pasukan Jepang ke kota Semarang pada pagi hari tanggal 15 Oktober 1945 telah mengakibatkan berkobarnya Pertempuran Lima Hari di Semarang yang merupakan pertempuran besar yang pertama pada awal revolusi Kemerdekaan di mana pasukan BKR dan pemuda bertempur melawan pasukan Jepang yang lengkap persenjataannya. Pertempuran ini baru dapat dihentikan setelah tercapai persetujuan di antara wakil-wakil pemerintah R.I. dengan pimpinan pasukan Jepang dan pimpinan pasukan Sekutu yang mendarat di Semarang.

Di Magelang, para pemuda melancarkan aksi pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 25 September 1945, yang memuncak dengan demonstrasi dan pengibaran benderah Merah Putih di puncak gunung Tidar dan perebutan senjata dari tangan Jepang. Di Pekalongan terjadi pertempuran di antara para pemuda dengan pasukan *Kempeitai* Jepang di gedung *Kempeitai* pada tanggal 3 Oktober 1945. Pada saat itu dua orang pemuda berusaha mengibarkan bendera Merah Putih di atas gedung *Kempeitai*. Pertempuran berlangsung tiga hari, dengan menyerahnya pasukan *Kempeitai*. Semua prajurit Jepang di daerah Pekalongan dikirim ke Purwokerto sebagai tawanan untuk diserahkan kepada Sekutu. Berlainan dengan di daerah lainnya di Jawa Tengah, di Banyumas perebutan senjata dari tangan Jepang dapat berjalan dengan baik di mana pimpinan pasukan Jepang di daerah Banyumas (Mayor Yuda) bersedia menyerahkan semua senjata dan alat perlengkapan lainnya kepada pihak BKR, berkat pimpinan dan diplomasi yang bijaksana dari Sudirman sebagai Komandan BKR daerah Banyumas dan Mr.

Iskak Tjokrohadisurya (sebagai Residen R.I. Banyumas). Pasukan Jepang kemudian ditawan di Banyumas untuk kemudian diserahkan kepada pihak Sekutu. Di Solo, perebutan kekuasaan dari Jepang dipimpin oleh KNI Daerah, BKR, dan Angkatan Muda Tentara Surakarta. Pertempuran yang besar terjadi di markas *Kempeitai* yang berusaha mempertahankan diri, tetapi pada akhirnya menyerah dan ditahan di Baros Tampir, Boyolali.

6. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan semangat perjuangan dan kemerdekaan yang berkobar di hati para pemimpin, pemuda, BKR, dan rakyat di berbagai daerah atau kota di Jawa Tengah pada awal revolusi kemerdekaan. Tetapi, di samping itu terjadi juga peristiwa yang menunjukkan suatu pemberontakan atau revolusi sosial melawan para pejabat pemerintah, suatu kebencian terhadap sisa feodalisme di masa dahulu. Kejadian yang dimaksud ialah Peristiwa Tiga Daerah (Tegal – Brebes – Pemalang) yang terjadi di Karesidenan Pekalongan pada awal bulan Nopember sampai pertengahan bulan Desember 1945. Gerakan pemberontakan Tiga Daerah ini dipimpin oleh Sakyani atau Kutil. Pada permulaannya gerakan ini berhasil menguasai beberapa daerah di Pemalang, Brebes, kota Tegal dan daerah-daerah di sekitarnya. Usaha pemerintah Daerah Jawa Tengah dan BKR setempat untuk menyelesaikan peristiwa ini tidak membawa hasil, bahkan utusan pemerintah RI, ternyata bersimpati kepada Gerakan Tiga Daerah, sehingga akhirnya ditangkap oleh pasukan TKR. Hal ini mendorong Kutil memimpin anak buahnya yang terdiri dari massa rakyat untuk menyerbu kota Pekalongan. Tetapi mereka dapat dikepung oleh pasukan TKR dan Kutil beserta anak buahnya kemudian menyerah dan ditawan. Pada tanggal 17 Desember 1945 dimulai operasi keamanan oleh pasukan TKR untuk mengamankan daerah yang telah dikuasai oleh Gerakan Tiga Daerah dan membebaskan pejabat pemerintah yang ditawan mereka, di antaranya Sayuti Melik dan Let. Kol. Iskandar Idris. Setelah itu pembesarpembesar pemerintah pusat RI. berkunjung ke daerah Tegal

dan sekitarnya untuk memberi wejangan dan menormalkan kembali keadaan.

7. Dengan kedatangan pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 19 Oktober 1945, bangsa Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah, telah dihadapkan dengan ancaman baru yang datang dari pihak Sekutu, karena mereka melakukan penguasaan daerah-daerah yang akan diserahkan kemudian kepada pasukan Belanda. Hal ini terbukti ketika pasukan Serikat itu diikuti oleh pasukan Belanda/NICA yang memakai seragam pasukan Sekutu, serta dari gerakan pasukan Sekutu yang mulai bergerak dari Semarang ke Ambarawa dan Magelang. Keadaan ini menyebabkan perlawanan dari pasukan BKR dan para pemuda. Pertempuran Magelang mulai terjadi pada tanggal 31 Oktober 1945 di mana pasukan Sekutu dikepung oleh pasukan BKR dan rakyat yang datang dari segala daerah di Jawa Tengah. Pada tanggal 21 Nopember 1945 kota Magelang dapat kita rebut, dan pasukan Sekutu terpaksa mengundurkan diri ke Ambarawa. Serangan pengepungan segera dilancarkan terhadap pasukan Sekutu di Ambarawa oleh pasukan BKR, pemuda dan rakyat. Pertempuran ini terkenal sebagai *Palagan Ambarawa*. Dalam pertempuran Ambarawa ini gugur Let. Kol. Isdiman, komandan Resimen I Purwokerto. Komando pertempuran kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Serangan umum terhadap Ambarawa dimulai tanggal 14 Desember 1945 oleh pasukan TKR dari segala arah, sehingga Ambarawa dapat direbut oleh pasukan kita pada tanggal 16 Desember 1945, dan pasukan Sekutu mengundurkan diri ke Semarang. Kekhawatiran pihak Indonesia menjadi kenyataan ketika pasukan Sekutu menyerahkan daerah kedudukannya kepada pasukan Belanda/NICA. Pada tanggal 16 Mei 1946 pasukan Inggris menyerahkan kota Semarang kepada Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Sekutu (Inggris) telah diperalat oleh pihak Belanda dalam usahanya untuk menjajah kembali Indonesia.

8. Pada masa menjelang Aksi Militer Belanda I, keadaan

daerah Jawa Tengah diliputi oleh usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan Belanda, meskipun telah ditanda-tangani Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1946.

Keadaan kehidupan sosial-ekonomi rakyat juga mengalami keadaan yang sulit yang diliputi oleh suasana genting dan siap tempur menghadapi serangan Belanda. Pejabat pemerintah berusaha menghadapi keadaan itu agar dapat tetap terpelihara semangat perjuangan dan kesanggupan bertempur melawan musuh. Maka ketika pasukan Belanda melancarkan Aksi Militer I pada bulan Juli 1947, pasukan TNI dengan dibantu rakyat menahan kemajuan serangan pasukan Belanda. Serangan Belanda dilakukan oleh Brigade V di bawah komando Jendral Mayor Gatot Subroto. Daerah Tegal dan Brebes dipertahankan oleh Resimen B dibawah komando Let. Kol. Mohammad Susman dengan dibantu oleh pasukan ALRI Tegal dan pasukan laskar perjuangan. Meskipun kota-kota di sekitar Pekalongan jatuh ke tangan Belanda, tetapi telah dibumi-hanguskan. Pemerintah sipil RI Daerah Pekalongan mengungsi ke Banjarnegara dan Wonosobo. Salah seorang pejabat pemerintah RI yang ikut mengungsi pemerintah RI ke Wonosobo, ialah Bapak Mochtar yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kemakmuran Kantor Karesidenan Pekalongan. Pada akhirnya satu-persatu kota-kota di daerah Jawa Tengah bagian Barat jatuh ke tangan Belanda, sampai ke daerah Gombong – Kebumen. Kota Gombong yang strategis itu dapat dikuasai Belanda, sehingga pusat pertahanan pasukan kita sampai terjadinya gencatan senjata, dipusatkan di Kebumen. Pertahanan di daerah Kebumen – Purworejo – Gombong berada di bawah Divisi III pimpinan Mayor Jendral Susalit. Brigade Mataram yang dipimpin Kolonel Mukahar dan berkedudukan di Purworejo membawahi tiga resimen di daerah ini. Pada tahun 1948, Batalyon 66 yang mempertahankan Kebumen mengalami reorganisasi dengan membentuk Batalyon Tempur dan Batalyon Teritorial.

9. Gangguan yang terbesar selama perjuangan memperta-

hankan kemerdekaan, ialah Pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948. Pemberontakan PKI dimulai dengan gerakan pengacauan di daerah Solo. Kaum pemberontak memproklamkan pembentukan Pemerintah Sovyet Republik Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Akibat dari pemberontakan PKI ini terasa di daerah-daerah lain di Jawa Tengah, misalnya di Purworejo, Cepu dan Blora, meskipun pada akhirnya pasukan TNI dan rakyat dapat mengatasinya.

Dalam bidang pemerintahan dapat disebutkan, bahwa pemerintah sipil RI dipindahkan dari Gombong ke Kebumen, dan pembentukan Badan Koordinator Kabupaten Kebumen yang mengkoordinasi segala kekuatan di daerah Kebumen. Pemerintahan daerah di Pekalongan dilaksanakan oleh pemerintah sipil RI dari kota Wonosobo dan Banjarnegara.

10. Pertahanan TNI untuk menghadapi serangan Belanda setelah gencatan senjata Perjanjian Renville, dilakukan oleh Divisi II dan III yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto (Divisi II) dan Kolonel Bambang Sugeng (Divisi III), yang mempertahankan daerah Yogyakarta dan Surakarta, dengan perincian: Brigade X di bawah Let. Kol. Suharto mempertahankan Yogyakarta; dua batalyon dari Brigade ini dipersiapkan untuk mempertahankan daerah Kebumen – Purworejo. Brigade IX di bawah Mayor Ahmad Yani mempertahankan daerah Magelang dan Temanggung, dan mengadakan penyusupan ke daerah Kendal dan Semarang. Brigade VIII di bawah Let. Kol. Bahrin mempertahankan daerah Kabupaten Wonosobo, dan mengadakan penyusupan ke daerah Banyumas dan Pekalongan.

Pertahanan ini ditujukan untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda melalui jalan raya Gombong – Purworejo, Purworejo – Banjarnegara, dan Ambarawa – Magelang. Namun pada waktu itu pasukan TNI masih harus mengkonsolidasi diri setelah terjadinya pemberontakan PKI, bahkan di beberapa daerah masih mengadakan operasi penumpasan.

11. Serangan Belanda didahului dengan serangan mendadak

pasukan payung ke kota Yogyakarta, diikuti dengan serangan dari arah barat (Gombang) dan utara (Ambarawa). Pasukan Belanda yang maju dari Purorejo terlambat menguasai Magelang, sehingga memberi kesempatan kepada pasukan kita untuk mengadakan bumi hangus dan pengungsian pemerintah sipil ke daerah pedalaman. Magelang diduduki oleh pasukan Belanda yang datang dari Purworejo, baru diikuti oleh kedatangan pasukan yang datang dari utara (Ambarawa). Dari Magelang, mereka melancarkan penyerangan secara maksimal ke daerah-daerah lain, misalnya ke Temanggung, Banjarnegara, dan Wonosobo. Pasukan TNI dari Brigade III di bawah Let. Kol. Bahrn mengundurkan diri ke pedalaman untuk melakukan perang gerilya dan membentuk KODM-KODM di kawedanan-kawedanan dan desa-desa. Setelah agresi Belanda ini, pemerintah sipil R.I. Daerah Pekalongan bersama TNI kembali memasuki daerah Pekalongan dari Wonosobo untuk melakukan perang gerilya. Pemerintah RI Daerah Pekalongan dipimpin oleh Mayor Borotsewoyo yang memimpin Staf pemerintahan Militer, Residen Sujono yang memimpin Bagian Pemerintahan Sipil, sedang kesatuan-kesatuan TNI dipimpin oleh Mayor AL. Suhadi.

Sistem pemerintahan RI pada masa gerilya, dapat diketahui dari Instruksi Komandan Brigade III yang antara lain menetapkan bahwa pemerintah sipil harus dibentuk dengan lengkap, tetapi dengan susunan yang sesingkat-singkatnya untuk mengikuti gerakan pasukan di pedalaman, dan disubordinasi dalam pemerintahan militer pada tingkatannya masing-masing, pejabat-pejabat sipil dimasukkan dalam staf pemerintahan militer dengan tetap mengurus administrasi pemerintahan di kesatuannya, sedangkan jawatan dan dinas termasuk ke dalam pemerintahan daerah dimana mereka diperbantukan.

Pada masa menghadapi serangan Belanda dan masa perang gerilya, semangat perlawanan rakyat tetap tinggi dalam membantu pasukan TNI dan aparat pemerintah RI, meskipun banyak kesukaran yang dialami oleh pasukan TNI karena keku-

rangan senjata dan perlengkapan, obat dan pakaian. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa rakyat Jawa Tengah tetap berjiwa Republikan dan mempunyai kepercayaan terhadap pemerintah RI.

12. Untuk melemahkan dan mengepung Pemerintah RI, pihak Belanda sebelum melancarkan Agresi Militer II, telah mendirikan negara-negara bagian serta membentuk pemerintahan federal ciptaan Van Mook, tanpa mengadakan perundingan dengan Pemerintah RI. Tindakan Belanda ini melanggar persetujuan Linggarjati dan Renville dan bertujuan untuk mengisolasi RI. Politik Belanda ini terbukti dengan diadakannya konperensi di Bandung oleh Belanda pada bulan Mei 1948 di antara negara buatan Belanda untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Serikat. Meskipun daerah Jawa Tengah yang diduduki Belanda, yang pemerintahannya dikenal sebagai Daerah Recomba, juga mengirimkan utusannya dalam konperensi tersebut, tetapi rakyat Jawa Tengah pada umumnya masih tetap setia kepada Pemerintah RI. di Yogyakarta dan tidak mempercayai dan memandang dengan penuh curiga politik federal Belanda. Sikap pro Republik dari rakyat Jawa Tengah ini dapat dibuktikan dari banyaknya pemimpin daerah dan pegawai sipil Republik yang tidak mau bekerja di bawah pemerintahan pendudukan Belanda, karena lebih senang ikut tentara Republik di daerah-daerah pedalaman.

Berbeda dengan konperensi di Bandung buatan Van Mook, adalah Konperensi Antar - Indonesia yang diadakan atas prakarsa pemerintah RI dan BFO pada bulan Juli dan Agustus 1949 di Yogyakarta dan Jakarta, segera setelah Pemerintah RI dikembalikan di Yogyakarta. Konperensi Antar - Indonesia dihadiri oleh wakil-wakil Pemerintah RI dan wakil-wakil BFO yang merupakan persatuan negara-negara federal buatan Belanda. Konperensi dimaksudkan untuk mempersatukan sikap dan tenaga serta menggalang strategi bersama dalam menghadapi pihak Belanda di dalam Konperensi Meja Bundar yang akan diadakan. Dari keputusan yang diambil ternyata bahwa negara-

negara bagian dan daerah bagian atau Recomba masih mengakui kewibawaan pemerintah RI, serta tidak mau diadu domba oleh Belanda untuk memusuhi RI. Ini juga menunjukkan, bahwa jiwa Republikan dan cita-cita kemerdekaan mempunyai pengaruh yang besar di kalangan para pemimpin dan rakyat di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda.

Juga hasil Konperensi Meja Bundar yang berupa pembentukan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), pada umumnya tidak diterima oleh rakyat Indonesia, termasuk rakyat daerah propinsi Jawa Tengah. Rakyat tetap menghendaki bentuk Negara Kesatuan RI, sehingga negara-negara bagian dan daerah bagian itu gugur berjatuhan menghadapi tuntutan rakyat di daerah-daerah yang ingin menggabungkan diri dengan pemerintah RI.

13. Dalam bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah, pada umumnya dapat dikatakan bahwa hampir semua pikiran dan tenaga dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam hal ini terjalin kerjasama yang erat di antara pemimpin pemerintah — TNI — dan rakyat, baik pada masa sebelum maupun sesudah Agresi Militer Belanda II. Kehidupan tidak terasa sangat sengsara, karena gerak kehidupan masyarakat dirasakan bersama, baik oleh rakyat, tentara, maupun para pemimpin. Lebih-lebih pada masa gerilya, rakyat di daerah pedesaan membantu pasukan TNI dan para pemimpin yang melakukan perlawanan gerilya di daerahnya. Hal ini juga menunjukkan, bahwa kehidupan rakyat di daerah pedesaan adalah cukup makmur, dan tidak berkekurangan. Karena kehidupan sosial-ekonomi terjalin erat dengan suasana perjuangan kemerdekaan, sehingga meskipun sudah dilakukan usaha ke arah mempertinggi kemakmuran rakyat, namun usaha pemerintah itu masih banyak tercurak kepada masalah politik dan militer. Keadaan perdagangan pada umumnya masih banyak dikuasai oleh pedagang Cina, baik di kota maupun di desa. Sedangkan kehidupan di kota dikuasai orang Belanda, Cina, dan orang non-bumiputera lainnya. Di samping itu, sebagai akibat

perang, banyak sarana perekonomian dan perdagangan yang mengalami kerusakan, banyak pabrik hancur, jalan dan jembatan rusak, sehingga komunikasi dari kota ke daerah pedalaman menjadi sulit. Semua ini sangat menghambat perdagangan dan perekonomian.

Dalam bidang pendidikan, di daerah RI dilaksanakan dengan menerapkan pasal 31 U.U.D. Sekolah-sekolah mulai diatur meskipun masih dalam suasana revolusi kemerdekaan, sehingga terdapat jenjang pendidikan yang lengkap mulai dari Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) sampai Perguruan Tinggi (Universitas Gajah Mada di Yogyakarta dan Klaten), selain itu terdapat sekolah Swasta (Taman Siswa dan Muhammadiyah). Di desa pada umumnya masih terdapat sekolah rakyat penerus Sekolah Desa Angka Dua. Di daerah pendudukan Belanda terdapat sekolah dari Sekolah Rendah sampai AMS dan HBS yang terdapat di kota besar seperti Semarang dan Ambarawa, tetapi tidak banyak menarik anak-anak Indonesia yang justru bersekolah di sekolah yang didirikan oleh kaum republikan seperti SMP/SMT BAPRIS di Semarang, meskipun serba darurat.

Kehidupan pers juga mencerminkan kehidupan masa revolusi. Surat kabar yang terbit pada waktu itu, misalnya, *Sinar Baru* yang kemudian bernama *Warta Indonesia*; di Yogyakarta harian *Kedaulatan Rakyat* dan *Nasional*; di Solo harian *Merdeka* yang masih dicetak dengan handzet. Akibat perang kemerdekaan, banyak wartawan yang hidup di ibukota RI dan di pedalaman. Sejak bulan Juni 1946 sebenarnya telah berdiri organisasi SPS sebagai organisasi persatuan dari para pengusaha surat kabar dan para wartawan, tetapi karena perang tidak memperlihatkan kegiatan yang nyata. Dalam hal siaran Radio, Radio Republik Indonesia (RRI) berkembang dari perebutan oleh para pemuda terhadap Jawatan Radio Pemerintah Jepang (*Hosokyoku*). Studio-studio RRI yang pertama di Jawa Tengah, antara lain di Yogyakarta, Surakarta, Semarang, dan Purwokerto.

Dalam bidang pergerakan wanita, setelah Proklamasi Kemerdekaan Presiden Soekarno menunjuk Ny. Suwarni Pringgodigdo

untuk memimpin Pergerakan Wanita Indonesia dengan tugas utama menyelenggarakan dapur umum dan kebutuhan makanan bagi para pejuang. Dapur Umum hampir terdapat di setiap tempat dan basis gerilya. Pada tanggal 17 Desember 1945 di laksanakan Konggres Wanita Indonesia yang pertama di Klaten untuk menggalang persatuan wanita Indonesia dalam perang kemerdekaan menghadapi Belanda. Kongres ini menghasilkan berdirinya Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), meskipun yang tergabung di dalamnya baru dua perkumpulan wanita. Pada tanggal 24 – 26 Pebruari 1946 diadakan Kongres Wanita Indonesia di Solo yang menghasilkan dibentuknya Kowani (Konggres Wanita Indonesia) sebagai wadah dari semua organisasi wanita. Pada tahun 1947 Kowani menyelenggarakan kongresnya di Magelang yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Jendral Sudirman. Tokoh-tokoh pergerakan wanita Indonesia pada masa itu dapat disebutkan, antara lain Ny. Suwarni Pringgodigdo, Nn. Erna Jayadiningrat, Nyi Hajar Dewantara, Ny. S. Kartowiyono, Ny. B. Gularso, Ny. Sukanto, Ny. Sunaryo Mangunpustpito, dan lain-lain.

DAFTAR SUMBER

1. Achmad, Purnawirawan TNI – AD, *Sejarah Peristiwa Tiga Daerah Tegal – Brebes – Pemalang, Ranggugrejo Gg. I No. 12, Tegal.*
2. Banjaransari, Soetomo, "Kota Yogyakarta 200 Tahun", dalam *Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 Tahun Kota Yogyakarta 1756 – 1956.*
3. Djamhari, Drs. Saleh A. *Markas Besar Komando Jawa (1948 – 1949)*, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1967.
4. Djojodisurjo, Ahmad Subardjo, SH, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*, Gunung Agung, Jakarta, 1978.
5. Dokumen Sendam VII/Diponegori, No. 20/4.
6. *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, Serikat Penerbit Surat Kabar, Percetakan Negara, Jakarta, tt.
7. Gostschalk, Louis, *Mengerti Sejarah: Pengantar Methode Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.

8. Hartoyo, Ir. Pensiunan Dosen Fakultas Teknik UGM Yogyakarta *Wawancara*.
9. Hatta, Mohammad, *Sesudah 25 Tahun*, Pidato Diucapkan pada Dies Natalis IX Universitas Syah Kuala Darussalam di Banda Aceh, 2 September 1970, Jambatan, Jakarta, 1970.
10. Imran, Drs. Amrin, et.al., *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat*, Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
11. Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Tengah, *R.I. Propinsi Jawa Tengah*, Semarang, 1952.
12. Jusuf, Sudomo, *Sejarah Perkembangan Angkatan Laut*, Departemen Pertahanan Keamanan – Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.
13. Kartodirjo, Sartono, et. al., *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI, Departemen P dan K Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
14. Kartowiyono, Ny. Suyatin, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
15. Komando Daerah Militer VII/Diponegoro, Dinas Sejarah Militer, *Penuturan Let. Kol. Purnw. Boerham S. Nardi tentang Pengalaman pada Pertempuran Lima Hari di Semarang*.
16. Kroef, Dr. J.M. van der, *Indonesia in tehe Modern World*, Massa Baru, Bandung, 1954.
17. Kutoyo, Sutrisno, Pensiunan Pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, *yang bekas pelajar SMT/BAPRIS, Informan*.

18. Lopian, A.B., *Beberapa Masalah Penelitian dan Penulisan Sejarah (Sebuah Ikhtisar)*, Paper pada Pengarahan Tenaga Peneliti Kebudayaan Daerah, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Cisarua, Bogor, 12 Juni 1979.
19. Malik, Adam, *Mengabdikan Republik*, Jilid II, Angkatan 45, P.T. Gunung Agung, Jakarta, 1978.
20. Mintardjo, M.S. "Gema Proklamasi '45 di Semarang", *Intisari*, Agustus 1970.
21. Mochtar, *Masa Revolusi Kemerdekaan 1942 – 1949*, ditulis untuk IKIP Semarang, tgl. 3 Nopember 1979.
22. Moekhardi, Drs. *Akademi Militer Yogya Dalam Perjuangan Pesisir 1945 – 1949*, P.T. Inaltu, Jakarta, 1977.
23. Muslimin, Mr. Amrah, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903 – 1958*, Penerbitan Jambatan, Jakarta 1960.
24. Nasution, Dr. A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid I, Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat, Bandung, 1977.
25. Nasution, Dr. A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa, Bandung 1978 dan 1979 Jilid IV s/d IX.
26. Notosusanto, Nugroho, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Seri Textbook Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1971.
27. Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1978.

28. Notosusanto, Nugroho, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, P.T. Gramedia, Jakarta, 1979.
29. Panitia Peringatan 17 Agustus 1953 Kabupaten Kebumen, *1 Windu Kebumen Berjuang*, Bagian Penerangan, Kebumen 1953.
30. Peristiwa Semarang, *Naskah Mr. Wongsonegoro*, Dokumentasi Sendam VII/Diponegoro.
31. Poerbokawatja, Prof. Soegarda, *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia*, Yayasan Idaya, Jakarta, 1975.
32. Poerbokawatja, Prof. Dr. R. Soegarda, *Pendidikan Menehngah Umum dalam Alam Indonesia Merdeka*, Yayasan Idayu Jakarta 1979.
33. Poerbopranoto, Prof. Koentjara S.H. *Kisah Sekelumit Tentang Pertempuran Lima Hari di Semarang*.
34. Pringgodigdo, A.G. "Tatanegara di Jawa pada waktu Lahirnya R.I." Pidato Dies Natalis ke VIII University Islam Indonesia, dalam *Buku Peringatan U I I 10 Tahun, 1955*.
35. Raliby, Osman, *Dokumena Historica*, Bulan Bintang, Jakarta.
36. Rasyid, Gadis, "17 Agustus di Kota Semarang", *Intisari*, Agustus 1968.
37. Sastroamidjojo, Ali, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, P.T. Kinta, Jakarta, 1974.
38. Sayidi, *Naskah Pembantu Team Penggalan Sejarah Resimen XII Brigade VII Divisi III Pekalongan*.

39. *Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang*, Semarang.
40. *Selayang Pandang Jawa Tengah 1978*, Penerbit Kantor Statistik Jawa Tengah, Semarang, 1978.
41. Semdan, VII Diponegoro, *Sirnaning Yakso Katon Gapura-ning Ratu*, Yayasan Penerbit Diponegoro, Semarang, 1953.
42. Sidarta, Mirza, *Mengenang Pertempuran Lima Hari di Semarang*, Semarang t.t.
43. Sihombing, Drs. O.D.P. *Pemuda Indonesia Menentang Fasis-me Jepang*, Sinar Jaya, Jakarta, 1962.
44. Soebagiyo IN, Haji, *Garis Besar Perkembangan Pers Indone-sia* Workshop Untuk Majalah dan Mingguan se-Jawa Tengah 1971.
45. Soebagiyo IN, "Ngungkap Sejarah Perjuangan Linggarjati", *Harian Suara Merdeka*, Semarang, tgl. 25 Maret 1977 No. 36 Th. XXVIII hal. IV.
46. Soemarno, B.A. *Tegal, Bumi Dan Sejarahnya*, Dep. P dan K, Kantor Kabupaten Tegal, 1979.
47. Soepardjo, R. *Perjuangan Phisik Rakyat Kabupaten Daerah Tk. II Purworejo*, Purworejo, 1978, Tidak terbit (konsep).
48. Soenaryo R. *Brigjen CPM Purnawirawan, Bekas Kepala Po-lisi Karesidenan Pekalongan*, Wawancara.
49. Sosrokusumo R.A., *Desentralisasi dan Hak Otonomi*, Per-pustakaan Nasional Adji, Surabaya, 1951.
50. *Surara Karya*, Sabtu, 16 Juni 1979, No. 2500 Th. IX.

51. *Suara Merdeka*, "Catatan Harian & Memoires Sersan Tanaka dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang, 11 Oktober 1973.
52. *Suara Merdeka*, Senin, tgl. 16 – 8 – 1976, Semarang.
53. *Suara Merdeka*, dalam Minggu Ini, "Mereka Kenang Kembali Pendaratan di Kragan 1942" tgl. 2 Desember 1978.
54. *Suara Merdeka*, No. 198, Th XXX tg. 7 September 1979.
55. *Suara Merdeka*, Minggu Ini, 19 Oktober 1979 Th. XXIX No. 182.
56. *Subiyakto*, Dr. Jakarta, Wawancara.
57. Sukirno, et al, *Semarang*, Djapenko, Semarang, 1956.
58. Sumarno, A.J. *Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan di Magelang 1945*, Thesis Sarjana Jurusan Sejarah FKIS–IKIP Semarang.
59. Suprpto, Bambang, *Kisah Pertempuran 5 hari Semarang*,
60. *Tanaka*, *Catatan Harian dan Memoires Sersan Tanaka*, terjemahan Harian *Suara Merdeka*, 10 Oktober 1973.
61. Team Pemda, Kab. Dati II Magelang, *Naskah Perjuangan Rakyat Kab. Dati II Magelang*, Pemda. Kab. Dati II Magelang 1975.
62. Team Akabri, *Sejarah Pengibaran Sang Merah Putih Yang pertama di Puncak Tidar, 25 September 1945*, Magelang, 1975.
63. United Kingdom Military Series, *History of the Second*

World War, Vol. V, 1979.

64. Wilopo, SH. *Zaman Pemerintahan Partai-partamahan Kelemahan*, Yayasan Idayu, Jakarta, 197
65. *Wilopo 70 tahun*, Gunung Agung, Jakarta 1979.
66. Wongsonegoro, Mr. *Peristiwa Semarang*, Dokumentasi Sendam VII/Diponegoro, t.t.
67. Yamin, Moh. *Proklamasi dan Konstitusi*, Penerbit Jambatan Jakarta, 1955.

**Perpustakaan
Jenderal**

9